



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta upaya menghadapi dampak perubahan iklim;
- b. bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi, dilaksanakan koordinasi lintas sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan melalui kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas dalam mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana aksi nasional pangan dan gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
5. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan RAN-PG Tahun 2026-2029.
- (2) RAN-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

RAN-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan:

- a. mengintegrasikan perencanaan pembangunan pangan dan gizi yang berketahanan iklim melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berketahanan iklim; dan
- c. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dalam pembangunan pangan, gizi, dan ketahanan iklim.

Pasal 4

- (1) RAN-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. analisis situasi;
 - c. rencana aksi multisektor;
 - d. kerangka pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi; dan
 - e. penutup.
- (2) RAN-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengimplementasikan kebijakan strategis pangan dan gizi yang diterjemahkan dalam tujuan strategis, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman yang berketahanan iklim;
 - b. peningkatan keterjangkauan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman yang berketahanan iklim;
 - c. peningkatan pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman serta pelayanan gizi masyarakat yang berketahanan iklim; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi yang berketahanan iklim.
- (3) Pelaksanaan RAN-PG Tahun 2026-2029 dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5

RAN-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan acuan untuk penyusunan RAD-PG Provinsi.

Pasal 6

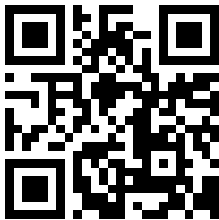
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RAD-PG Provinsi yang telah ditetapkan dan periodenya berakhir di tahun 2026 tetap berlaku; dan
- b. RAD-PG Provinsi yang telah ditetapkan dan periodenya berakhir di tahun 2027, tahun 2028, atau tahun 2029 harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 655



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026-
2029

RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI
2026-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1 -
A. Peran Pangan dan Gizi terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia	1 -
B. Determinan Masalah Pangan dan Gizi.....	3 -
C. Keterkaitan Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim	6 -
D. Pembangunan Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam Kesepakatan Global	8 -
E. Kedudukan RAN-PG dalam Kebijakan Pembangunan Nasional.....	9 -
F. Arah Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional.....	11 -
BAB II ANALISIS SITUASI.....	14 -
A. Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia.....	14 -
B. Situasi Ketersediaan Pangan	18 -
C. Situasi Keterjangkauan Pangan	20 -
D. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	21 -
E. Situasi Kerawanan Pangan.....	28 -
F. Situasi Permasalahan Gizi di Indonesia.....	36 -
G. Tantangan Masalah Pangan dan Gizi di Indonesia.....	42 -
BAB III KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI.....	48 -
A. Pendekatan Multisektor dalam Pembangunan Pangan dan Gizi....	48 -
B. Fungsi, Tujuan dan Sasaran	48 -
C. Ruang Lingkup	52 -
D. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....	53 -
E. Metodologi Penentuan Tujuan Strategis, Strategi, dan Aksi	55 -
F. Penentuan Strategi dan Aksi yang Responsif Terhadap Perubahan Iklim	60 -
G. Pengorganisasian	69 -
H. Peran Sektor Non-Pemerintah	70 -
I. Pemantauan dan Evaluasi.....	70 -
BAB IV PENUTUP.....	73 -
Lampiran I Matriks Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2026-2029	74 -
Lampiran II Program dan Kegiatan Bidang Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2025-2029.....	140 -
Lampiran III Penajaman Strategi dan Aksi RAN-PG berdasarkan Dampak Perubahan Iklim	150 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Konsep Determinan Masalah Pangan dan Gizi.....	4 -
Gambar 2.	Konsep Keterkaitan Pangan, Gizi, dan Iklim pada Lima Sistem Utama.....	8 -
Gambar 3.	Posisi RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2025-2029 dan TPB/SDGs 2030.....	10 -
Gambar 4.	Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan.....	11 -
Gambar 5.	Tren Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan (FIES)....	14 -
Gambar 6.	Capaian Angka PoU Indonesia Tahun 2015-2025 dan Target Angka RPJMN 2020-2025	15 -
Gambar 7.	Angka PoU dan Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2017-2025	16 -
Gambar 8.	Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dengan Skor PPH Konsumsi Tahun 2018-2024.....	17 -
Gambar 9.	Skor PPH Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Tahun 2023-2025 - 18 -	
Gambar 10.	Tingkat Keterjangkauan Tiga Jenis Diet di Indonesia	21 -
Gambar 11.	Target dan Capaian Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2021-2025	22 -
Gambar 12.	Konsumsi Energi Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Tahun 2024-2025	23 -
Gambar 13.	Konsumsi Protein Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Tahun 2024-2025	24 -
Gambar 14.	Tren Kontribusi Pangan Nabati dan Hewani terhadap AKP Tahun 2021-2025	24 -
Gambar 15.	Target dan Capaian Konsumsi Sayur dan Buah Tahun 2025-2029	26 -
Gambar 16.	Target dan Capaian Persentase PSAT yang Memenuhi Syarat tahun 2021-2024.....	27 -
Gambar 17.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025.....	31 -
Gambar 18.	Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rilis Mei 2026- 33 -	
Gambar 19.	Tren Prevalensi <i>Stunting</i> Balita Tahun 2021-2024.....	36 -
Gambar 20.	Tren Prevalensi <i>Wasting</i> dan <i>Underweight</i> Pada Balita Tahun 2021-2024	37 -
Gambar 21.	Tren Prevalensi Obesitas Balita Tahun 2021-2024	37 -
Gambar 22.	Prevalensi Status Gizi Anak dan Remaja, Tahun 2018 dan 2023	38 -
Gambar 23.	Status Gizi Dewasa (Usia > 18 Tahun) Tahun 2023.....	39 -
Gambar 24.	Prevalensi Anemia Menurut Usia secara Nasional	39 -
Gambar 25.	Prevalensi Anemia pada Anak Usia Sekolah dan Remaja secara Nasional	40 -
Gambar 26.	Prevalensi Anemia pada Wanita Hamil (15-54 Tahun) secara Nasional	41 -
Gambar 27.	Persentase Kekurangan Vitamin A (KVA) pada Kelompok Anak di Indonesia, Tahun 1995-2023	41 -
Gambar 28.	Peta Indeks Gabungan Risiko Perubahan Iklim dan Masalah Gizi	47 -
Gambar 29.	Kerangka Pikir RAN-PG Tahun 2026-2029	59 -
Gambar 30.	Diagram Dampak Perubahan Iklim terhadap Pilar Ketahanan Pangan	68 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*Backcasting*) dan 2025- 29 -

Tabel 2. Sebaran Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025- 30 -

Tabel 3. Perbandingan Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota FSVA Tahun 2024 dan Tahun 2025.....- 32 -

Tabel 4. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029- 49 -

Tabel 5. Definisi Operasional Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim- 60 -

Tabel 6. Definisi Operasional Sistem Utama Antara Perubahan Iklim dan Gizi- 62 -

DAFTAR SINGKATAN

AKE	: Angka Kecukupan Energi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKP	: Angka Kecukupan Protein
ANC	: <i>Antenatal Care</i> (Pemeriksaan Kehamilan)
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B2SA	: Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
Bapanas	: Badan Pangan Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB/PB, BB/TB	: Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan
BGN	: Badan Gizi Nasional
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSN	: Badan Standardisasi Nasional
BULOG	: Badan Urusan Logistik
CBPD	: Cadangan Beras Pemerintah Daerah
CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
CPPD	: Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
DAS	: Daerah Aliran Sungai

DBD	: Demam Berdarah Dengue
FAO	: Food and Agriculture Organization
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
GGL	: Gula, Garam, dan Lemak
GHP	: <i>Good Handling Practice</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
IMT/U	: Indeks Massa Tubuh menurut Umur
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
KDMP	: Koperasi Desa Merah Putih
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kemendikdasmen	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemendikti	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kemendukbangga	: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenko Pangan	: Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KemenPU	: Kementerian Pekerjaan Umum
Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
Kemensos	: Kementerian Sosial
KemenUMKM	: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kementan	: Kementerian Pertanian
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KSPG	: Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
KSP	: Kawasan Sentra Produksi Pangan
KVA	: Kekurangan Vitamin A
MMS	: <i>Multiple Micronutrient Supplementation</i>
MP-ASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NIB	: Nomor Induk Berusaha
OKKP	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDT	: Pembangunan Daerah Tertinggal
PGS-PL	: Pengembangan Gizi Seimbang-Pangan Lokal
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
PN	: Prioritas Nasional
PPH	: Pola Pangan Harapan
PSAT	: Pangan Segar Asal Tumbuhan
PTM	: Penyakit Tidak Menular
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PUGIS	: Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
RAD-PG	: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAN-PG	: Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG(s)	: <i>Sustainable Development Goal(s)</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEANUTS	: <i>South East Asian Nutrition Survey</i>
SIPSAT	: Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
SKI	: Survei Kesehatan Indonesia
SKPG	: Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPPG	: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
SSP	: Susut Pangan dan Sisa Pangan
SUN Movement	: <i>Scaling Up Nutrition Movement</i>

TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TTD	: Tablet Tambah Darah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WHA	: <i>World Health Assembly</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I PENDAHULUAN

- A. Peran Pangan dan Gizi terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya menjadi elemen fundamental dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan konsumsi pangan yang mencukupi, aman, berkualitas, dan bergizi seimbang. Upaya ini harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, baik antar wilayah di tingkat nasional, daerah, antar waktu maupun individu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, serta kearifan lokal. Sebagai negara dengan populasi besar dan kekayaan sumber daya alam serta pangan yang beragam, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berdaulat guna mewujudkan ketahanan pangan yang optimal.

Ketahanan pangan dan gizi berfungsi sebagai pilar utama dalam pembangunan manusia. Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan yang berkelanjutan tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Negara dengan ketahanan pangan yang baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena kualitas sumber daya manusia yang meningkat dan stabilitas sosial yang terjaga. Selain itu, peningkatan aspek gizi dari pangan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan SDM dengan meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem pangan yang berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan ekoregion, guna memastikan keberlanjutan produksi dan konsumsi pangan masyarakat, sekaligus untuk mendukung terwujudnya sistem pangan dan gizi yang berketahanan iklim.

Namun demikian, meskipun ketersediaan pangan di tingkat makro dan meso relatif mencukupi, belum seluruh individu mampu mengakses pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Kelompok dengan kebutuhan khusus, seperti rumah tangga miskin dan kelompok rentan terutama ibu hamil dan anak balita merupakan kelompok yang paling berisiko mengalami kekurangan gizi, sehingga diperlukan intervensi khusus yang terarah dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah gizi secara langsung, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita. Beberapa intervensi yang dilakukan meliputi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, suplementasi tablet tambah darah untuk mencegah anemia, serta promosi dan konseling menyusui untuk mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Selain itu, pemantauan pertumbuhan balita, pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC), serta imunisasi dasar lengkap berperan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Edukasi gizi bagi keluarga juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pola makan sehat dan gizi seimbang.

Fase awal kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat krusial dalam menentukan status gizi dan kesehatan jangka panjang seseorang. Pemenuhan gizi optimal pada periode ini terbukti mampu mencegah *Stunting*, mendukung perkembangan otak dan kemampuan belajar, serta meningkatkan kesehatan mental anak di masa depan. Sebaliknya, kekurangan zat gizi selama periode ini dapat mengganggu perkembangan motorik dan kognitif, serta meningkatkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular di kemudian hari.

Namun demikian, upaya pemenuhan gizi tidak dapat hanya dimulai pada saat kehamilan. Remaja, khususnya remaja perempuan, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan status gizi. Remaja yang sehat dan bergizi baik akan lebih siap menjalani kehamilan yang sehat dan memberikan gizi yang optimal bagi anak balita mereka kelak. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan dan gizi remaja merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Pada ibu hamil dan wanita usia subur, anemia menjadi masalah gizi yang cukup serius. Oleh karenanya, perlu memastikan kecukupan zat besi dalam tubuh melalui suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) atau *Multiple Micronutrient Supplementation* (MMS), fortifikasi pangan serta asupan makanan yang cukup dan beragam. Kekurangan gizi pada periode ini dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan kelahiran prematur. Dampaknya sering kali meluas hingga memengaruhi kemampuan kognitif anak secara permanen.

Kekurangan asupan gizi berdampak luas pada individu dari berbagai kelompok usia, sehingga membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mengoptimalkan potensi diri sekaligus menghadapi tantangan dalam memutus siklus kemiskinan serta ketidaksetaraan antar generasi. Masalah gizi ini juga berdampak lintas sektor, dengan perempuan dalam berbagai kelompok usia menghadapi hambatan tambahan akibat norma dan nilai budaya yang membatasi peran mereka. Oleh karena itu, diperlukan juga langkah-langkah berkelanjutan yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk mengatasi akar masalah gizi. Pada sektor ekonomi, masalah gizi pada anak dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama pembangunan nasional. Berbagai bentuk malnutrisi, seperti *stunting*, *wasting*, *underweight*, anemia, dan gangguan akibat kekurangan iodium, dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar anak sejak usia dini. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan individu, tetapi juga berlanjut hingga usia produktif dalam bentuk penurunan kapasitas kerja, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas modal manusia (*human capital*), meningkatkan beban pembiayaan kesehatan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan bonus demografi secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan pangan dan gizi perlu dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi, termasuk bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh

perubahan iklim. Di sisi lain, distribusi pangan antarwilayah di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menghadapi tantangan besar, termasuk biaya transportasi yang tinggi mencapai 25% (dua puluh lima persen) hingga 45% (empat puluh lima persen) dari harga pangan, serta risiko keterlambatan akibat cuaca ekstrem. Dalam konteks ini, Pengembangan Gizi Seimbang-Pangan Lokal (PGS-PL) dan pemanfaatan pangan lokal padat gizi merupakan strategi dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini terhadap status gizi masyarakat. Diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal tidak hanya memperluas sumber makanan, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan berbagai bahan pangan khas daerah yang kaya akan zat gizi dan minim proses pengolahan, sehingga kandungan gizinya lebih terjaga. Dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal, masyarakat dapat memperoleh asupan gizi yang lebih beragam, yang berperan dalam pencegahan berbagai penyakit. Selain itu, penerapan program makanan tambahan berbasis pangan lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan status gizi anak balita, khususnya balita, karena lebih mudah diterima oleh masyarakat dan selaras dengan pola makan serta preferensi budaya setempat.

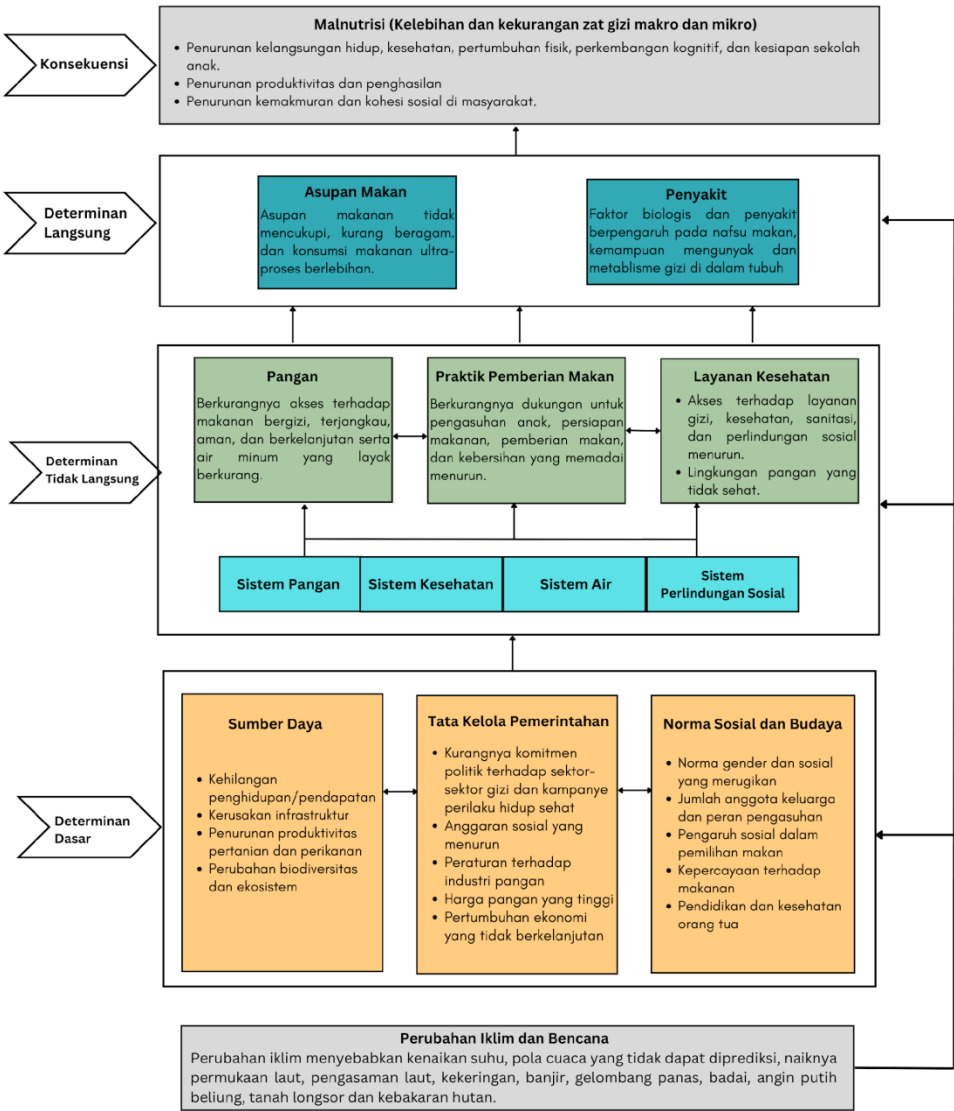
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangan dan gizi tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan mempertimbangkan aspek ketahanan iklim. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi, termasuk dalam menghadapi situasi darurat akibat perubahan iklim. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) disusun dengan memuat penajaman strategi dan aksi guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Selain itu RAN-PG juga mendukung tujuan RPJMN 2025-2029, yang menitikberatkan pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang mengacu pada Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. RAN-PG juga mengintegrasikan perspektif gender dan inklusivitas serta mempertimbangkan dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis iklim.

B. Determinan Masalah Pangan dan Gizi

Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi dan penguatan transformasi sistem pangan, Indonesia telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan memperbaiki status gizi masyarakat. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pangan dan gizi yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, Indonesia masih menghadapi *triple burden of malnutrition*, yang ditandai dengan prevalensi *stunting* pada balita sebesar 19,8% (sembilan belas koma delapan persen), *wasting* 6,2% (enam koma dua persen), *underweight* 16,8% (enam belas koma delapan persen), dan *overweight*/obesitas balita sebesar 3,4% (tiga koma empat persen). Selain itu, masalah gizi lebih pada penduduk dewasa juga masih menjadi tantangan, dengan prevalensi obesitas sebesar 14,4% (empat belas koma empat persen) berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Prevalensi anemia pada ibu hamil juga masih mencapai 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen), meskipun telah menurun dibandingkan 48,9% (empat puluh delapan koma sembilan persen) pada Riskesdas Tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan pangan dan gizi yang kompleks

sehingga memerlukan intervensi yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan dengan memperhatikan berbagai determinan langsung, tidak langsung, dan faktor dasar yang memengaruhi status gizi masyarakat.

Masalah gizi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan gizi, merupakan masalah kompleks yang berdampak serius terhadap kelangsungan hidup, kesehatan, pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, hingga kesiapan sekolah anak. Di tingkat masyarakat, masalah gizi berkontribusi pada rendahnya produktivitas, menurunnya pendapatan, dan terganggunya kemakmuran serta kohesi sosial. Untuk memahami akar permasalahan, tidak bisa hanya dilihat dari sisi konsumsi makanan semata. Masalah gizi merupakan kondisi yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan mulai dari asupan makan, kondisi kesehatan, hingga ketersediaan sumber daya dan tata kelola pemerintahan. Gambar 1 berikut menyajikan secara komprehensif bagaimana determinan langsung, tidak langsung, dan dasar termasuk dampak perubahan iklim yang berkontribusi terhadap status gizi, khususnya pada ibu dan anak.



Gambar 1. Kerangka Konsep Determinan Masalah Pangan dan Gizi
Sumber: Dimodifikasi dari United Nations Children’s Fund (UNICEF). *Child Nutrition and the Climate Crisis. UNICEF framework for action.* UNICEF, New York, March 2025.

1. Determinan Langsung

Determinan langsung, yaitu faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi status gizi individu. Ada dua komponen utama yaitu pola konsumsi, serta penyakit dan faktor biologis seperti infeksi, penyakit kronis, dan kondisi biologis lainnya yang dapat menurunkan nafsu makan dan mengganggu penyerapan serta pemanfaatan zat gizi di dalam tubuh. Kedua faktor ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, penyakit dapat menurunkan nafsu makan, sementara kekurangan asupan makan dan gizi menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. Perubahan iklim dapat memengaruhi keduanya secara signifikan. Peningkatan suhu dan bahaya hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan tanah longsor dapat berdampak pada produksi dan distribusi pangan, sehingga mengurangi ketersediaan makanan bergizi dan beragam. Akibatnya, individu terutama kelompok rentan mengonsumsi makanan dalam jumlah atau kualitas yang tidak mencukupi, atau justru mengonsumsi makanan ultra-proses secara berlebihan. Di sisi lain, penyakit yang dipicu oleh perubahan iklim atau penyakit sensitif iklim, seperti diare akibat banjir atau penurunan kualitas air bersih serta peningkatan penyakit menular karena suhu tinggi, akan memengaruhi nafsu makan serta kemampuan tubuh dalam menyerap dan memetabolisme zat gizi. Dengan demikian, perubahan iklim memperbesar risiko masalah gizi melalui gangguan terhadap dua jalur utama ini.

2. Determinan Tidak Langsung

Determinan tidak langsung mengacu pada faktor-faktor sistemik yang memengaruhi determinan langsung. Ada 3 (tiga) komponen utama dalam determinan tidak langsung yaitu ketersediaan sekaligus akses terhadap pangan, praktik pemberian makan dan layanan kesehatan. Perubahan iklim berdampak besar pada sistem pangan, terutama melalui penurunan produktivitas pertanian dan perikanan akibat kekeringan, banjir, dan perubahan suhu. Hal ini menyebabkan akses terhadap pangan bergizi dan layak menurun, baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Praktik pemberian makan anak dan balita juga terpengaruh oleh perubahan iklim, terutama ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi dan kehilangan penghidupan akibat bencana. Ibu atau pengasuh (*caregiver*) semakin menghadapi tantangan untuk memperoleh, menyiapkan, menyajikan, dan menjaga kebersihan makanan. Dukungan sosial dan informasi yang tepat pun sering kali tidak tersedia dalam situasi krisis atau bencana. Di sisi lain, layanan kesehatan dapat terganggu karena infrastruktur yang rusak atau beban fasilitas kesehatan yang meningkat akibat penyakit terkait perubahan iklim. Akses terhadap pelayanan gizi, sanitasi, imunisasi, dan perlindungan sosial menjadi terbatas, memperburuk kondisi gizi masyarakat yang terdampak.

Ketiga faktor ini sangat dipengaruhi oleh kinerja sistem-sistem utama yang menopang ketahanan pangan dan gizi, seperti sistem pangan, sistem kesehatan, sistem air, dan sistem jaminan sosial.

3. Determinan Dasar

Determinasi dasar mencakup fondasi struktural yang mendasari seluruh sistem, yakni sumber daya, tata kelola pemerintahan, dan norma sosial budaya. Perubahan iklim menyebabkan kehilangan penghidupan, penurunan keanekaragaman hayati,

serta kerusakan infrastruktur dan sumber daya alam yang menjadi penopang ketahanan pangan dan gizi.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, krisis iklim menuntut kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. Kurangnya komitmen lintas sektor dalam menghadapi dampak iklim terhadap gizi dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak memadai, serta lemahnya regulasi pangan dan sistem perlindungan sosial.

Norma sosial dan budaya juga berperan penting. Dalam kondisi darurat atau perubahan iklim ekstrem, norma sosial dan budaya masih membatasi perempuan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pangan dan kesehatan rumah tangga, yang selanjutnya dapat menghambat upaya perbaikan gizi. Demikian pula, masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian orang tua, mempersulit adopsi praktik pemberian makan dan perilaku hidup sehat yang sesuai dalam situasi berubah.

C. Keterkaitan Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim

RAN-PG Tahun 2026-2029 disusun sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan perubahan iklim yang memengaruhi pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Data suhu global menunjukkan adanya peningkatan suhu rata-rata, yang disertai dengan kejadian gelombang panas dan perubahan pola curah hujan di berbagai wilayah di dunia. Di Indonesia, data BMKG menunjukkan terjadinya kenaikan suhu udara rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan kejadian bencana terkait perubahan iklim seperti kekeringan, badai, banjir dan tanah longsor.

Perubahan iklim berdampak terhadap berbagai sektor yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, terutama sektor pertanian, perikanan, kesehatan dan sumber daya air. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat menurunkan produktivitas pertanian, mengganggu produksi pangan, serta menurunkan kualitas kandungan zat gizi dalam bahan pangan. Di wilayah pesisir, kenaikan muka air laut, abrasi dan gelombang tinggi juga dapat mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Dampak tersebut berpotensi menurunkan ketersediaan dan akses terhadap pangan bergizi serta meningkatkan risiko berbagai masalah gizi, terutama pada kelompok rentan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan gizi yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Upaya perbaikan gizi harus mampu tetap berjalan secara efektif meskipun menghadapi tekanan akibat perubahan iklim. Di sisi lain, aktivitas yang mendukung sistem pangan dan gizi termasuk produksi pangan, distribusi pangan, layanan kesehatan dan konsumsi pangan, juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Dalam RAN-PG Tahun 2026-2029, pangan, gizi, dan perubahan iklim merupakan isu yang saling memengaruhi dalam suatu konsep nexus yang kompleks. Ketahanan pangan dan gizi tidak hanya ditentukan oleh sistem pangan dan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kesehatan, sistem air, sistem perlindungan sosial dan sistem lingkungan. Kelima sistem tersebut selanjutnya disebut Sistem Utama yang saling berinteraksi dan bersama-sama menentukan status gizi masyarakat.

Melemahnya salah satu atau beberapa Sistem Utama akibat perubahan iklim dapat mengganggu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan

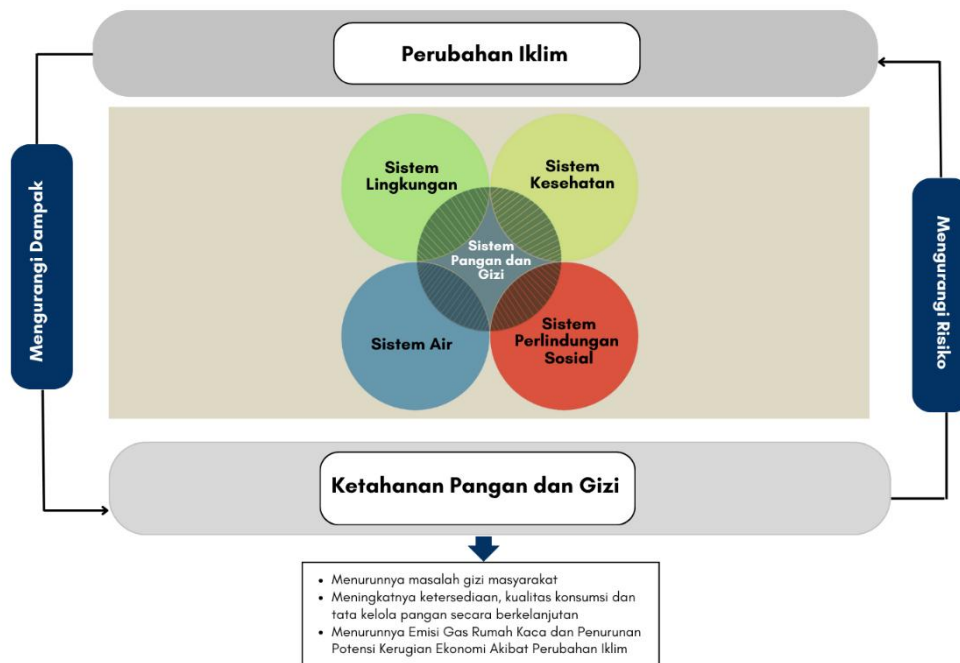
dan konsumsi pangan bergizi. Gangguan terhadap pelayanan kesehatan, akses air bersih, kualitas lingkungan, maupun perlindungan sosial pada akhirnya dapat memengaruhi status gizi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Sistem Utama menjadi kunci dalam membangun ketahanan pangan dan gizi yang responsif terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi dan aksi yang tidak hanya meningkatkan ketahanan Sistem Utama terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga mendorong transformasi sistem agar tidak memperburuk perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, RAN-PG Tahun 2026-2029 menitikberatkan fokus pada penguatan kelima Sistem Utama tersebut melalui dua pendekatan utama yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Adaptasi merupakan serangkaian pendekatan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas ketahanan masyarakat, ekosistem, serta sistem pembangunan dalam menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi. Dalam konteks pangan dan gizi, adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga keberlangsungan produksi dan distribusi pangan, menjamin ketersediaan air bersih, memperkuat layanan kesehatan, serta memastikan perlindungan sosial tetap berjalan efektif di tengah risiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Sementara itu, aksi mitigasi merupakan upaya sistematis untuk mengurangi emisi GRK yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Dalam konteks pangan dan gizi, salah satu contohnya mencakup transformasi sistem pangan menjadi lebih berkelanjutan serta meningkatkan pola konsumsi sehat, beragam, bergizi seimbang dan aman. Perubahan perilaku konsumen juga memiliki peran penting dalam mengurangi pemborosan makanan, memilih pangan lokal yang ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran akan dampak konsumsi terhadap perubahan iklim.

Keterkaitan antara perubahan iklim dengan lima Sistem Utama yaitu sistem pangan dan gizi, sistem kesehatan, sistem air, sistem perlindungan sosial dan sistem lingkungan digambarkan dalam Gambar 2. Keterkaitan (*nexus*) antara pangan, gizi dan perubahan iklim menjadi landasan konseptual dalam penyusunan RAN-PG Tahun 2026-2029 dan menjadi dasar perumusan tujuan, strategi serta aksi yang dijelaskan pada Bab III.



Gambar 2. Konsep Keterkaitan Pangan, Gizi, dan Iklim pada Lima Sistem Utama
Sumber: Dimodifikasi dari FAO et al. (2021) *The State of Food Security and Nutrition in the World* dan FAO (2023) *Climate Action and Nutrition – Pathways to Impact*.

D. Pembangunan Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam Kesepakatan Global

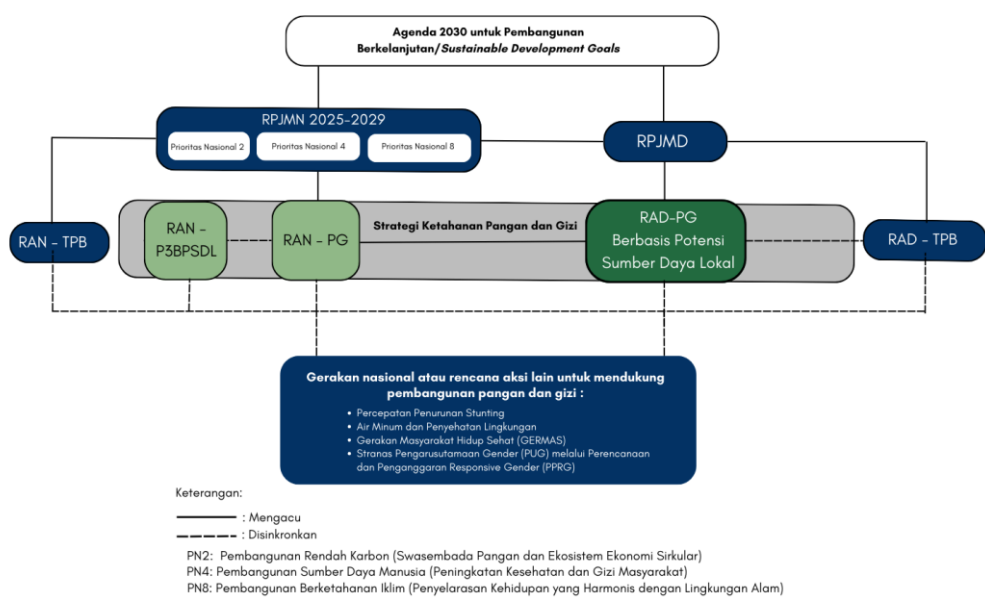
RAN-PG Tahun 2026-2029 disusun selaras dengan RPJMN 2025-2029 serta mengacu pada berbagai komitmen global yang terkait dengan pembangunan pangan, gizi dan perubahan iklim, antara lain: *World Health Assembly* (WHA), *Nationally Determined Contributions* (NDC), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), *Nutrition for Growth* (N4G), *Scaling Up Nutrition* (SUN) *Movement*, dan Agenda Transformasi Sistem Pangan.

RAN-PG mendukung komitmen Indonesia dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC) sesuai *Paris Agreement* melalui penguatan sistem pangan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang bertujuan mengurangi risiko terhadap ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional pada tahun 2030. Sejalan dengan hal tersebut, RAN-PG juga mengadopsi pendekatan *Initiative on Climate Action and Nutrition* (ICAN) yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk memperkuat integrasi antara kebijakan pangan, gizi, dan perubahan iklim dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

RAN-PG mendukung pencapaian SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik), dan SDG 13 (Aksi Iklim), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan meliputi akses pangan bergizi, penurunan *stunting*, anemia, obesitas, serta penguatan ketahanan pangan dan gizi yang responsif terhadap perubahan iklim. Selain itu, sebagai bagian dari komitmen global melalui forum *World Health Assembly* (WHA), *Nutrition for Growth* (N4G) dan *Scaling Up Nutrition* (SUN) *Movement*, Indonesia mendorong penguatan kebijakan sekaligus program pangan dan gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selaras dengan agenda Transformasi Sistem Pangan Global, RAN-PG mendorong pembangunan sistem pangan yang inklusif, tangguh, sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan Transformasi Sistem Pangan dalam kerangka *UN Decade of Action for SDGs 2030* yang menempatkan pangan, gizi, kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim sebagai bagian dari sistem yang saling terkait untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

- E. Kedudukan RAN-PG dalam Kebijakan Pembangunan Nasional
- Komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi yang responsif terhadap perubahan iklim telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan rencana aksi nasional yang memerlukan sinkronisasi efektif. Penyusunan RAN-PG merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pangan), yang menegaskan pentingnya perencanaan terpadu untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.
- Posisi RAN-PG terhadap kebijakan strategis, strategi nasional, maupun rencana aksi lainnya dapat dilihat pada Gambar 3. RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik untuk pembangunan pangan dan gizi serta berbagai gerakan nasional dan rencana aksi nasional yang mendukung pembangunan pangan dan gizi baik di level nasional maupun daerah. Sebagai bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi, RAN-PG berpedoman pada RPJMN 2025-2029 serta agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan, gizi, dan upaya resiliensi terhadap perubahan iklim seperti Pembangunan Berketahanan Iklim, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAN-P3BPSDL).



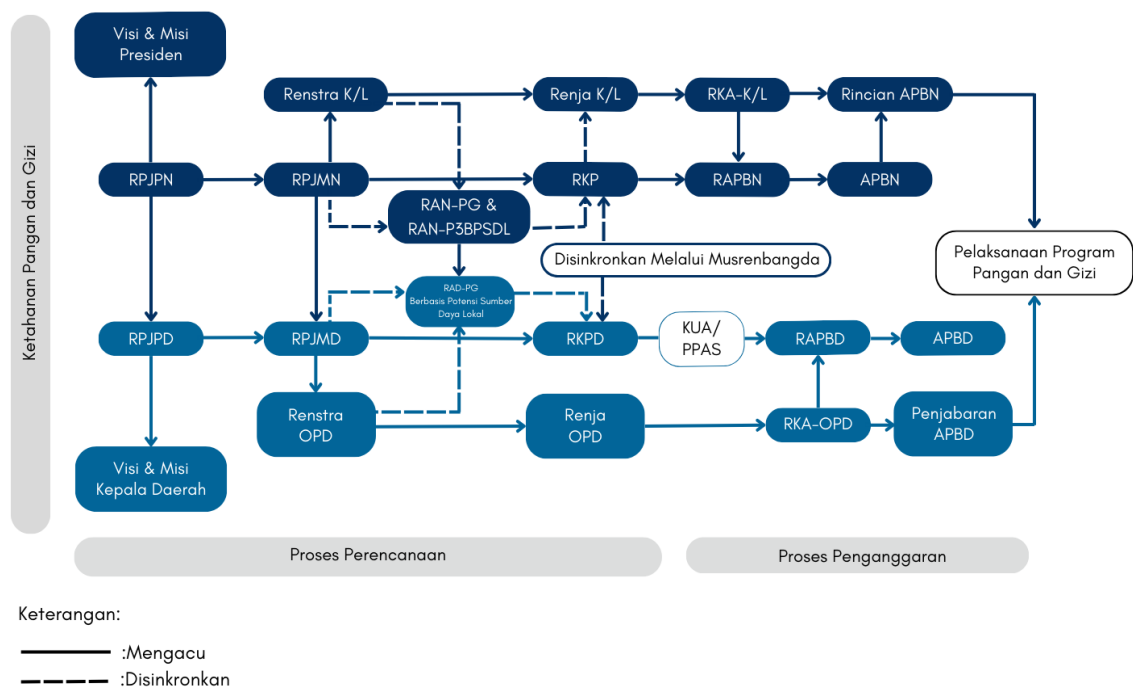
Gambar 3. Posisi RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2025-2029 dan TPB/SDGs 2030

Untuk mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029 dan TPB/SDGs, peran RAN-PG di Indonesia menjadi salah satu instrumen koordinasi lintas sektor dalam penajaman program dan kegiatan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. RAN-PG menjadi acuan dalam sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan pangan dan gizi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan demikian, dokumen RAN-PG dapat diacu untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada tingkat daerah, RAN-PG disinkronkan dengan RAN-P3BPSDL yang merupakan turunan dan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Sinkronisasi keduanya kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini merupakan hasil integrasi dua agenda nasional ke dalam satu pedoman terpadu yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta TPB/SDGs.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi dikembangkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai determinan dan tantangan multisektoral di semua tingkatan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin mengancam ketahanan pangan dan gizi masyarakat. RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang disusun oleh pemerintah daerah mengacu pada RAN-PG dan RAN-P3BPSDL dengan pendekatan yang sama, yakni melakukan penajaman terhadap program pangan dan gizi yang telah ada serta mengisi kesenjangan yang belum terfasilitasi dalam dokumen perencanaan yang ada. RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal juga berperan sebagai dokumen perencanaan dan kebijakan yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029, khususnya pada 3 (tiga) aspek utama: pembangunan rendah karbon (PN2), pembangunan berketahanan iklim (PN8), dan pembangunan sumber daya manusia (PN4).

Peran RAN-PG menjadi sangat penting sebagai alat koordinasi antara pemerintah dan berbagai sektor pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. Dalam konteks pencapaian tujuan RPJMN, penyusunan RAN-PG difokuskan untuk memperjelas program dan kegiatan yang mendukung pembangunan di bidang pangan dan gizi sebagaimana telah dirincikan dalam Renstra K/L. Oleh karena itu, dokumen RAN-PG dapat disinkronkan dengan Renja K/L serta RKP. Demikian pula di tingkat daerah, RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang disusun pemerintah daerah berfungsi untuk mempertegas program dan kegiatan pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara umum, integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah dijelaskan lebih rinci dalam Gambar 4.



Gambar 4. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan

- F. Arah Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional
- RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan visi “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, sebagai bagian dari RPJPN Tahun 2025-2045. Visi ini menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Pencapaiannya dilakukan melalui 8 Misi (Asta Cita), 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.
- Dalam upaya pencapaian Indonesia Emas 2045, di bidang pangan dan gizi terdapat 2 (dua) Program Prioritas Nasional (PN) yang berkaitan erat dengan pembangunan pangan dan gizi, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya, bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita, serta peningkatan produksi pangan melalui penguatan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kedua program tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan

pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Program MBG merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui penyediaan pangan bergizi bagi kelompok sasaran. Selain berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, implementasi MBG juga diharapkan dapat memperkuat permintaan terhadap pangan lokal, mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan, serta meningkatkan keterhubungan antara sistem pangan dan sistem gizi. Sejalan dengan hal tersebut, RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal berperan dalam mendukung penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya lokal guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seluruh arah kebijakan tersebut menjadi landasan penyusunan RAN-PG Tahun 2026–2029. RAN-PG berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas sektor untuk menerjemahkan arah pembangunan pangan dan gizi dalam RPJMN ke dalam strategi, program, dan aksi yang terintegrasi di tingkat nasional maupun daerah, dengan tetap memperhatikan aspek ketahanan pangan, kualitas gizi, pemanfaatan sumber daya lokal, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Prioritas Nasional (PN) di bidang pangan dalam RPJMN 2025-2029 terkait dengan peningkatan swasembada pangan menitikberatkan pada peningkatan eko regionalisasi sistem pangan berbasis sumber daya lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan emisi karbon. RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal berkontribusi dengan mendorong praktik pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan pangan akuatik, fortifikasi dan biofortifikasi pangan serta pengurangan *food loss* dan *food waste* (susut dan sisa pangan) guna mendukung sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam konteks penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan masyarakat, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu inisiatif strategis yang dapat mendukung implementasi RAN-PG. Melalui pendekatan kewirausahaan sosial dan pengelolaan pangan berbasis komunitas, KDMP berperan dalam memperkuat rantai nilai pangan lokal, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan terjangkau, serta mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro pangan. Oleh karena itu, sinergi antara KDMP dan RAN-PG diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan gizi nasional.

Prioritas Nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan memperbaiki gizi masyarakat berbasis siklus hidup, sebagai fondasi bagi pembangunan manusia yang lebih produktif dan berkualitas. RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal berperan dalam memastikan akses dan ketersediaan pangan bergizi seimbang, serta meningkatkan literasi gizi masyarakat untuk mencegah permasalahan gizi seperti *stunting*, obesitas, dan penyakit tidak menular.

Prioritas Nasional di bidang lingkungan berfokus pada penyelarasan kehidupan manusia dengan lingkungan alam guna memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam mendukung prioritas ini, RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal memperkuat kontribusi sektor pangan dan gizi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai aksi yang relevan, serta

peningkatan akses terhadap pangan bergizi di daerah rentan bencana, guna mewujudkan sistem pangan dan gizi yang berketahanan iklim. Dalam RPJMN 2025–2029 ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan. Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, penyusunan RAN-PG Tahun 2026–2029 memperhatikan dan mendukung 4 (empat) pengarusutamaan yang relevan dengan ruang lingkup pembangunan pangan dan gizi, yaitu:

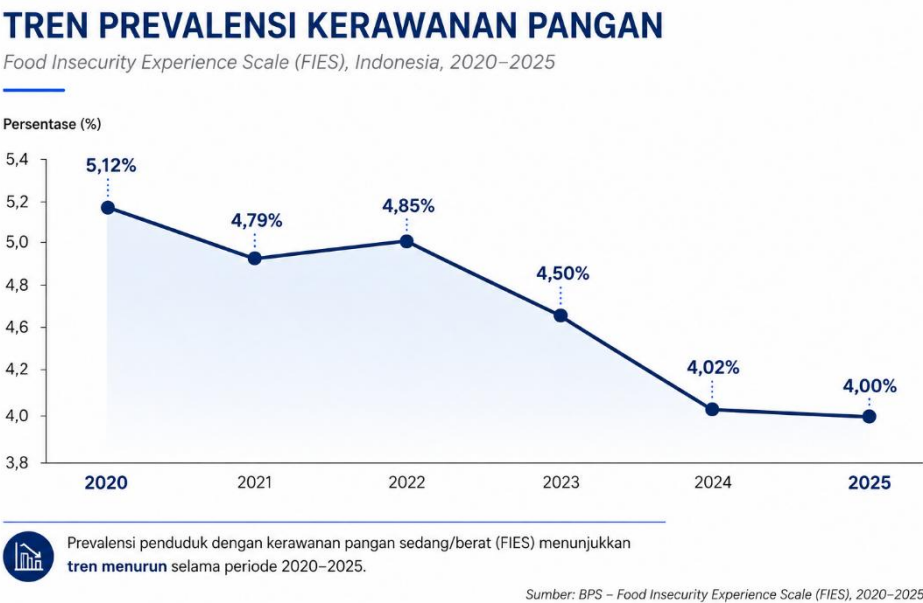
- a. *Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial* – memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan secara berkeadilan.
- b. *Pengarusutamaan TPB/SDGs* – mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui integrasi target TPB/SDGs.
- c. *Pembangunan Rendah Karbon* – memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor prioritas, sehingga dapat mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca menuju target *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih cepat.
- d. *Pembangunan Berketahanan Iklim* – memastikan adanya tindakan pengelolaan dampak dan risiko iklim yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekologi, serta mengurangi potensi kerugian ekonomi di lokasi prioritas terdampak perubahan iklim.

BAB II
ANALISIS SITUASI

A. Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia

1. *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*

Skala pengalaman kerawanan pangan atau *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* adalah instrumen pengukuran berbasis pengalaman untuk mengukur tingkat keparahan akses pangan pada tingkat individu atau rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup. Berdasarkan hasil pengukuran FIES, pada tahun 2025 sebanyak 11.377.550 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) penduduk atau 4% (empat persen) dari total penduduk Indonesia mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat (Gambar 5). Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,02% (empat koma nol dua persen) atau 11.434.440 (sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh) penduduk, serta tahun 2023 sebesar 4,50% (empat koma lima puluh persen) atau 12.799.750 (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) penduduk. Secara keseluruhan, indikator FIES menunjukkan tren penurunan kerawanan pangan selama periode tahun 2020–2025, yang mencerminkan semakin membaiknya akses masyarakat terhadap pangan. Walaupun menunjukkan penurunan, akan tetapi angka capaian tersebut masih di bawah target rencana pembangunan jangka menengah nasional. Oleh karena itu, penguatan sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan peningkatan akses pangan yang inklusif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut.

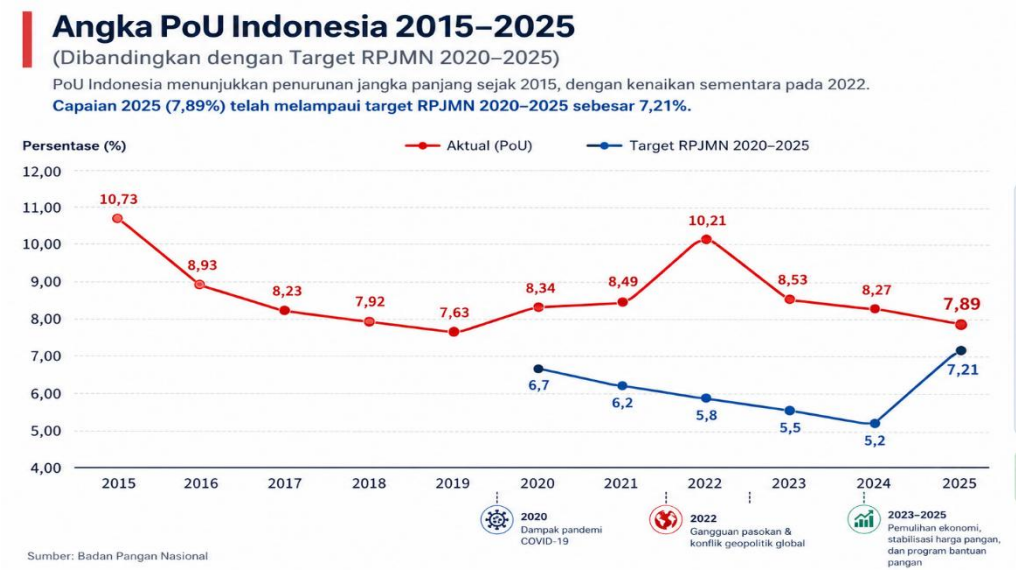


Gambar 5. Tren Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan (FIES)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 diolah oleh Bappenas

2. *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

PoU merupakan proporsi penduduk yang mengalami konsumsi energi pangan di bawah kebutuhan energi minimum (*Minimum Dietary Energy Requirement/MDER*) untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Selama periode tahun 2015-2025, tren PoU

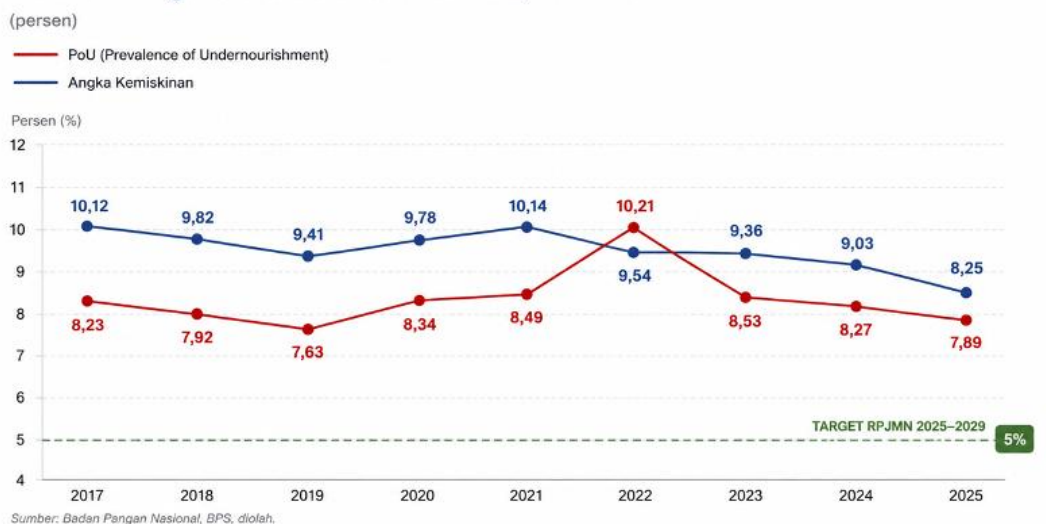
menunjukkan fluktuasi. Angka PoU menurun dari 10,73% (sepuluh koma tujuh puluh tiga persen) pada tahun 2015 menjadi 7,63% (tujuh koma enam puluh tiga persen) pada tahun 2019. Namun, pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan konflik geopolitik global sejak tahun 2020 menyebabkan gangguan pasokan dan lonjakan harga pangan strategis, sehingga angka PoU meningkat hingga mencapai 10,21% (sepuluh koma dua puluh satu persen) pada tahun 2022 (Gambar 6).



Gambar 6. Capaian Angka PoU Indonesia Tahun 2015-2025 dan Target Angka RPJMN 2020-2025
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 diolah oleh Bappenas

Pada tahun 2023, PoU menurun menjadi 8,53% (delapan koma lima puluh tiga persen) seiring dengan pemulihan ekonomi, stabilnya harga pangan, dan meningkatnya akses pangan. Tren positif ini berlanjut sampai dengan tahun 2025, dengan angka PoU turun menjadi 7,89% (tujuh koma delapan puluh sembilan persen), harga pangan strategis yang relatif stabil, serta peningkatan bantuan pangan kepada masyarakat miskin. Perbandingan tren PoU dan kemiskinan selama tahun 2017-2025 pada Gambar 7 menunjukkan pola yang serupa, kecuali pada tahun 2022, di mana angka PoU meningkat sementara angka kemiskinan menurun, yang mengindikasikan penurunan konsumsi energi rumah tangga akibat kelangkaan dan mahalnya komoditas pangan utama. Meskipun demikian, capaian PoU nasional tahun 2025 belum mencapai target RPJMN 2025-2029 sebesar 7,21% (tujuh koma dua puluh satu persen) pada Gambar 7.

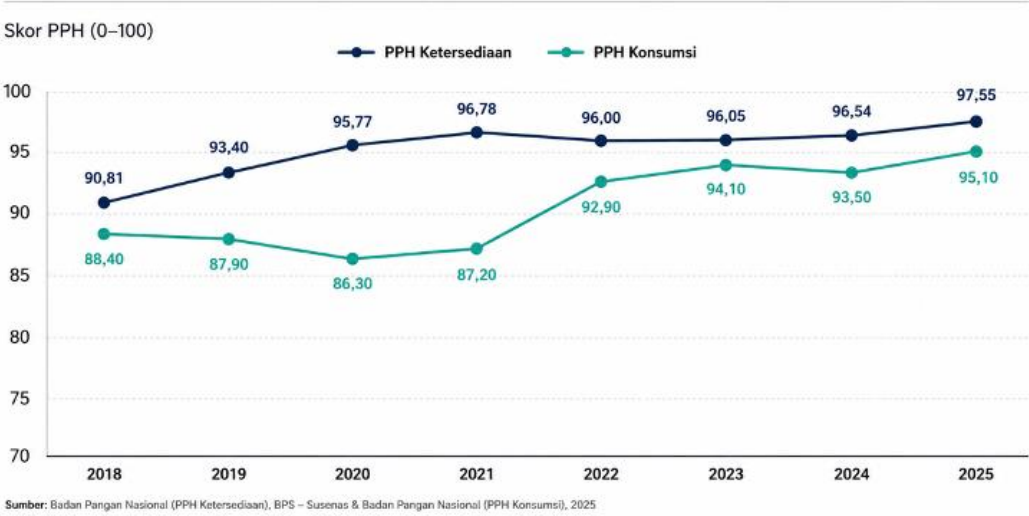
PoU dan Angka Kemiskinan Indonesia, 2017–2025



Gambar 7. Angka PoU dan Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2017-2025
Sumber: Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2017-2025 yang diolah oleh Bappenas

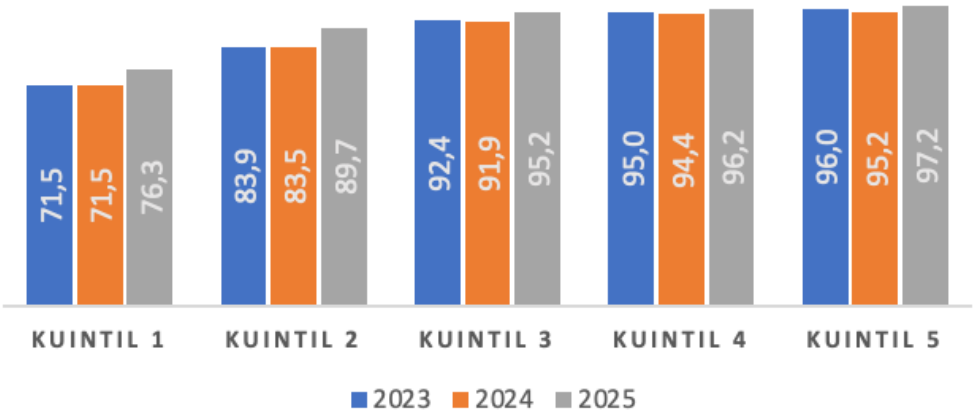
3. Pola Pangan Harapan (PPH)
- Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas dan keberagaman pangan dari sisi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk berdasarkan proporsi kontribusi energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH digunakan untuk menilai sejauh mana susunan konsumsi pangan penduduk telah memenuhi prinsip konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Nilai skor PPH berkisar antara 0–100, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin beragam dan seimbang pola konsumsi pangan masyarakat.
- Gambar 8 menunjukkan perkembangan tren skor PPH yang terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, skor PPH ketersediaan mencapai 97,55 (sembilan puluh tujuh koma lima puluh lima) dan skor PPH konsumsi mencapai 95,10 (sembilan puluh lima koma sepuluh), meningkat masing-masing sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen) dan 1,71% (satu koma tujuh puluh satu persen) dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, skor PPH ketersediaan masih lebih tinggi dibandingkan skor PPH konsumsi, yang menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan pangan belum sepenuhnya diikuti oleh pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang pada seluruh kelompok masyarakat.

Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi Nasional, 2018–2025



Gambar 8. Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dengan Skor PPH Konsumsi Tahun 2018-2024
Sumber: BPS, Badan Pangan Nasional, 2018-2025 yang diolah oleh Bappenas

Peningkatan skor PPH pada tahun 2025 antara lain didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, meningkatnya daya beli masyarakat yang tercermin dari menurunnya pangsa pengeluaran pangan rumah tangga, stabilitas harga beberapa komoditas pangan strategis, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin ekstrem. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi rumah tangga untuk mengakses pangan yang lebih beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH ketersediaan menggambarkan keragaman komposisi pangan yang tersedia secara nasional. Pada periode yang sama, skor PPH ketersediaan relatif stabil pada kisaran 96–98 dan tetap lebih tinggi dibandingkan skor PPH konsumsi. Pada tahun 2025, skor PPH ketersediaan mencapai 97,55 (sembilan puluh tujuh koma lima puluh lima), sedangkan skor PPH konsumsi sebesar 95,1 (sembilan puluh lima koma satu). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keragaman pangan yang tersedia secara nasional belum sepenuhnya tercermin dalam pola konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, selisih antara kedua indikator tersebut semakin menyempit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya peningkatan pemanfaatan pangan yang tersedia menuju pola konsumsi beragam dan bergizi seimbang.



Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh BPS, dalam lima kelompok sama besar.

Kuintil 1: 20% Penduduk Termiskin

Kuintil 2: 20% Penduduk Miskin dan Rentan

Kuintil 3: 20% Penduduk dengan pengeluaran Moderat

Kuintil 4: 20% Penduduk dengan pengeluaran Menengah ke Atas

Kuintil 5: 20% Penduduk Terkaya

Sumber : sepakat.bappenas.go.id

Gambar 9. Skor PPH Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Tahun 2023-2025

Sumber data: Susenas 2024-2025, BPS diolah Badan Pangan Nasional

Kondisi lebih rinci berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masih menghadapi ketimpangan yang cukup besar. Sebagaimana terlihat pada Gambar 9, skor PPH meningkat seiring dengan meningkatnya kuintil pengeluaran. Pada tahun 2025, rumah tangga pada kuintil tertinggi telah memiliki skor PPH mendekati ideal, sedangkan rumah tangga pada kuintil terendah masih memiliki skor yang relatif rendah. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2024 terjadi peningkatan skor PPH pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Peningkatan paling nyata terjadi pada kuintil 1 dan kuintil 2, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini dapat menjadi landasan bahwa upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan perlu difokuskan pada penguatan akses dan keterjangkauan pangan bergizi serta percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

B. Situasi Ketersediaan Pangan

1. Prognosa neraca pangan strategis

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025 per 21 Februari 2025, kondisi ketersediaan pangan Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas. Secara umum, berdasarkan tabel ketersediaan pangan nasional diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, namun terdapat sejumlah komoditas strategis yang berisiko defisit dan membutuhkan intervensi kebijakan lebih lanjut. Komoditas beras, sebagai pangan pokok utama, diproyeksikan dalam kondisi aman tanpa ketergantungan pada impor Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Surplus juga terlihat pada komoditas jagung, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng, yang mengindikasikan keberhasilan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan nasional. Namun demikian, beberapa komoditas menunjukkan potensi kekurangan pasokan, di antaranya kedelai, gula konsumsi, daging sapi/kerbau, bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan cabai rawit. Rendahnya stok akhir pada komoditas tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap impor, khususnya pada komoditas kedelai, bawang putih, daging kerbau/sapi serta gula konsumsi yang dapat memicu kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan disrupti rantai pasok internasional. Selain itu, catatan penting lainnya adalah tingginya angka penyusutan (susut/tercecer), seperti pada cabai rawit (75% (tujuh puluh lima persen)) dan bawang merah (17% (tujuh belas persen)) menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi rantai pasok dan sistem distribusi pascapanen.

2. Pengelolaan Cadangan Pangan

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus mendukung penanganan kerawanan pangan, keadaan darurat, dan bencana. Selain berfungsi sebagai penyangga ketersediaan pangan, CPP juga berperan dalam menyerap hasil produksi domestik pada saat panen raya, menjaga keberlanjutan produksi di tingkat hulu, serta mendukung pelaksanaan program bantuan pangan kepada masyarakat. Dalam konteks meningkatnya risiko perubahan iklim, penguatan cadangan pangan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi gangguan produksi, distribusi, maupun gejolak pasar pangan.

Sepanjang tahun 2025, pengelolaan cadangan pangan difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan. Hingga 31 Desember 2025, realisasi penyaluran CPP melalui program SPHP mencapai 795,56 ribu ton atau 53,04% dari target nasional sebesar 1,5 juta ton. Capaian penyaluran menunjukkan variasi antarwilayah, dengan beberapa wilayah telah melampaui target, sementara wilayah lain masih memerlukan percepatan distribusi.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan minyak goreng kepada masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Data hingga 31 Desember 2025, realisasi penyaluran telah mencapai 94,46%, dengan total penyaluran 345,29 juta kilogram beras dan 69,06 juta liter minyak goreng kepada 18,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Oktober–November 2025. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa provinsi, terutama di wilayah timur Indonesia, yang menunjukkan realisasi penyaluran relatif rendah sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan distribusi.

Di tingkat daerah, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menjadi semakin penting sebagai bagian dari peningkatan ketahanan pangan daerah. Salah satu indikator tentang aspek ketersediaan pangan adalah rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang mencerminkan tingkat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kerawanan pangan transien akibat perubahan iklim, bencana, maupun guncangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan CPPD, penguatan lumbung pangan masyarakat, serta peningkatan kapasitas cadangan pangan berbasis potensi pangan lokal perlu terus didorong, terutama di wilayah kepulauan, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan), dan wilayah yang bukan merupakan sentra produksi pangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan cadangan pangan nasional menunjukkan peran yang semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem pangan. Namun demikian, penguatan cadangan pangan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume cadangan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, diversifikasi komoditas cadangan berbasis sumber daya pangan lokal, serta peningkatan efektivitas distribusi agar mampu merespons gangguan pasokan secara cepat, tepat sasaran, dan adaptif terhadap risiko perubahan iklim.

3. Penguatan sarana dan prasarana untuk ketersediaan dan stabilitas pangan

Penguatan sarana dan prasarana pangan merupakan salah satu prasyarat dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Meskipun produksi dan neraca pangan nasional tahun 2025 secara umum menunjukkan kondisi surplus, efektivitas sistem pangan tetap sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan logistik pangan. Keterbatasan infrastruktur logistik, khususnya pada komoditas yang mudah rusak (*perishable food*), masih berpotensi menimbulkan kehilangan hasil (*food loss*), ketimpangan pasokan antarwilayah, serta fluktuasi harga pangan.

Pada tahun 2025, penguatan sistem logistik pangan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana penyimpanan, tetapi juga melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mempermudah mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Capaian hingga 31 Desember 2025, sebanyak 1.064.769 kg komoditas pangan telah dimobilisasi melalui skema FDP, dengan komoditas terbesar berupa beras sebanyak 847.835 kg, diikuti kedelai (120.800 kg), gula (47.440 kg), dan minyak goreng (47.386 kg). Skema ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi pangan, memperkuat stabilisasi pasokan dan harga, serta mengurangi kesenjangan ketersediaan pangan antarwilayah.

Selain penguatan distribusi, pemerintah juga terus meningkatkan dukungan terhadap sistem keamanan pangan melalui penerbitan sertifikasi keamanan pangan bagi pelaku usaha. Sepanjang Januari–Desember 2025 telah diterbitkan 5.771 sertifikat Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK), 1.758 sertifikat PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL), 835 sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), serta berbagai sertifikasi lainnya sebagai bagian dari upaya menjamin mutu dan keamanan pangan dalam rantai pasok nasional. Penguatan aspek keamanan pangan ini menjadi salah satu pendukung penting dalam menjaga kualitas pangan yang tersedia bagi masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan penguatan sarana dan prasarana pangan masih cukup besar. Infrastruktur penyimpanan, rantai dingin (*cold chain*), pergudangan, dan distribusi pangan belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah kepulauan, wilayah 3TP, serta sentra produksi yang jauh dari pusat konsumsi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kehilangan hasil pascapanen, memperlebar disparitas harga antarwilayah, dan mengurangi efisiensi distribusi pangan. Penguatan sarana dan prasarana pangan perlu diarahkan pada pembangunan sistem logistik pangan yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas penyimpanan dan rantai dingin, pemanfaatan teknologi dalam distribusi pangan, serta penguatan konektivitas antar wilayah. Upaya tersebut menjadi semakin penting untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan nasional yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim, gangguan rantai pasok, maupun dinamika pasar pangan.

C. Situasi Keterjangkauan Pangan

Pola makan yang lebih sehat menjadi tujuan ideal dalam pemenuhan gizi masyarakat, namun data menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia belum mampu menjangkaunya. Berdasarkan analisis *Cost of the Diet* dari *World Food Programme* (2021), biaya rata-

rata konsumsi makanan sehat yang sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang di Indonesia diperkirakan sebesar Rp14.000-16.000 per kapita per hari. Angka ini 66% lebih tinggi dibandingkan pola makan yang hanya mencukupi zat gizi. Proporsi penduduk yang tidak mampu membeli pola makan yang sehat mencapai 48-57%, kemudian 12% untuk pola makan cukup zat gizi dan <1% untuk pola makan cukup energi. Data ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam akses ekonomi terhadap pangan bergizi dan beragam, terutama bagi kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Oleh karena itu, peningkatan keterjangkauan pola makan sehat perlu menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pangan dan gizi nasional ke depan.



Gambar 10. Tingkat Keterjangkauan Tiga Jenis Diet di Indonesia
Sumber data: *World Food Programme*, 2021

D. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

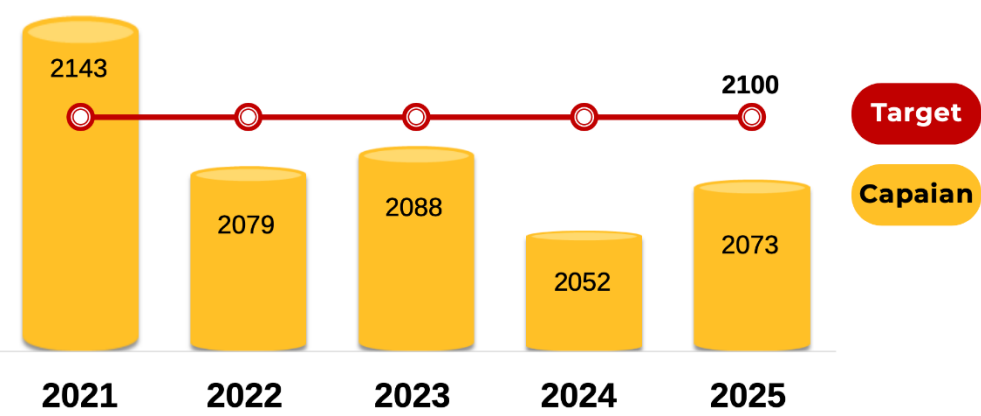
1. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein

Konsumsi pangan masyarakat Indonesia selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan perbaikan, baik dari sisi pemenuhan energi maupun protein. Pada tahun 2025, rata-rata konsumsi energi mencapai 2.073 (dua ribu tujuh puluh tiga) kkal/kapita/hari, meningkat sebesar 21 (dua puluh satu) kkal dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2.052 kkal/kapita/hari. Meskipun masih berada sedikit di bawah standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kkal/kapita/hari, tingkat konsumsi energi nasional telah mencapai 98,7% (sembilan puluh delapan koma tujuh persen) AKE, sehingga masih termasuk dalam kategori tingkat kecukupan energi normal. Selama periode tahun 2021–2025, konsumsi energi mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 2.143 (dua ribu seratus empat puluh tiga) kkal/kapita/hari, kemudian menurun hingga tahun 2024 dan kembali meningkat pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan mulai membaiknya konsumsi energi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mencapai target nasional.

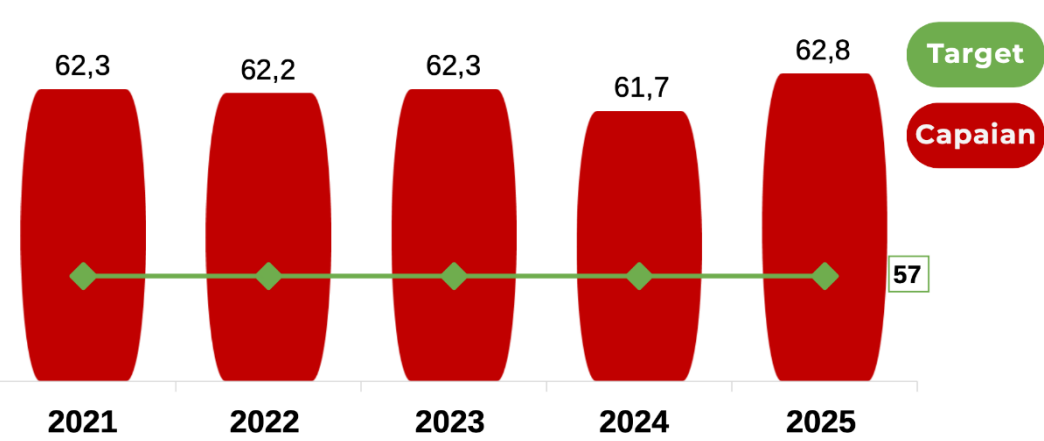
Sementara itu, konsumsi protein menunjukkan tren yang relatif lebih baik. Pada tahun 2025, rata-rata konsumsi protein masyarakat mencapai 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram/kapita/hari, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 61,7 (enam puluh satu koma tujuh) gram/kapita/hari dan tetap berada di atas standar Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram/kapita/hari. Selama lima tahun terakhir, konsumsi protein nasional secara konsisten telah melampaui anjuran AKP. Namun demikian, sumber protein yang dikonsumsi

masyarakat masih didominasi oleh protein nabati sebesar 62,4%, (enam puluh dua koma empat persen) sedangkan protein hewani baru mencapai 37,6% (tiga puluh tujuh koma enam persen). Meskipun proporsi protein hewani mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, pola konsumsi protein masyarakat masih belum ideal karena kontribusi protein nabati masih jauh lebih besar dibandingkan protein hewani. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas konsumsi protein, khususnya dari sumber protein hewani yang memiliki nilai biologis lebih tinggi, masih menjadi tantangan dalam pembangunan pangan dan gizi.

Konsumsi Energi



Konsumsi Protein

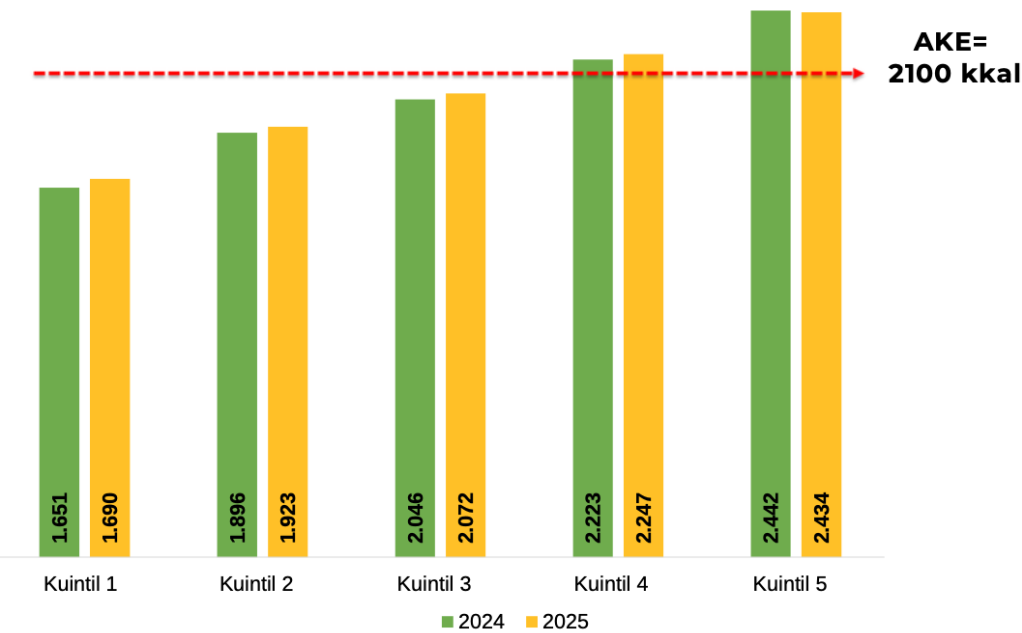


Gambar 11. Target dan Capaian Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2021-2025
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Kesenjangan konsumsi energi masih terlihat antar kelompok pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2025, konsumsi energi meningkat pada seluruh kelompok kuintil dibandingkan tahun 2024, namun terdapat perbedaan yang cukup lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Konsumsi energi berkisar antara 1.690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) kkal/kapita/hari pada kuintil 1 hingga 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) kkal/kapita/hari pada kuintil 5, dengan kesenjangan mencapai 744 (tujuh ratus empat puluh empat) kkal/kapita/hari. Pemenuhan standar AKE 2.100 (dua ribu

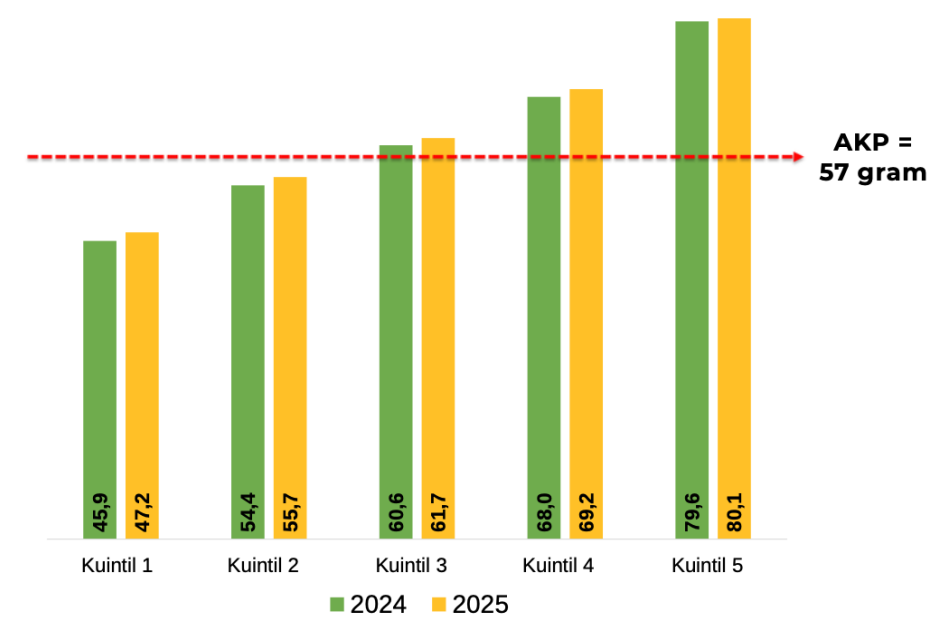
seratus) kkal/kapita/hari baru tercapai pada kelompok kuintil 4 dan kuintil 5, sedangkan kelompok kuintil 1 hingga kuintil 3 masih berada di bawah standar. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rendah masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan energi hariannya sehingga peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan daya beli masyarakat masih menjadi prioritas kebijakan.

Pola serupa juga terlihat pada konsumsi protein. Konsumsi protein meningkat pada seluruh kelompok pengeluaran pada tahun 2025. Konsumsi protein berkisar antara 47,2 (empat puluh tujuh koma dua) gram/kapita/hari pada kuintil 1 hingga 80,1 (delapan puluh koma nol satu) gram/kapita/hari pada kuintil 5, dengan kesenjangan sebesar 32,9 (tiga puluh dua koma Sembilan) gram/kapita/hari. Kelompok kuintil 3 hingga kuintil 5 telah memenuhi standar AKP sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram/kapita/hari, sedangkan kelompok kuintil 1 dan kuintil 2 masih berada di bawah standar dengan pola konsumsi yang masih didominasi oleh protein nabati, terutama berasal dari padi-padian. Meningkatnya konsumsi protein pada seluruh kelompok pengeluaran menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, namun disparitas konsumsi protein antar kelompok pendapatan masih cukup besar sehingga diperlukan intervensi untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap pangan sumber protein berkualitas.



Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh BPS, dalam lima kelompok sama besar.
Kuintil 1: 20% Penduduk Termiskin
Kuintil 2: 20% Penduduk Miskin dan Rentan
Kuintil 3: 20% Penduduk dengan pengeluaran Moderat
Kuintil 4: 20% Penduduk dengan pengeluaran Menengah ke Atas
Kuintil 5: 20% Penduduk Terkaya
Sumber : sepakat.bappenas.go.id

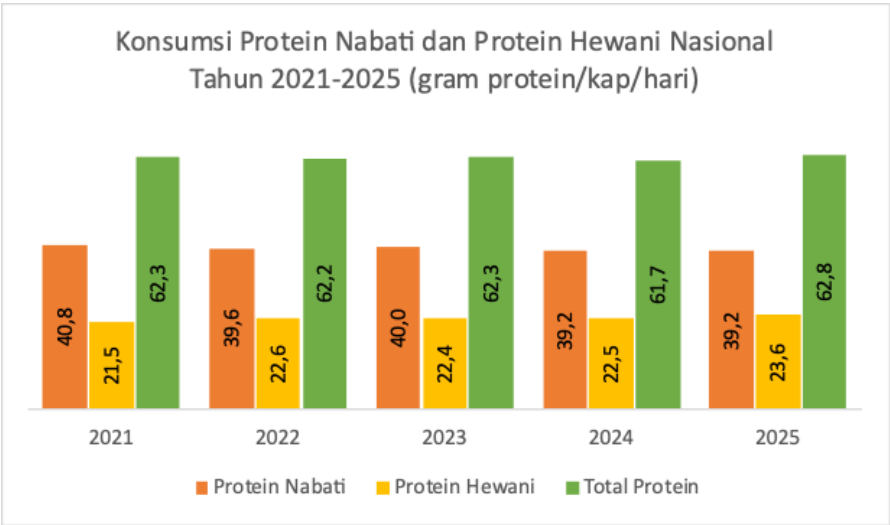
Gambar 12. Konsumsi Energi Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Tahun 2024-2025
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025



Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh BPS, dalam lima kelompok sama besar.
Kuintil 1: 20% Penduduk Termiskin
Kuintil 2: 20% Penduduk Miskin dan Rentan
Kuintil 3: 20% Penduduk dengan pengeluaran Moderat
Kuintil 4: 20% Penduduk dengan pengeluaran Menengah ke Atas
Kuintil 5: 20% Penduduk Terkaya
Sumber : sepakat.bappenas.go.id

Gambar 13. Konsumsi Protein Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Tahun 2024-2025
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Pada tahun 2025, total konsumsi protein nasional mencapai 62,78 (enam puluh dua koma tujuh puluh delapan) gram protein/kapita/hari, dengan kontribusi protein hewani sebesar 23,59 (dua puluh tiga koma lima sembilan) gram/kapita/hari gram protein/kapita/hari dan protein nabati sebesar 39,19 (tiga puluh sembilan koma sembilan belas) gram protein/kapita/hari. Capaian protein hewani ini merupakan yang tertinggi dalam periode 2021–2025, yang didorong terutama oleh peningkatan konsumsi daging unggas dan ikan. Perkembangan kontribusi pangan nabati dan pangan hewani dapat dilihat pada Gambar 14.



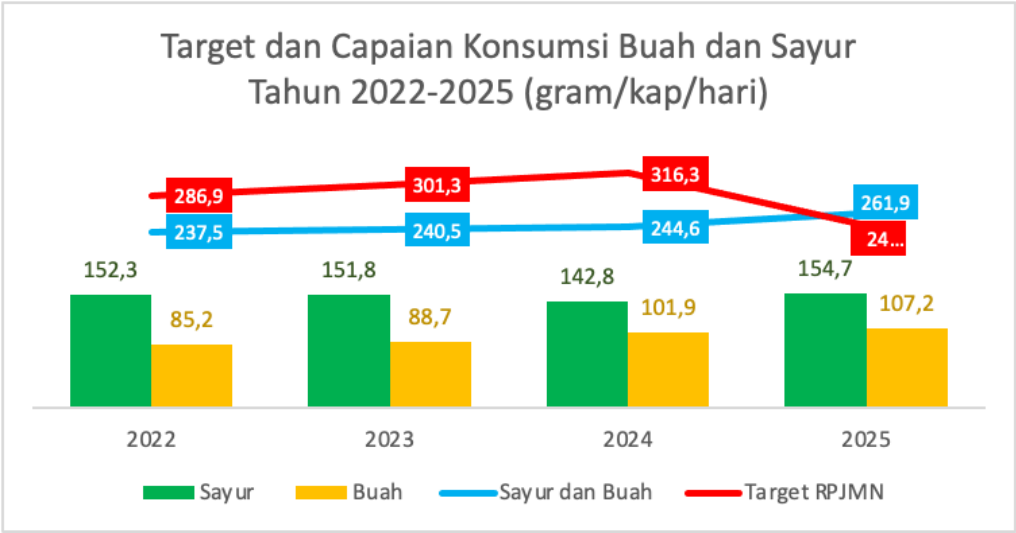
Gambar 14. Tren Kontribusi Pangan Nabati dan Hewani terhadap AKP Tahun 2021-2025
Sumber: Badan Pangan Nasional 2021-2025

Tingkat konsumsi protein di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antar kelompok pengeluaran, dengan konsumsi yang cenderung meningkat seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, rata-rata konsumsi protein nasional mencapai 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram/kapita/hari, terdiri atas 39,19 (tiga puluh sembilan koma sembilan belas) gram/kapita/hari protein nabati dan 23,59 (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram/kapita/hari protein hewani. Meskipun secara rata-rata konsumsi protein telah melampaui Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram/kapita/hari, komposisi konsumsi masih didominasi oleh protein nabati, sedangkan kontribusi protein hewani masih relatif rendah. Komposisi konsumsi protein nasional masih didominasi oleh sumber pangan nabati, khususnya padi-padian (beras menyumbang 20,17 (dua puluh koma tujuh belas) gram protein/kapita/hari dan kacang-kacangan seperti kedelai 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram protein/kapita/hari). Ikan menjadi penyumbang protein hewani terbesar secara nasional. Konsumsi daging unggas menunjukkan kesenjangan besar antar kelompok pendapatan, dengan berat konsumsi pada kuintil 1 sebesar 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) gram/kapita/hari dibandingkan kuintil 5 sebesar 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) gram/kapita/hari. Sumber protein dari sektor peternakan nasional masih didominasi oleh ayam ras, sementara kontribusi daging sapi masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi protein masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan konsumsi pangan sumber protein hewani yang beragam, aman, dan terjangkau.

2. Konsumsi Sayur dan Buah

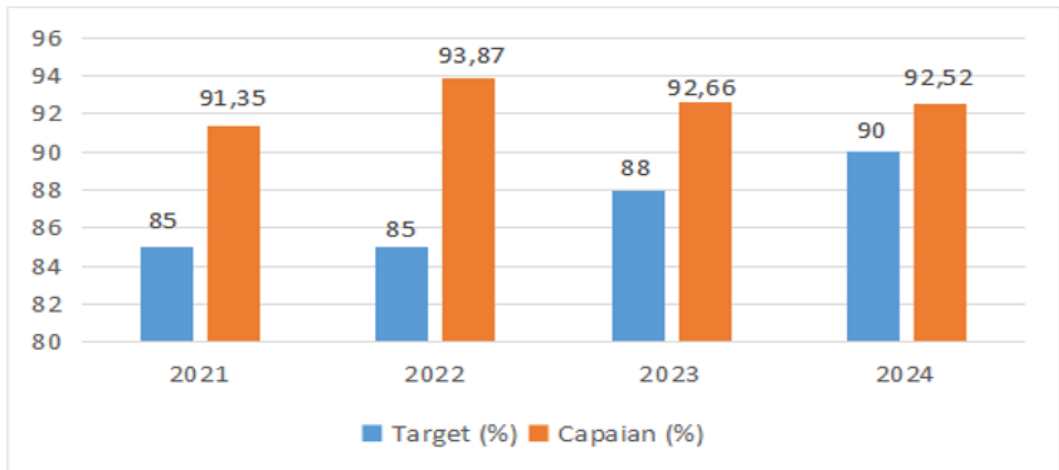
Konsumsi sayur dan buah nasional menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2021–2025, dari 226,2 (dua ratus dua puluh enam koma dua) gram/kapita/hari pada 2021 menjadi 261,9 (dua ratus enam puluh satu koma sembilan) gram/kapita/hari pada tahun 2025. Konsumsi sayur pada tahun 2025 mencapai 154,7 (seratus lima puluh empat koma tujuh) gram/kapita/hari dan konsumsi buah sebesar 107,2 (seratus tujuh koma dua) gram/kapita/hari, sehingga total konsumsi sayur dan buah pada tahun 2025 sebesar 261,9 (dua ratus enam puluh satu koma sembilan) gram/kapita/hari, meningkat dari 244,6 (dua ratus empat puluh empat koma enam) gram/kapita/hari pada tahun 2024 (sayur 142,8 (seratus empat puluh dua koma delapan) dan buah 101,9 (seratus satu koma sembilan) gram/kapita/hari). Capaian tahun 2025 ini berhasil melampaui target RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 245,33 (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh tiga) gram/kapita/hari. Peningkatan didorong terutama oleh kenaikan konsumsi sayur sebesar 11,9 (sebelas koma sembilan) gram/kapita/hari (8,3% (delapan koma tiga persen)) dan konsumsi buah sebesar 5,3 (lima koma tiga persen) gram/kapita/hari (5,2% (lima koma dua persen)) dibandingkan tahun 2024. Terdapat pula kesenjangan konsumsi sayur dan buah yang besar antarkelompok pendapatan: konsumsi sayur berkisar dari 119,79 (seratus sembilan belas koma tujuh puluh Sembilan) gram/kapita/hari pada kuintil 1 hingga 189,69 (seratus delapan

puluh sembilan koma enam puluh sembilan) gram/kapita/hari pada kuintil 5, sedangkan konsumsi buah dari 63,81 (enam puluh tiga koma delapan puluh satu) gram/kapita/hari pada kuintil 1 hingga 165,72 (seratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua) gram/kapita/hari pada kuintil 5. Meskipun capaian nasional telah melampaui target RPJMN 2025–2029, angka ini masih jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 400 (empat ratus) gram/kapita/hari (WHO, 2020), sehingga upaya peningkatan konsumsi sayur dan buah, terutama pada kelompok pendapatan rendah, perlu terus diperkuat.



Gambar 15. Target dan Capaian Konsumsi Sayur dan Buah Tahun 2025–2029
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 yang diolah oleh Bappenas

3. Penjaminan Keamanan Pangan Segar
- Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* meliputi sertifikasi keamanan pangan, registrasi rumah pengemasan, penerbitan izin edar, serta sertifikasi ekspor. Sementara itu, pengawasan *post-market* dilakukan melalui pengawasan peredaran produk, pemeriksaan label dan kemasan, pengambilan sampel, serta pengujian keamanan pangan melalui *rapid test* maupun uji laboratorium untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- Selama kurun waktu tahun 2021 - 2024 terjadi peningkatan jumlah penerbitan izin edar, sertifikasi keamanan pangan ekspor, dan registrasi rumah kemas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha pangan segar terkait pentingnya jaminan keamanan pangan segar makin membaik. Jumlah penerbitan sertifikat penanganan pangan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB-PSAT), izin edar, sertifikasi keamanan pangan ekspor, dan registrasi rumah kemas pada tahun 2024 sebanyak 9.466 (sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) produk meningkat dibanding tahun 2023 sebanyak 6.829 (enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan) produk.



Gambar 16. Target dan Capaian Persentase PSAT yang Memenuhi Syarat tahun 2021-2024

Sumber: Bapanas 2021-2024

Pada tahun 2024, telah diuji 25.921 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu) contoh PSAT, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Realisasi persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat tahun 2024 mencapai 92,52% (sembilan puluh dua koma lima puluh dua persen) dari target 90%, (sembilan puluh persen) sedikit menurun dari tahun 2023 yaitu mencapai 92,66% (sembilan puluh dua koma enam enam persen) dari target 88% (delapan puluh delapan persen) dan tahun 2022 mencapai 93,87% (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh persen) dari target 85% (delapan puluh lima persen). Penurunan dipengaruhi oleh cakupan pengawasan yang diperluas, peningkatan sampel rentan cemaran mikroba, dan masih lemahnya penerapan sanitasi dan higiene. Langkah-langkah strategis telah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, seperti: perluasan wilayah pengambilan sampel (termasuk wilayah rawan cemaran), peningkatan jumlah pengujian oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat dan Daerah, penggunaan mobil keliling keamanan pangan, penguatan sistem informasi Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) yang terbuka bagi publik, serta pengembangan Program Pangan Segar Aman sampai dengan tahun 2024 di 64 (enam puluh empat) lokasi pasar rakyat. Selain itu, untuk mendukung kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, Badan Pangan Nasional selama tahun 2023-2024 memfasilitasi mobil laboratorium keliling keamanan pangan segar sebanyak 16 (enam belas) unit.

Penguatan sistem pengawasan juga didukung melalui pengembangan Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) sebagai platform pelayanan dan informasi publik, peningkatan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di pusat dan daerah, pemanfaatan laboratorium serta mobil keliling keamanan pangan, dan perluasan pembinaan keamanan pangan di pasar rakyat. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperkuat ketertelusuran produk pangan segar, serta melindungi masyarakat dari risiko cemaran biologis, kimia, maupun fisik.

Keamanan pangan juga menjadi salah satu indikator penting dalam aspek pemanfaatan pangan pada penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) 2025. Persentase pangan segar dan

pangan siap saji yang memenuhi standar keamanan pangan digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan efektivitas sistem pengawasan keamanan pangan sekaligus mendukung peningkatan kualitas konsumsi dan kesehatan masyarakat.

E. Situasi Kerawanan Pangan

1. *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* disusun dalam bentuk peta tematik sebagai suatu inovasi dan transformasi penyajian data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan rawan pangan menurut wilayah di Indonesia. Pemutakhiran metodologi telah dilakukan pada tahun 2025 dengan tujuan meningkatkan fungsi dan peran FSVA sebagai tolak ukur yang lebih menggambarkan secara aktual pencapaian ketahanan pangan nasional dan daerah yang lebih komprehensif. Penyesuaian indikator diperlukan untuk menjawab kebutuhan pemanfaatan FSVA dalam hal penguatan cadangan pangan, pemantauan stabilitas harga pangan, peningkatan kualitas ketersediaan dan konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta keamanan pangan yang semakin menjadi prioritas pembangunan.

Pada FSVA 2024 *backcasting* dan 2025, analisis kabupaten dan kota tidak lagi dilakukan secara terpisah dengan indikator yang berbeda karena indikator baru dinilai dapat mengakomodasi dan merekonsiliasi perbedaan karakteristik wilayah kabupaten sebagai produsen pangan dan kota yang ketersediaan pangannya didukung dengan cadangan pangan. Seluruh indikator yang digunakan dalam analisis dibobot berdasarkan *expert judgement* untuk menghasilkan angka komposit. Analisis komposit menghasilkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang selanjutnya dibagi menjadi enam prioritas ketahanan pangan wilayah, yaitu: prioritas 1 (sangat rentan), prioritas 2 (rentan), prioritas 3 (agak rentan), prioritas 4 (agak tahan), prioritas 5 (tahan), dan prioritas 6 (sangat tahan).

Berdasarkan metodologi perhitungan baru, secara umum situasi ketahanan pangan berdasarkan FSVA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan pada FSVA 2024. Situasi ketahanan pangan tahun 2024 menunjukkan jumlah wilayah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) kabupaten/kota (82,10% (delapan puluh dua koma satu nol persen)), sedangkan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kabupaten/kota (17,90% (tujuh belas koma sembilan nol persen)). Sementara itu, situasi ketahanan pangan tahun 2025 menunjukkan jumlah wilayah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) kabupaten/kota (84,24% (delapan puluh empat koma dua empat persen)), sedangkan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 81 (delapan puluh satu) kabupaten/kota (15,76% (lima belas koma tujuh enam persen)), dengan rincian 20 (dua puluh) kabupaten prioritas 1, 19 (sembilan belas) kabupaten/kota prioritas 2, dan 42 (empat puluh dua) kabupaten/kota prioritas 3.

Tabel 1. Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*Backcasting*) dan 2025

Prioritas	FSVA 2024	FSVA 2025
1	25	20
2	19	19
3	48	42
4	143	111
5	224	216
6	55	106
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	92	81
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	422	433

Sumber: Bapanas, 2024-2025

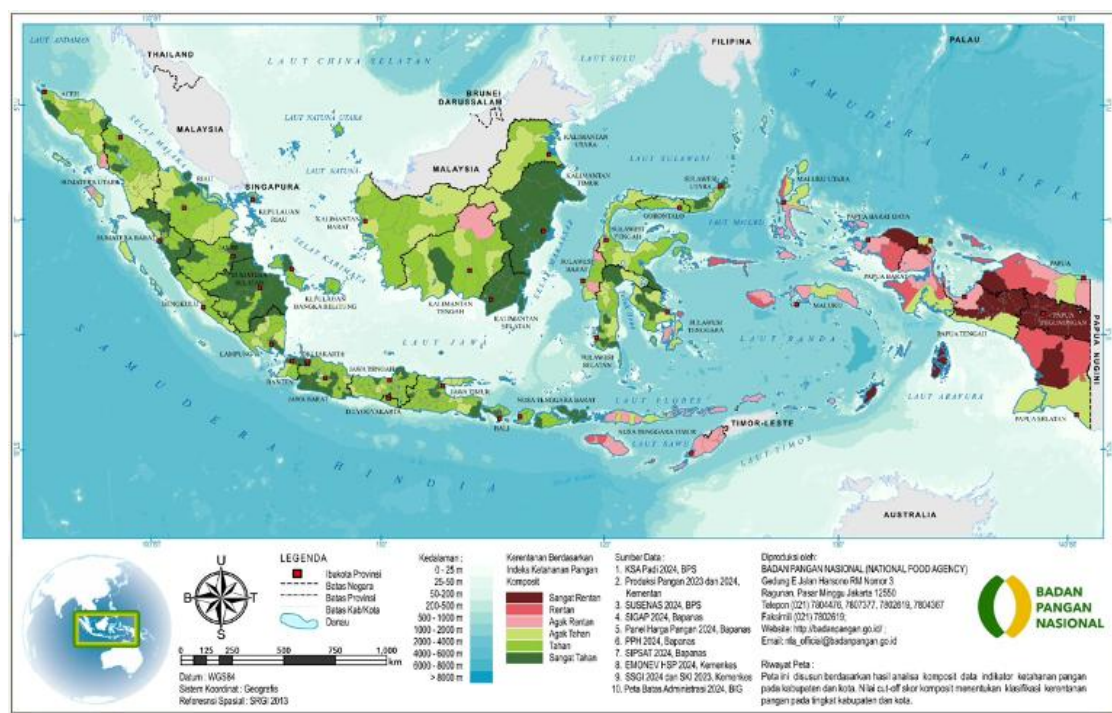
Wilayah rentan pangan sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan), dan wilayah kepulauan. Pulau Papua merupakan wilayah dengan sebaran daerah rentan rawan pangan terbanyak, yaitu sejumlah 36 (tiga puluh enam) kabupaten/kota. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan seluruh kabupaten/kota termasuk daerah rentan rawan pangan. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terbanyak, yaitu 18 (delapan belas) kabupaten/kota.

Tabel 2. Sebaran Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan			
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Total
1	Aceh	-	-	2	2
2	Sumatera Utara	-	-	2	2
3	Nusa Tenggara Timur	-	3	15	18
4	Kalimantan Tengah	-	-	1	1
5	Sulawesi Utara	-	-	1	1
6	Sulawesi Tenggara	-	1	3	4
7	Sulawesi Barat	-	-	2	2
8	Maluku	2	2	5	9
9	Maluku Utara	-	3	3	6
10	Papua Barat	1	2	2	5
11	Papua Barat Daya	1	2	2	5
12	Papua Selatan	1	2	-	3
13	Papua Pegunungan	8	-	-	8
14	Papua	1	4	3	8
15	Papua Tengah	6		1	7

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Karakteristik kabupaten/kota rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, rasio CBPD yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan rendah, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah.



Gambar 17. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dapat dilihat melalui perbandingan hasil FSVA Tahun 2024 dan Tahun 2025. Jumlah kabupaten/kota yang termasuk kelompok Prioritas 1–3 (rentan pangan) menurun dari 92 (sembilan puluh dua) kabupaten/kota pada tahun 2024 menjadi 81 (delapan puluh satu) kabupaten/kota pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah kabupaten/kota pada kelompok Prioritas 4–6 (tahan pangan) meningkat dari 422 (empat ratus dua puluh dua) menjadi 433 (empat ratus tiga puluh tiga) kabupaten/kota. Penurunan jumlah wilayah rentan tersebut terutama didorong oleh berkurangnya jumlah kabupaten/kota pada Prioritas 1, dari 25 (dua puluh lima) menjadi 20 (dua puluh) kabupaten/kota, dan Prioritas 3, dari 48 (empat puluh delapan) menjadi 42 (empat puluh dua) kabupaten/kota, serta meningkatnya jumlah wilayah Prioritas 6 (sangat tahan) hampir dua kali lipat, yaitu dari 55 (lima puluh lima) menjadi 106 (seratus enam) kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan nasional, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang memerlukan perhatian khusus.

Tabel 3. Perbandingan Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota FSVA Tahun 2024 dan Tahun 2025

Prioritas	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritas 1 (Sangat Rentan)	22	22	23	24	25	20
Prioritas 2 (Rentan)	23	22	20	19	19	19
Prioritas 3 (Agak Rentan)	62	55	55	53	48	42
Prioritas 4 (Agak Tahan)	122	130	132	136	143	111
Prioritas 5 (Tahan)	188	193	201	215	224	216
Prioritas 6 (Sangat Tahan)	25	32	36	45	55	106
Prioritas 1–3 (Rentan)	107	99	98	96	92	81
Prioritas 4–6 (Tahan)	335	355	369	396	422	433

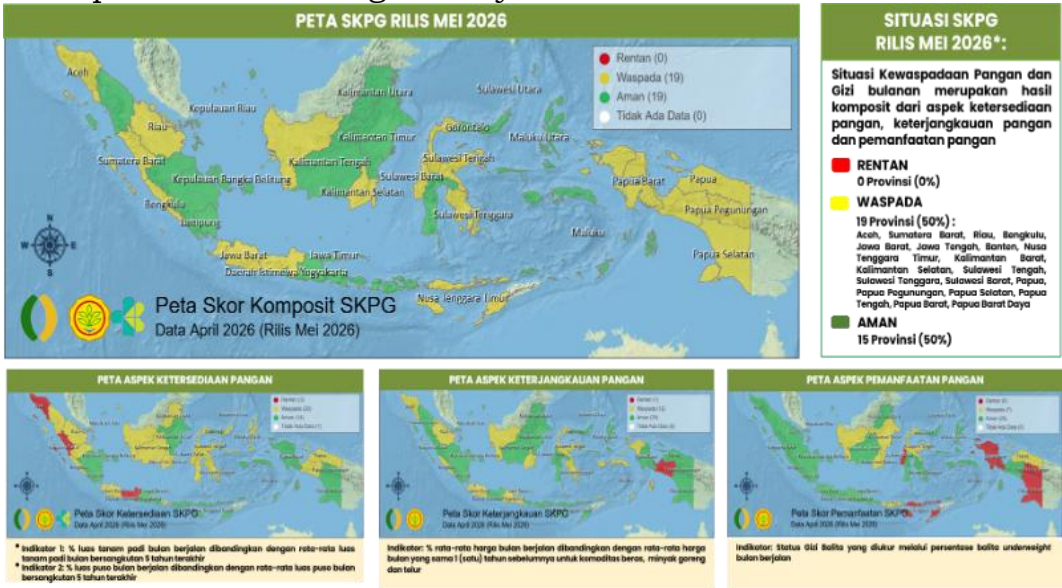
Sumber: Badan Pangan Nasional, *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025* yang diolah oleh Bappenas

Di sisi lain, masih terdapat enam kabupaten/kota yang mengalami penurunan status ketahanan pangan dari kategori tahan (Prioritas 4–6) menjadi rentan (Prioritas 1–3), yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Buru di Provinsi Maluku, serta Kota Jayapura di Provinsi Papua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan ketahanan pangan belum berlangsung secara merata sehingga diperlukan intervensi yang lebih terarah sesuai karakteristik wilayah.

2.
- Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan instrumen yang dikembangkan untuk memantau, menganalisis, dan memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya kerawanan pangan dan gizi di tingkat nasional maupun daerah. SKPG berfungsi sebagai sistem kewaspadaan yang menyediakan informasi dan analisis situasi secara berkala guna mendukung perumusan rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi penanganan kerawanan pangan dan gizi secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi. Dalam implementasinya, SKPG mengintegrasikan berbagai indikator yang merepresentasikan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan dan gizi, serta faktor risiko yang dapat memengaruhi kondisi ketahanan pangan masyarakat seperti iklim dan bencana. Hasil analisis SKPG disajikan dalam bentuk Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang menggambarkan tingkat kewaspadaan setiap wilayah berdasarkan hasil analisis indikator-

indikator utama ketahanan pangan. Penyajian dalam bentuk peta tematik memungkinkan identifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus secara lebih cepat dan komprehensif, sekaligus memberikan gambaran spasial mengenai persebaran risiko kerawanan pangan dan gizi. Peta situasi tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta penentuan prioritas intervensi pada wilayah yang menunjukkan gejala kerawanan pangan dan gizi. Penguatan SKPG menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan gizi, antara lain perubahan iklim, bencana alam, gangguan produksi dan distribusi pangan, fluktuasi harga pangan, perlambatan ekonomi, serta permasalahan gizi yang masih terjadi pada kelompok rentan. Melalui pemantauan rutin dan analisis situasi secara berjenjang, SKPG menghasilkan tingkat kewaspadaan wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menetapkan langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tingkat kewaspadaan, mulai dari kondisi aman hingga kondisi yang memerlukan kewaspadaan tinggi, sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan bentuk dan urgensi intervensi yang diperlukan. Dalam mendukung pelaksanaan RAN-PG, SKPG menjadi salah satu sumber data dan informasi strategis untuk memperkuat perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta penetapan prioritas program dan kegiatan. Informasi yang dihasilkan SKPG tidak hanya digunakan untuk penanganan kondisi darurat, tetapi juga sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko kerawanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan, kualitas data, kapasitas analisis, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SKPG menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat Indonesia.



Gambar 18. Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rilis Mei 2026

3. Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan

Pengelolaan *Food Loss and Waste* (FLW) atau istilah di Indonesia Susut Pangan dan Sisa Pangan (SSP) menjadi isu penting dalam mewujudkan sistem pangan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Sesuai kajian Kementerian PPN/Bappenas (2021), dalam kurun waktu tahun 2000-2019 timbulan SSP berkisar 23-48 (dua puluh tiga sampai empat puluh delapan juta) ton pangan per tahun setara dengan 115-184 (seratus lima belas sampai seratus delapan puluh empat) kilogram/kapita/tahun. Kondisi ini berdampak terhadap aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Diantara pangan yang terbuang tersebut, terdapat potensi pangan yang masih layak dan aman, jika dilakukan Upaya Penyelamatan Pangan maka dapat disalurkan kepada 61-125 (enam puluh satu sampai seratus dua puluh lima juta) orang atau 29-47 (dua puluh sembilan sampai empat puluh tujuh) persen populasi Indonesia. Timbulan SSP berkontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang diestimasi ekuivalen dengan 1.702,9 (seribu tujuh ratus dua koma sembilan) Mt CO₂, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 (tujuh koma dua sembilan) persen emisi GRK Indonesia. Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh timbulan SSP sebesar Rp213-551 (dua ratus tiga belas sampai dengan lima ratus lima puluh satu) triliun/tahun atau setara 4-5% (empat sampai lima persen) Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Indonesia berkomitmen mengurangi 50 persen *food waste* dan *food loss* sesuai Target SDGs 12.3 pada tahun 2030. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, di mana Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan menjadi salah satu Kegiatan Prioritas (KP) pada Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional (PN) 2, dengan salah satu target, yaitu Persentase Penyelamatan Pangan sebesar 3-5 (tiga sampai lima) persen per tahun.

Sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut, sejak tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan yang pada tahun 2025 telah dimantapkan menjadi Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan selaras dengan amanah RPJMN 2025-2029. Fokus utama upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui 5 (lima) strategi, yaitu: (1) pengembangan kebijakan dan regulasi; (2) sosialisasi, edukasi dan peningkatan kapasitas; (3) sinergi dan kolaborasi; (4) fasilitasi kegiatan penyelamatan pangan; dan (5) sistem informasi dan data terintegrasi.

Upaya penyelamatan pangan memerlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi sektor pentahelix ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*), baik pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, swasta/pelaku usaha, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, komunitas, civitas akademika, media dan masyarakat baik di pusat maupun daerah.

Dukungan pemerintah pusat terhadap daerah dilakukan melalui pendampingan secara bertahap sejak tahun 2023. Kegiatan dimulai dengan menggencarkan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan di 12 (dua belas) Provinsi melibatkan OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dukungan Bappeda dan keterlibatan unsur OPD terkait lainnya. Provinsi pelaksana kegiatan penyelamatan

pangan di tahun 2024 bertambah menjadi 15 (lima belas) Provinsi, tahun 2025 bertambah menjadi 17 (tujuh belas) Provinsi dan tahun 2026 bertambah menjadi 20 (dua puluh) provinsi. Sebagai bentuk komitmen daerah dalam upaya penyelamatan pangan, sejak tahun 2023 sampai dengan Minggu I Juli 2026 sebanyak 17 (tujuh belas) Gubernur dan 56 (lima puluh enam) Bupati/Walikota telah menerbitkan instruksi/surat edaran yang mendetailkan peran serta para pihak di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, fasilitasi kegiatan penyelamatan pangan juga dialokasikan di tingkat pusat dan daerah. Sejak akhir tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah memiliki 3 (tiga) unit kendaraan penyelamatan pangan (mobil box) dan 1 (satu) unit *food truck* yang digunakan untuk mobilisasi di wilayah Jabodetabek dan sekitar Banten. Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk penjemputan dan penyaluran donasi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui upaya kolaboratif dengan donatur pangan serta bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Kendaraan tersebut juga sebagai sarana sosialisasi tentang pentingnya upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan.

Sebagai wujud dukungan kepada pemerintah daerah, fasilitasi kendaraan selamatkan pangan berupa kendaraan penyelamatan pangan disertai dengan *box* berpendingin diserahkan kepada 5 (lima) provinsi (tahun 2025) dan 3 (tiga) provinsi (tahun 2026). Alokasi diberikan kepada provinsi yang memiliki komitmen penyelamatan pangan dan terdapat mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan aktif. Selanjutnya, terdapat pula dukungan pemerintah daerah dalam fasilitasi sarana prasarana bagi bank pangan/penggiat selamatkan pangan, diantaranya penyediaan ruang bagi Bank Pangan, rak penyimpanan, alat pengolahan dan fasilitas lainnya sesuai dengan identifikasi kebutuhan di masing-masing wilayah.

Dalam mendukung sistem informasi dan data terintegrasi serta pencapaian target RPJMN penyelamatan pangan, Badan Pangan Nasional telah menginisiasi dan mengembangkan Platform Stop Boros Pangan (<https://sbp.badanpangan.go.id>). Melalui platform tersebut dapat diketahui jumlah penyelamatan pangan yang dilakukan per wilayah maupun nasional. Platform Stop Boros Pangan memfasilitasi semua pelaku penyelamatan pangan untuk melakukan pelaporan secara mandiri atas data pangan yang terselamatkan. Data tersebut bersifat strategis sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam memantapkan upaya penyelamatan pangan.

4. Bantuan Pangan Sebagai Intervensi Kerawanan Pangan
Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan *Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan* pada tahun 2024. Kegiatan ini bersifat uji coba (*piloting*) dan menyanggar 45.000 (empat puluh lima ribu) keluarga, yang diperkirakan mencakup sekitar 180.000 (seratus delapan puluh ribu) jiwa, yang termasuk dalam kelompok

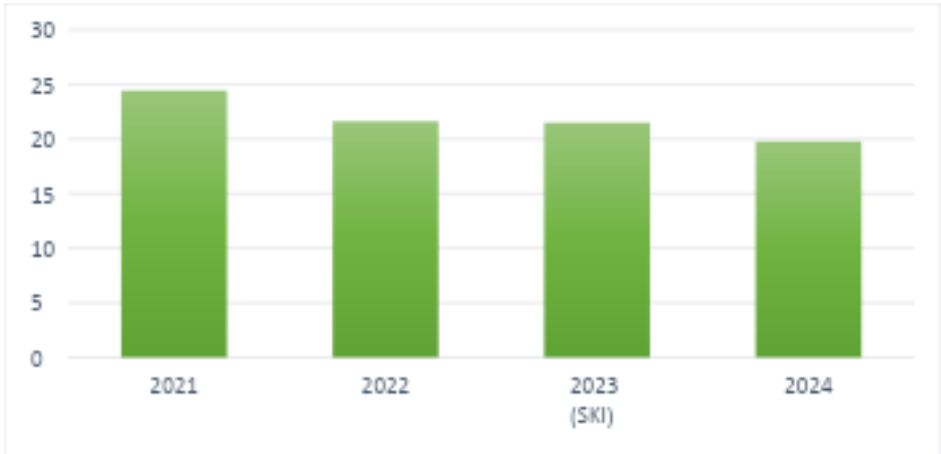
10% (sepuluh persen) tpengeluaran terendah (desil 1), tersebar di 20 (dua puluh) kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi.

F. Situasi Permasalahan Gizi di Indonesia

1. Status Gizi Balita

a. *Stunting*

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* balita di Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, prevalensi *stunting* sebesar 24,4% (dua puluh empat koma empat persen), kemudian menurun menjadi 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) pada tahun 2022. Namun, penurunan yang terjadi pada tahun berikutnya cenderung stagnan, dengan angka prevalensi 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024, prevalensi kembali turun menjadi 19,8% (sembilan belas koma delapan persen).

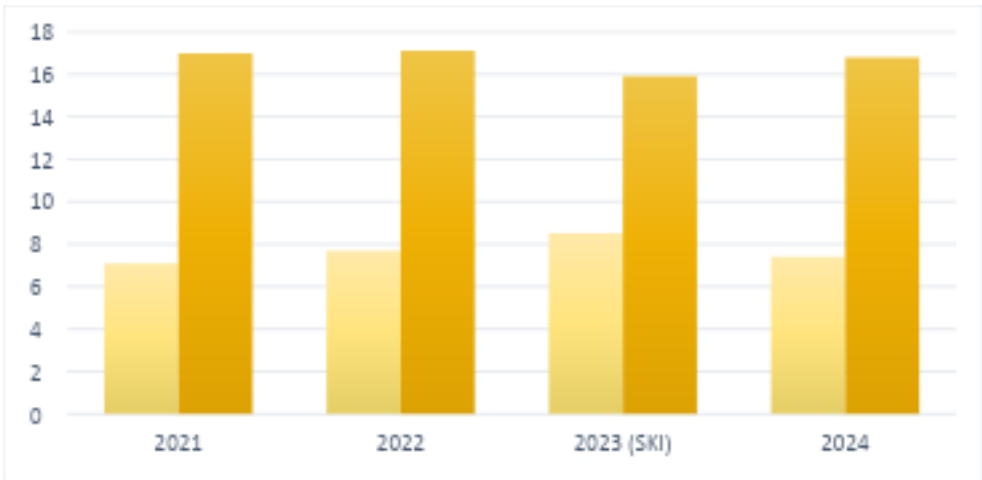


Gambar 19. Tren Prevalensi *Stunting* Balita Tahun 2021-2024
Sumber: SKI, 2023; SSGI 2021, 2022, 2024

Penurunan sebesar 4,6% dalam 3 (tiga) tahun terakhir merupakan capaian yang patut diapresiasi, mengingat kompleksitas determinan *stunting* di Indonesia. Namun, capaian ini masih belum mencapai target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yakni 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Artinya, masih terdapat gap sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi lanjutan.

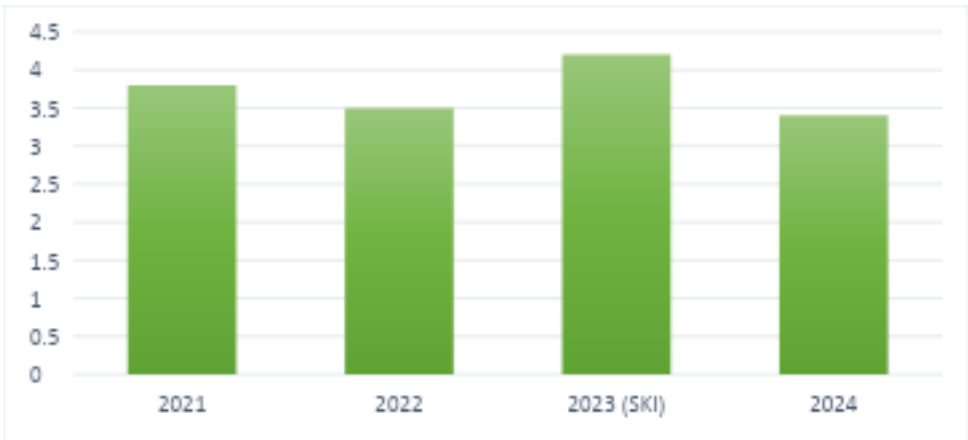
b. *Wasting* dan *Underweight*

Prevalensi *wasting* mengalami kenaikan dari 7,1% (tujuh koma satu persen) (2021) menjadi 8,5% (delapan koma lima persen) (SKI, 2023), kemudian menurun menjadi 7,4% (tujuh koma empat persen) (2024). Sementara itu, prevalensi *underweight* menurun dari 17,0% (tujuh belas koma nol persen) (2021) menjadi 15,9% (lima belas koma sembilan persen) (SKI, 2023), namun kembali meningkat menjadi 16,8% (enam belas koma delapan persen) (2024).



Gambar 20. Tren Prevalensi *Wasting* dan *Underweight* Pada Balita Tahun 2021-2024
Sumber: SSGI 2021, 2022, 2024; SKI, 2023

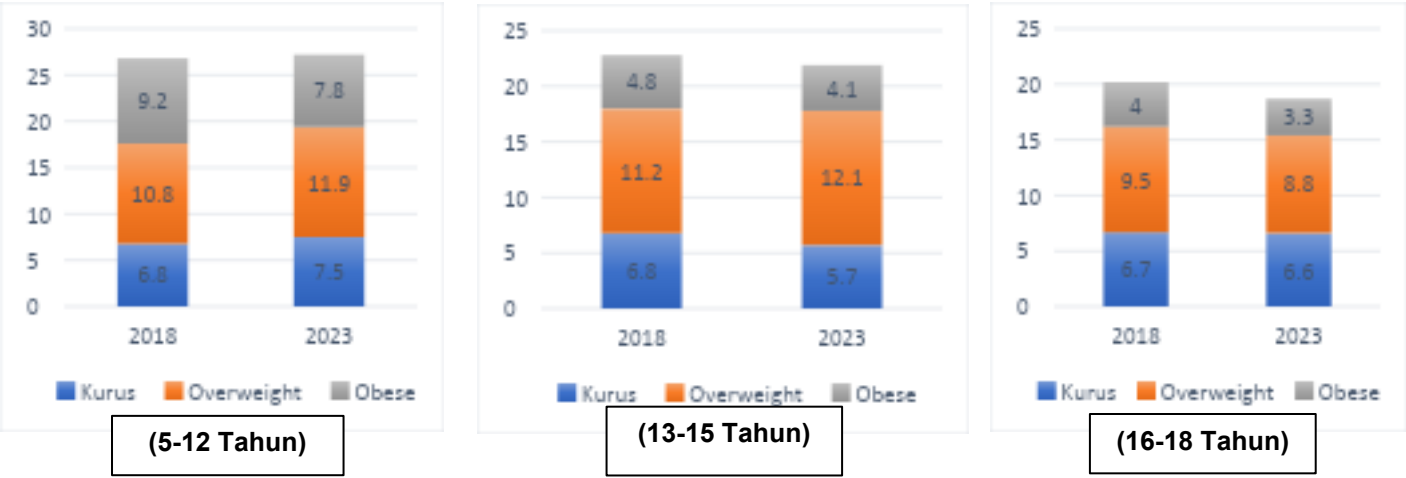
- c. *Overweight*
- Prevalensi *overweight* pada balita menunjukkan fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen), menurun menjadi 3,5% (tiga koma lima persen) di tahun 2022. Namun, angka ini naik menjadi 4,2% (empat koma dua persen) pada tahun 2023 (SKI, 2023), sebelum kembali turun menjadi 3,4% (tiga koma empat persen) di tahun 2024.



Gambar 21. Tren Prevalensi Obesitas Balita Tahun 2021-2024
Sumber: SSGI, 2024

2. Status Gizi Anak dan Remaja
- Pada kelompok usia 5-12 tahun, terdapat peningkatan prevalensi kurus dari 6,8% (enam koma delapan persen) menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen), peningkatan *overweight* dari 10,8% (sepuluh koma delapan persen) menjadi 11,9% (sebelas koma sembilan persen), namun prevalensi obesitas menurun dari 9,2% (sembilan koma dua persen) menjadi 7,8% (tujuh koma delapan persen). Pada usia 13-15 tahun, prevalensi kurus menurun dari 6,8% (enam koma delapan persen) menjadi 5,7% (lima koma tujuh persen), *overweight* meningkat dari 11,2% (sebelas koma dua persen) menjadi 12,1% (dua belas koma satu persen), dan obesitas turun dari 4,8% (empat koma delapan persen) menjadi 4,1% (empat koma satu persen). Untuk kelompok usia 16-18 tahun, prevalensi kurus relatif stabil (6,7% (empat koma tujuh persen) menjadi 6,6% (enam koma enam

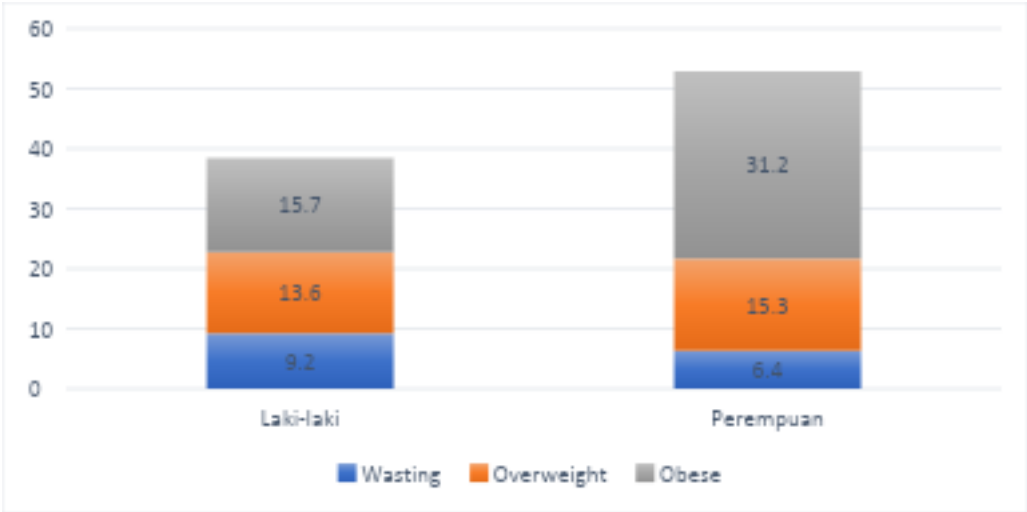
persen)), *overweight* menurun dari 9,5% (sembilan koma lima persen) menjadi 8,8% (delapan koma delapan persen), dan obesitas juga menurun dari 4% (empat persen) menjadi 3,3% (tiga koma tiga persen).



Gambar 22. Prevalensi Status Gizi Anak dan Remaja, Tahun 2018 dan 2023
Sumber: Riskesdas, 2018; SKI, 2023

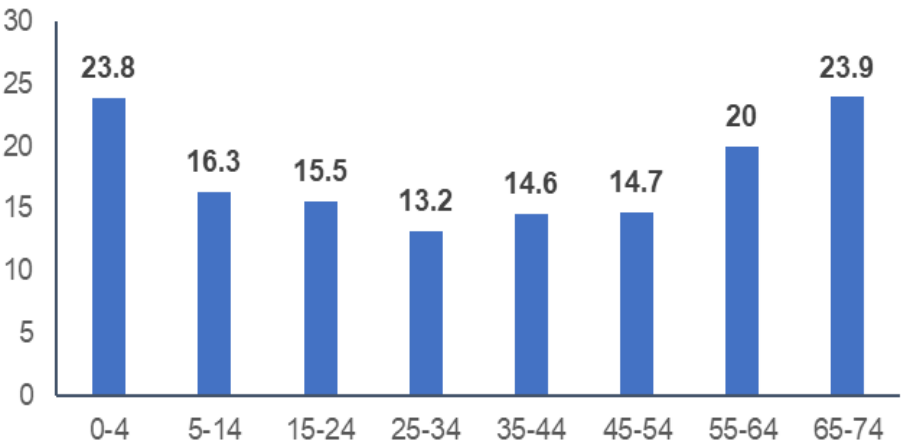
Secara umum, tren menunjukkan penurunan obesitas di semua kelompok usia, namun terdapat kecenderungan peningkatan kasus *overweight* khususnya pada usia 5–15 tahun, serta stabilnya proporsi anak kurus pada usia 16–18 tahun. Situasi ini mengindikasikan bahwa tantangan gizi ganda (*double burden of malnutrition*) masih perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program intervensi gizi ke depan.

3. Status Gizi Dewasa (>18 Tahun)
- Pada kelompok laki-laki di atas 18 tahun prevalensi *wasting* sebesar 9,2%, (sembilan koma dua persen) *overweight* sebesar 13,6% (tiga belas koma enam persen), dan obesitas sebesar 15,7% (lima belas koma tujuh persen). Sementara itu, pada kelompok perempuan, prevalensi *wasting* lebih rendah sebesar 6,4% (enam koma empat persen), *overweight* sedikit lebih tinggi sebesar 15,3% (lima belas koma tiga persen), dan obesitas jauh lebih tinggi mencapai 31,2% (tiga puluh satu koma dua persen). Selain itu, hasil SKI, 2023 menunjukkan prevalensi obesitas sentral pada dewasa usia >15 tahun masih tinggi, yaitu 15,7% (lima belas koma tujuh persen) pada laki-laki dan 46,7% (empat puluh enam koma tujuh persen) pada perempuan.



Gambar 23. Status Gizi Dewasa (Usia > 18 Tahun) Tahun 2023
Sumber: SKI, 2023

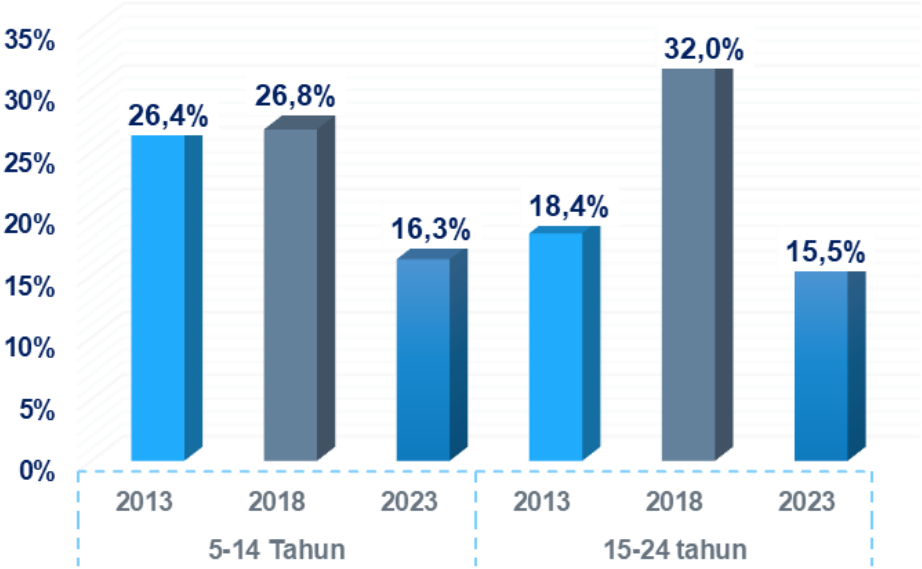
4. Kekurangan Zat Gizi Mikro
- Kekurangan zat gizi mikro, atau *hidden hunger*, merupakan tantangan gizi utama di Indonesia. Kondisi ini terjadi saat tubuh kekurangan vitamin dan mineral penting, meskipun asupan energi mencukupi. Dampaknya sering tidak terlihat langsung, namun beresiko menurunkan pertumbuhan, imunitas, dan produktivitas. Masalah ini bisa terjadi bahkan pada individu dengan gizi baik atau ketahanan pangan memadai, menunjukkan pentingnya kualitas pangan, bukan hanya kuantitas. Kekurangan zat gizi mikro dapat menyebabkan anemia, gangguan kognitif, dan peningkatan morbiditas. Sebagai bagian dari 3 (tiga) beban masalah gizi, *hidden hunger* perlu mendapatkan perhatian lebih melalui peningkatan akses pangan bergizi, fortifikasi, suplementasi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya vitamin dan mineral.



Gambar 24. Prevalensi Anemia Menurut Usia secara Nasional
Sumber: Riskesdas, 2018; SKI, 2023

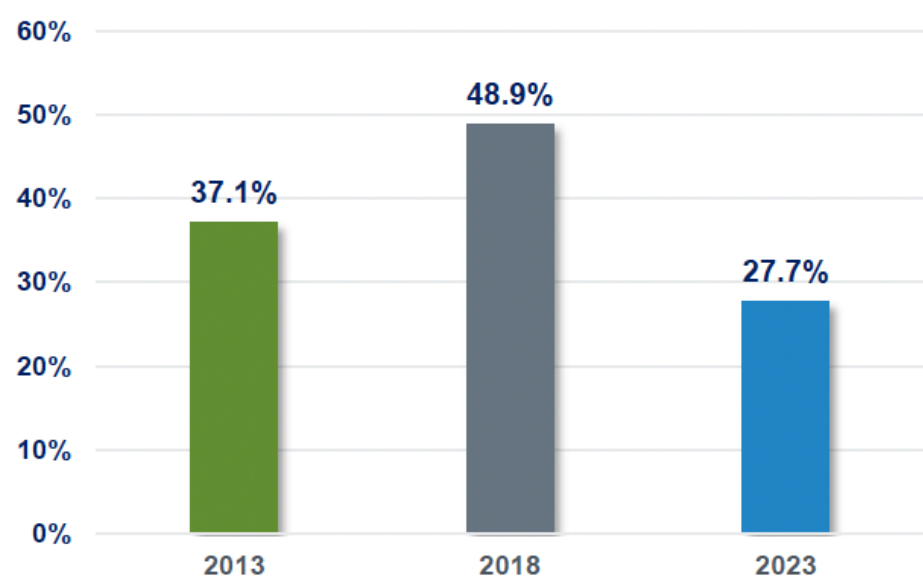
Data menunjukkan bahwa prevalensi anemia nasional cukup tinggi, dengan kelompok usia 0-4 tahun mengalami prevalensi tertinggi sebesar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen). Ini menunjukkan bahwa balita merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pencegahan dan penanganan anemia, mengingat dampaknya terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Selain itu, prevalensi anemia

kembali meningkat pada kelompok usia lanjut (65-74 tahun) sebesar 23,9% (dua puluh tiga koma sembilan persen), yang dapat memperburuk kondisi kesehatan lansia. Selain anemia, masalah kekurangan vitamin A juga masih ditemukan, di mana 9,8% (sembilan koma delapan persen) balita mengalami defisiensi ringan vitamin A berdasarkan konsentrasi serum retinol (SKI, 2023). Kekurangan vitamin A berisiko menyebabkan gangguan penglihatan hingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Prevalensi anemia pada anak usia sekolah dan remaja di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode tahun 2013-2023. Pada kelompok usia 5-14 tahun, prevalensi anemia meningkat dari 26,4% (dua puluh enam koma empat persen) pada tahun 2013 menjadi 26,8% (dua puluh enam koma delapan persen) pada tahun 2018, namun kemudian menurun signifikan menjadi 16,3% (enam belas koma tiga persen) pada tahun 2023. Sementara itu, pada kelompok usia 15-24 tahun, terjadi peningkatan tajam dari 18,4% (delapan belas koma empat persen) pada tahun 2013 menjadi 32,0% (tiga puluh dua koma nol persen) pada tahun 2018, yang kemudian menurun drastis menjadi 15,5% (lima belas koma lima persen) pada tahun 2023.



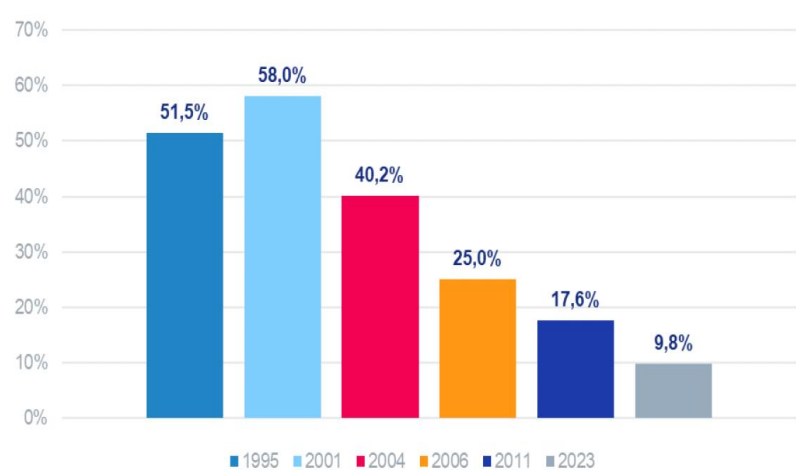
Gambar 25. Prevalensi Anemia pada Anak Usia Sekolah dan Remaja secara Nasional
Sumber: Riskesdas 2013 & 2018; SKI 2023

Untuk prevalensi anemia pada wanita hamil berusia 15-54 tahun di Indonesia, data menunjukkan peningkatan dari 37,1% (tiga puluh tujuh koma satu persen) pada tahun 2013 menjadi 48,9% (empat puluh delapan koma sembilan persen) pada tahun 2018, yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) pada tahun 2023.



Gambar 26. Prevalensi Anemia pada Wanita Hamil (15-54 Tahun) secara Nasional
Sumber: Riskesdas 2013 & 2018; SKI 2023

Selain anemia, Kekurangan Vitamin A (KVA) masih menjadi masalah kekurangan zat gizi mikro yang harus menjadi perhatian. Prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan dari 51,5% (lima puluh satu koma lima persen) pada tahun 1995 menjadi 9,8% (sembilan koma delapan persen) pada tahun 2023. Setelah sempat meningkat pada tahun 2001 (58% (lima puluh delapan persen)), prevalensi KVA terus menurun seiring penguatan program suplementasi vitamin A dan perbaikan akses pangan bergizi. Meskipun angka nasional saat ini di bawah 10% (sepuluh persen), kekurangan vitamin A masih menjadi perhatian, khususnya pada anak usia 0–5 tahun di wilayah tertentu. Data survei tahun 2023 juga masih terbatas sehingga diperlukan penguatan surveilans gizi dan perluasan program intervensi berbasis pangan untuk mempertahankan dan mempercepat penurunan KVA.



Gambar 27. Persentase Kekurangan Vitamin A (KVA) pada Kelompok Anak di Indonesia, Tahun 1995-2023
Sumber: SKRT 1995-2004; Survei Gizi Mikro 2006; SEANUTS 2011 Riskesdas 2007 dan 2013 pada Anak 6-12 Tahun; SEANUTS 2011 pada Anak 5-12 Tahun; SKI 2023 pada anak usia 0-5 tahun

Data RISKESDAS tahun 2013 menunjukkan bahwa berdasarkan nilai media ekskresi iodine urin (EIU) pada anak usia sekolah (215 µg/L), wanita usia subur (187 µg/L) dan wanita hamil (163 µg/L) status iodine di tingkat nasional dinilai cukup. Namun, berdasarkan analisis lanjut dari data Riskesdas tahun 2013 di tingkat sub-nasional menunjukkan bahwa masih terjadi kekurangan yodium pada wanita hamil di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua serta di dua kuintil ekonomi termiskin. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kekurangan iodine berisiko menghambat pertumbuhan, menurunkan kecerdasan, serta meningkatkan komplikasi kehamilan. Pencegahan perlu dilakukan melalui fortifikasi garam dan edukasi gizi.

Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A dan iodine menjadi tantangan besar bagi kemajuan kesehatan di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia menempatkan fortifikasi pangan sebagai salah satu strategi kunci yang tercermin dalam berbagai regulasi nasional. Saat ini, 3 (tiga) komoditas utama seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit telah difortifikasi secara wajib. Upaya juga dilakukan untuk memperluas fortifikasi pada komoditi beras, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan seperti koordinasi dan pengawasan. Pada November 2023, dibentuk Forum Fortifikasi Pangan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan mendukung pengembangan Rencana Strategis Nasional Fortifikasi Pangan Skala Besar Tahun 2025-2045. Forum menjadi Langkah awal strategis untuk mengintegrasikan kebijakan, monitoring-evaluasi, advokasi, dan komunikasi perubahan perilaku terkait fortifikasi.

G. Tantangan Masalah Pangan dan Gizi di Indonesia

1. Tantangan Ketersediaan Pangan

a. Pertumbuhan dan sebaran penduduk

Peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan. Selain itu, sebaran penduduk yang tidak merata menjadi tantangan, dengan persentase penduduk kota meningkat dari 53,30% (lima puluh tiga koma tiga puluh persen) pada tahun 2015 menjadi 56,70% (lima puluh enam koma tujuh puluh persen) pada tahun 2020 dan diperkirakan mencapai 66,60% (enam puluh enam koma enam puluh persen) pada tahun 2045 (BPS, 2015). Peningkatan jumlah penduduk, pendapatan, dan proporsi usia produktif juga memengaruhi perubahan preferensi pangan, dengan masyarakat cenderung mengutamakan kualitas pangan dan mengikuti tren makanan tertentu, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan yang lebih peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup.

b. Permasalahan lahan pertanian

Konversi lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk sektor ekonomi lain masih terus berlangsung, terutama untuk sektor perumahan, industri, transportasi, dan pertambangan. Selain permasalahan konversi lahan, produktivitas lahan juga mengalami *levelling off* sebagai akibat akumulasi pemupukan secara terus menerus pada 3 (tiga) dasawarsa terakhir. Hal

tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan input yang lebih untuk memperoleh tingkat produktivitas yang sama.

c. Sumber daya manusia di bidang pertanian

Pertanian Indonesia menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia yang "menua", dengan mayoritas kepala Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) berada pada rentang usia 45-64 tahun. Selain itu, tingkat pendidikan petani yang rendah membatasi kemampuan mereka dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi. Meskipun 46,84% petani sudah menggunakan teknologi digital, mayoritas pengguna merupakan petani berskala kecil yang cenderung ragu dalam mengadopsi inovasi dan teknologi pertanian. Penggunaan teknologi lebih dominan di kalangan petani muda, meskipun persentasenya masih relatif kecil (21,93% (dua puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen)).

d. Harga pangan

Harga pangan dunia yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat akibat perubahan iklim yang semakin intens, tensi geopolitik, dan kompetisi penggunaan pangan energi. Adanya larangan ekspor beras non-basmati dari India telah menyebabkan kenaikan harga beras dunia 15-25% (lima belas sampai dengan dua puluh lima persen). Perang antara Rusia dan Ukraina juga telah menyebabkan kenaikan harga gandum dunia, karena kedua negara tersebut merupakan negara pengekspor gandum, dan peperangan telah menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian kedua negara tersebut. Peningkatan harga pangan dunia akan berdampak pada peningkatan harga pangan domestik, khususnya untuk komoditas impor.

e. Tingginya *Food Loss* dan *Food Waste* (SSP)

Tingginya *food loss* dan *food waste* (SSP) akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan, persoalan terkait agrologistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah), serta perilaku konsumsi yang tidak tepat dengan menyisakan makanan.

2. Tantangan Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan utama. Fluktuasi harga pangan global, meskipun indeks harga pangan FAO 2023 menurun, tetap menyebabkan ketidakstabilan harga domestik, khususnya pada komoditas utama seperti sereal dan susu. Struktur rantai pasok pangan yang panjang, terutama untuk beras, meningkatkan biaya distribusi dan harga konsumen, sehingga mempersempit akses pangan, terutama di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Inovasi digital dan modernisasi logistik mulai diterapkan, namun adopsinya belum merata. Pemerintah telah memperkuat bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, serta program pemberdayaan ekonomi melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Namun, efektivitas penyaluran dan cakupan program di daerah rentan perlu ditingkatkan.

Inovasi digital juga dapat dikembangkan pada informasi pasar produksi pangan melalui *marketplace* atau sistem informasi lainnya

yang lebih mudah dimanfaatkan dan diakses oleh produsen maupun konsumen.

3. Tantangan Pemanfaatan Pangan

Pola konsumsi masyarakat belum sesuai dengan PPH, ditandai dengan ketergantungan tinggi pada padi-padian (beras dan terigu) serta rendahnya konsumsi umbi-umbian dan pangan lokal lainnya.

- a. Skor PPH konsumsi meningkat dari 92,9 (sembilan puluh dua koma sembilan) pada tahun 2022 menjadi 94,1 (sembilan puluh empat koma satu) pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 93,5 (sembilan puluh tiga koma lima) pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) pada tahun 2025. Meskipun telah melampaui target RPJMN dan berada pada kategori baik, kualitas konsumsi pangan antar kelompok pendapatan masih belum merata.
- b. *Food waste* memperburuk upaya pemanfaatan pangan secara optimal.
- c. Ketergantungan pada jenis pangan tertentu meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga global dan gangguan produksi akibat perubahan iklim atau restriksi perdagangan.
- d. Keamanan pangan sepanjang rantai pasok belum sepenuhnya terjamin, memerlukan penguatan sistem pengawasan dan penyelenggaraan keamanan pangan.

4. Tantangan Kelembagaan dan Tata Kelola dalam Pelaksanaan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RAD-PG:

- a. Perubahan regulasi dalam setiap kementerian dan lembaga yang mengampu indikator RAN-PG mengakibatkan perlunya penyesuaian kebijakan dan koordinasi ulang.
- b. Kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi di daerah sangat beragam dan tingkatan kewenangan tidak sama antar daerah.
- c. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah.
- d. Penggunaan anggaran yang belum optimal di berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan dan pangan untuk aksi-aksi dalam RAN-PG.
- e. Kurangnya koordinasi dalam sistem data, monitoring dan evaluasi capaian program dalam RAN-PG dan RAD-PG.
- f. Keberlanjutan komitmen para pemimpin daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi di daerah.
- g. Minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.

5. Tantangan Perubahan Iklim dan Kejadian Bencana Alam

Indonesia sebagai negara megadiversitas menurut UNEP, memiliki kekayaan sumber pangan yang sangat besar: 100 (seratus) spesies tanaman sumber karbohidrat, 100 (seratus) spesies kacang-kacangan, 450 (empat ratus lima puluh) spesies buah, 250 (dua ratus lima puluh) spesies sayuran, 70 (tujuh puluh) spesies bumbu dan rempah, 40 (empat puluh) spesies tanaman minuman, dan 940 (sembilan ratus empat puluh) spesies tanaman obat tradisional. Kekayaan ini memberi peluang besar untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Namun, Indonesia juga rentan terhadap berbagai bencana alam karena letaknya di pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik, serta dipengaruhi fenomena El Nino dan La Nina yang berdampak pada

pola hujan, suhu ekstrem, kekeringan, dan banjir. Perubahan iklim semakin memperburuk situasi, dengan meningkatkan risiko serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan munculnya strain baru hama dan penyakit, yang berdampak pada produksi pangan.

a. Bencana alam

Sebagai salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Bencana yang sering terjadi pada tahun 2025 antara lain adalah banjir (2.009), karhutla (1.329) cuaca ekstrem (958), gempa bumi (28), tanah longsor (330), kekeringan (37), dan gelombang pasang dan abrasi (28). Menurut *Center for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED) 2023, Indonesia termasuk 10 (sepuluh) besar negara dengan bencana alam terbanyak.

Dari berbagai kategori bencana alam, beberapa di antaranya disebabkan faktor hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, gelombang pasang, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data dari BNPB, terdapat 27.021 kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi Indonesia sepanjang tahun 2020-2025. Secara berturut-turut, kejadian bencana yang paling banyak adalah banjir (9.527), cuaca ekstrem (6.983), dan karhutla (5.781). Bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 saja telah menyebabkan 10.563.082 orang terdampak dan 1.661 orang meninggal dunia. Selain 68.472 rumah rusak berat, fasilitas dan sarana prasarana yang vital untuk distribusi pangan antar wilayah dan pelayanan gizi seperti jembatan dan fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kerusakan.

Frekuensi kejadian bencana dan derajat kerusakan yang terjadi menunjukkan semakin pentingnya langkah mitigasi bencana alam yang perlu memperhatikan perubahan iklim sebagai faktor pemicunya.

b. Perubahan iklim

Organisasi Meteorologi Dunia atau *World Meteorological Organization* (WMO) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi melalui perubahan rata-rata dan/atau variabilitas sifat-sifatnya dan berlangsung dalam jangka waktu lama, biasanya berpuluh-puluh tahun atau lebih. Perubahan iklim disebabkan oleh faktor antropogenik atau aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan GRK seperti karbondioksida (CO_2) dan metana (CH_4) di atmosfer. Faktor antropogenik tersebut di antaranya dapat mencakup: (1) pembakaran bahan bakar fosil; (2) penggundulan hutan; (3) penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan; (4) pengelolaan peternakan; (5) pemupukan; (6) pengelolaan limbah; dan (7) proses industri.

Laporan terbaru *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2023 menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat secara signifikan akibat perubahan iklim yang dipicu oleh meningkatnya GRK dan suhu permukaan bumi yang terus mengalami kenaikan. Di tahun 2023, fenomena El Nino memberikan pengaruh besar terhadap suhu global, mengarah pada peningkatan suhu lebih tinggi dari biasanya, yang

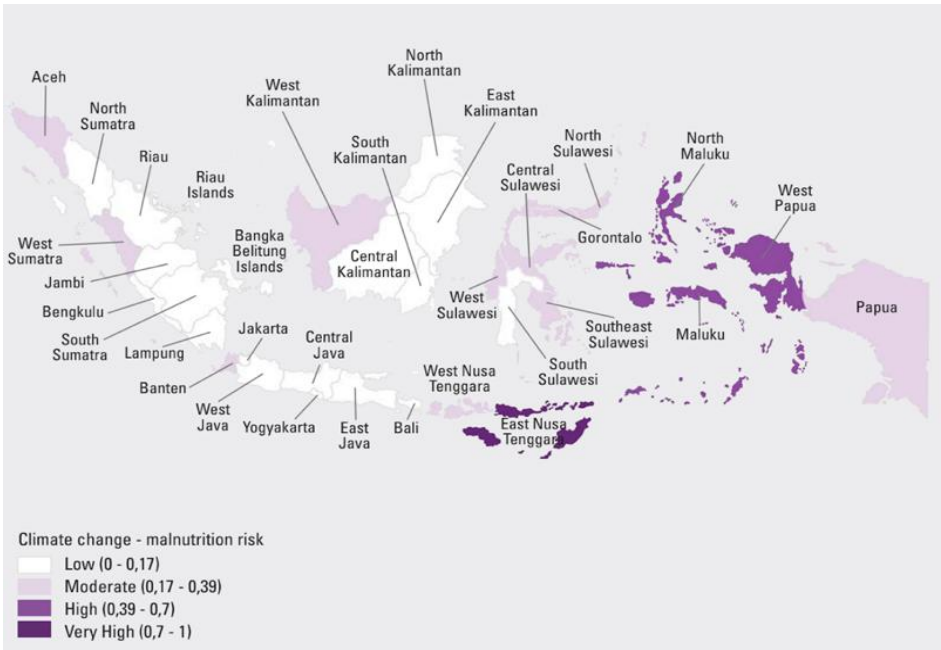
menyebabkan hampir seluruh permukaan bumi (95,5%) mengalami suhu lebih tinggi dari rata-rata antara 1951-1980. Suhu rata-rata daratan global pada 2023 meningkat sekitar 2,1°C sejak 1850-1900, dua kali lebih cepat dibandingkan suhu lautan yang meningkat 1,1°C. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (2026) menunjukkan bahwa sepanjang periode pengamatan tahun 1981 hingga 2025 di Indonesia, tahun 2025 menempati urutan keenam tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.38 °C. Data *warming stripes* dari BMKG (2025) juga menunjukkan hal yang serupa; suhu tahunan Indonesia semakin panas dari tahun ke tahun. Terkait kenaikan suhu laut, Studi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan BMKG memperlihatkan bahwa suhu permukaan laut di Indonesia diproyeksikan akan meningkat sekitar 0,5–1°C pada tahun 2100. Dalam studi Bappenas, *Kajian Awal Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, peningkatan suhu laut berdampak buruk bagi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan hutan pantai yang dapat berpengaruh pula pada kehidupan biota laut dan sumber mata pencaharian bagi nelayan.

Perubahan iklim di Indonesia berdampak besar pada sektor pangan, terutama melalui perubahan pola curah hujan dan suhu udara. Ketidakteraturan curah hujan yang menyebabkan kekeringan atau hujan ekstrem mengganggu musim tanam dan produktivitas hasil pertanian. Peningkatan suhu global juga memengaruhi tanaman yang sensitif terhadap suhu tinggi, seperti padi dan kopi, serta memperburuk ketersediaan air untuk irigasi. Selain itu, bencana alam lebih sering terjadi akibat perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor, dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur, memperburuk ketahanan pangan. Di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, perubahan iklim juga berdampak pada kenaikan tinggi permukaan laut. Permasalahan produksi pangan di suatu wilayah dapat menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sumber pangan, meningkatkan substitusi makanan yang biasanya dikonsumsi dengan makanan yang lebih murah, tetapi tidak bergizi dan tidak beragam, yang berujung pada penurunan asupan gizi. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko memperburuk *Stunting*, *wasting*, dan defisiensi mikronutrien di Indonesia.

Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan Indonesia juga mencakup ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang penting untuk sistem pertanian berkelanjutan. Penyusutan varietas tanaman lokal yang dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrem meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang di Indonesia. Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang saling memperburuk satu sama lain, yaitu meningkatnya risiko perubahan iklim dan gizi kurang, gizi lebih, dan kekurangan zat gizi mikro. Anak balita menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena dampak gizi buruk dan ketidakamanan

pangan akan memperparah kerentanan mereka terhadap bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, atau gagal panen. Kerentanan ini tidak merata di seluruh wilayah, melainkan dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial ekonomi, dan kapasitas adaptasi lokal. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, ketahanan pangan rendah, dan status gizi buruk memiliki risiko yang lebih besar terhadap dampak perubahan iklim.

UNICEF membuat satu peta gabungan untuk lebih mudah memahami keterkaitan perubahan iklim dengan ketahanan pangan dan gizi. Gambar 25 menunjukkan peta indeks gabungan risiko antara perubahan iklim dan masalah gizi di Indonesia yang dirumuskan UNICEF berdasarkan provinsi. Indeks ini dihitung dengan menggabungkan 3 (tiga) faktor utama, yaitu indeks risiko bencana dan perubahan iklim, prevalensi masalah gizi pada anak di bawah 5 (lima) tahun, serta prevalensi kerawanan pangan rumah tangga. Setiap provinsi dikategorikan berdasarkan tingkat risiko yang dihitung dalam rentang 0-1, dengan kategori risiko rendah yang ditandai warna sangat terang, risiko sedang dengan warna ungu muda, risiko tinggi dengan warna ungu sedang, dan risiko sangat tinggi dengan warna ungu gelap. Tampak dalam peta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara menjadi daerah-daerah dengan risiko sangat tinggi dan tinggi.



Gambar 28. Peta Indeks Gabungan Risiko Perubahan Iklim dan Masalah Gizi
Sumber: UNICEF, 2024

BAB III

KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

- A. Pendekatan Multisektor dalam Pembangunan Pangan dan Gizi
- Pembangunan pangan dan gizi merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai TPB/SDGs. Mengingat kompleksitas tantangan pangan dan gizi, pendekatan multisektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas intervensi. RAN-PG Tahun 2026-2029 menggunakan strategi integrasi sebagai prinsip utama dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat Indonesia, dengan penajaman pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta percepatan penurunan *stunting*. Pendekatan integrasi dalam pembangunan pangan dan gizi berarti mengharmonisasikan kebijakan, program, dan sumber daya lintas sektor untuk menciptakan sistem pangan dan gizi yang lebih berkelanjutan. Beberapa bentuk integrasi yang diusung dalam RAN-PG Tahun 2026-2029 antara lain:
1. Penyelarasan kegiatan dan program terkait pangan dan gizi antar-K/L.
 2. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program pangan dan gizi yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 3. Berfokus kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, remaja putri, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
 4. Pendekatan berbasis wilayah yang memastikan daerah dapat melakukan intervensi yang lebih intensif dan spesifik sesuai dengan karakteristik lokal.
 5. Sinergi antara sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam mendukung program pangan dan gizi berbasis bukti, termasuk melalui pendanaan inovatif dan advokasi kebijakan.
 6. Konvergensi aksi dalam percepatan perbaikan gizi untuk menangani segala bentuk masalah gizi.
 7. Penguatan sistem data pangan dan gizi yang terintegrasi baik di pusat maupun daerah.
- B. Fungsi, Tujuan dan Sasaran
1. Fungsi
RAN-PG Tahun 2026-2029 berfungsi sebagai acuan bagi K/L/pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang pangan dan gizi sesuai wewenang dan kebutuhan masing-masing. RAN-PG memuat strategi dan aksi untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs dan pencapaian target RPJMN 2025-2029 di bidang pangan, gizi, dan perubahan iklim, termasuk aksi konvergensi dalam percepatan penurunan *Stunting* di daerah. RAN-PG juga menjadi alat untuk meningkatkan daya ungkit program unggulan pemerintah di periode tahun 2025-2029 antara lain pemberian MBG, meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan program KDMP.
 2. Tujuan
Tujuan penyusunan RAN-PG Tahun 2026-2029:
 - a. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan pangan dan gizi yang berketahanan iklim melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor.

- b. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang berketahanan iklim.
 - c. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk mencapai target TPB/SDGs serta RPJMN 2025-2029 dalam pembangunan pangan, gizi, dan ketahanan iklim.
3. Sasaran
- Sasaran dari pembangunan pangan dan gizi yang berketahanan iklim adalah meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan dan penanganan kerawanan pangan sehingga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim serta menurunkan masalah gizi di masyarakat. RAN-PG disusun untuk mendukung pencapaian target *intermediate outcome* dan *outcome* dalam bidang pangan, gizi serta perubahan iklim sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029

No	Indikator	Baseline (2024)	Target (2029)	Koordinator/ Pengampu
<i>Intermediate Outcome Bidang Pangan</i>				
1.	Produksi padi (juta ton)	53,98	56,05	Kementerian Pertanian
2.	Produksi jagung (juta ton)	19,56	25,89	Kementerian Pertanian
3.	Produksi buah dan sayur (juta ton)	28,82	35,47	Kementerian Pertanian
4.	Produksi aneka kacang (ribu ton)	516,11	592,32	Kementerian Pertanian
5.	Produksi sorgum (ribu ton)	17,34	18,95	Kementerian Pertanian
6.	Produksi sagu (ton)	385,905 ^{b)}	478,451	Kementerian Pertanian
7.	Produksi ubi kayu (ton)	16.764.227	18.330.731	Kementerian Pertanian
8.	Produksi ubi jalar (ton)	1.430.341	1.707.902	Kementerian Pertanian
9.	Produksi kedelai (ton)	349.099	416.842	Kementerian Pertanian
10.	Produksi daging (juta ton)	5,29 ^{a)}	5,56	Kementerian Pertanian
11.	Produksi telur (juta ton)	6,89 ^{a)}	8,79	Kementerian Pertanian
12.	Produksi susu (ribu ton)	837,22 ^{a)}	900,4	Kementerian Pertanian
13.	Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas)	3	4	Kementerian Pertanian
14.	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan (%)	-*	100	Badan Pangan Nasional
15.	Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras (juta ton)	1,17	3-3,5	Badan Pangan Nasional

No	Indikator	Baseline (2024)	Target (2029)	Koordinator/ Pengampu
16.	Konsumsi buah dan sayur (gram/kapita/hari)	244,6	255,29	Badan Pangan Nasional
17.	Konsumsi pangan hewani (gram/kapita/hari)	124,5	139,76	Badan Pangan Nasional
18.	Konsumsi umbi-umbian (gram/kapita/hari)	41,1	64,91	Badan Pangan Nasional
19.	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	25,07 ^{b)}	28,63	Kementerian Kelautan dan Perikanan
20.	Indeks Keamanan Pangan Segar	60	65	Badan Pangan Nasional
21.	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%)	-*	100	Kementerian Pertanian
22.	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	12	12,6%	Badan Pangan Nasional
24.	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>) (%)	4,5	3,36	Badan Pangan Nasional
25.	Volume produksi ikan budidaya (juta ton)	6,20 ^{a)}	8,52	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Volume produksi perikanan tangkap (juta ton)	7,75 ^{a)}	7,50	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	73,4 (prognosis 2024)	87	Kementerian Pertanian
28.	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur)	28 (2021)	30	Kementerian Pertanian
29.	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi)	4.675,0 (2021)	4.800	Kementerian Pertanian
30.	Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat (kab/kota)	-*	360	Kementerian Kesehatan
31.	Persentase kab/kota pangan aman	13 ^{a)}	78	Badan Pengawas Obat dan Makanan
32.	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	77,8 ^{a)}	85	Badan Pengawas

No	Indikator	Baseline (2024)	Target (2029)	Koordinator/ Pengampu
				Obat dan Makanan
33.	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	73,3 ^{a)}	79	Badan Pengawas Obat dan Makanan
<i>Outcome Bidang Pangan</i>				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,5	96	Badan Pangan Nasional
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	91,4	98,3	Badan Pangan Nasional
3.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8,53	4,41	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
<i>Intermediate Outcome Bidang Gizi</i>				
1.	Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)	8,5 ^{a)}	5	Kementerian Kesehatan
2.	Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) (%)	-*	10	Kementerian Kesehatan
3.	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	27,7 ^{a)}	20	Kementerian Kesehatan
4.	Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat (kab/kota)	65 ^{a)}	300	Kementerian Kesehatan
5.	Persentase ibu hamil/ibu menyusui/anak balita/siswa PAUD/SD/SMP/SMA/SL B/santri sederajat yang mendapatkan bantuan makan bergizi gratis (persen)	-*	100	Badan Gizi Nasional
6.	Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional (sistem)	-*	1	Badan Gizi Nasional
7.	Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar (unit)	-*	26.508	Badan Gizi Nasional
8.	Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan (persen)	-*	100	Badan Gizi Nasional
<i>Outcome Status Gizi</i>				
1.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) (%)	21,5 ^{a)}	14,2	Kementerian Kesehatan
2.	Prevalensi remaja putri anemia (%)	-*	15	Kementerian Kesehatan
3.	Prevalensi obesitas > 18 tahun (%)	23,4 ^{a)}	23,4	Kementerian Kesehatan
4.	Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	87,3 ^{a)}	90,1 ^{a)}	Badan Gizi Nasional

No	Indikator	Baseline (2024)	Target (2029)	Koordinator/ Pengampu
5.	Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	75,03 ^{a)}	75,67	Badan Gizi Nasional
<i>Intermediate Outcome Bidang Lingkungan/ Aksi Perubahan Iklim</i>				
1.	Reduksi emisi GRK sektor pertanian (juta ton CO ₂ -Eq)	-*	8,94	Kementerian Lingkungan Hidup
2.	Reduksi emisi GRK sektor limbah (juta ton CO ₂ -Eq)	8,8	31,90	Kementerian Lingkungan Hidup
3.	Persentase penurunan susut pangan (%)	3	3-5	Kementerian Pertanian
4.	Persentase pangan yang terselamatkan (%)	1,44	3-5	Badan Pangan Nasional
5.	Persentase desa berketahanan iklim (%)	33,73	38,73	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
<i>Outcome Bidang Lingkungan/ Aksi Perubahan Iklim</i>				
1.	Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	0,248 ^{a)}	0,439	Kementerian Pertanian
2.	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim (%)	-*	14	Kementerian Kesehatan
3.	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)	64,75 ^{a)}	85	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	11,80 (2020)	43	Kementerian Pekerjaan Umum
5.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,21 ^{a)} (2023)	30	Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Keterangan:

*) Indikator baru

a) Capaian tahun 2023

b) Capaian tahun 2022

Indikator pembangunan bidang pangan, gizi, dan perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam Tabel 4, dapat diacu dan diselaraskan pelaksanaannya di daerah melalui penajaman aksi yang dirumuskan pada RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

C. Ruang Lingkup

RAN-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program atau kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta berbagai dokumen kebijakan terkait, seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Rencana Aksi Nasional Percepatan

Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal serta dokumen kebijakan lainnya yang relevan.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan pada penguatan sistem pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi gizi keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, dengan mempertimbangkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. RAN-PG Tahun 2026-2029 masih mencakup 4 (empat) tujuan strategis utama, yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim; serta 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor secara konvergensi dan terintegrasi serta prioritas bagi kelompok paling rentan segala bentuk masalah gizi. Dalam penyusunan RAN-PG Tahun 2026-2029, strategi dikembangkan tidak hanya menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

D. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAN-PG merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh K/L dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Beberapa penguatan dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan untuk mengintervensi *gap* dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran dan target RPJMN 2025-2029, RPJMD, dan TPB/SDGs. Selain itu, rencana aksi ini mengintegrasikan pendekatan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS), khususnya terhadap perempuan, pemuda, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan kerawanan pangan dan kegawatdaruratan.

Menimbang tujuan penyusunan dan posisi strategis RAN-PG, maka RAN-PG Tahun 2026-2029 disusun dengan tetap mempertahankan 4 (empat) tujuan strategis seperti periode sebelumnya dengan menambahkan penajaman pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini menegaskan orientasi baru dalam RAN-PG Tahun 2026-2029 yang lebih relevan dengan tantangan global dan nasional, yakni ketahanan pangan dan gizi di tengah perubahan iklim serta penguatan pangan lokal sebagai basis keberlanjutan sistem pangan Indonesia.

1. PUGIS dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagai wujud pelaksanaan mandat RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Dalam kedua dokumen perencanaan tersebut, PUGIS ditetapkan sebagai kaidah pelaksanaan dan strategi pembangunan, di mana perspektif gender dan inklusivitas terhadap perempuan, anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan mulai perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan, serta diintegrasikan dalam kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di seluruh sektor, termasuk sektor pangan dan gizi.

Dalam pembangunan pangan dan gizi, integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dilakukan untuk memastikan seluruh intervensi pangan dan gizi yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, inklusivitas dalam kebijakan dan intervensi pangan dan gizi terhadap anak juga untuk menjamin pemenuhan hak anak atas gizi yang layak, agar anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, perspektif gender dan inklusi sosial menjadi pendekatan yang digunakan dalam menyusun kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Dalam konteks RAN-PG Tahun 2026-2029, matriks strategi dan aksi serta indikator telah berupaya mengintegrasikan pendekatan ini.

2. Pengarusutamaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas dan masyarakat dengan kelompok ekonomi rendah. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, serta bencana alam menurunkan produksi dan kualitas pangan, mengganggu rantai pasok, dan menghambat akses terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam RAN-PG menjadi langkah strategis menuju ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

Aksi adaptasi dalam RAN-PG mencakup diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti umbi-umbian, sagu, dan tanaman tahan kekeringan, penguatan sistem peringatan dini bencana, serta pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan seperti pertanian cerdas iklim dan pengelolaan air yang efisien. Di sisi lain, akses terhadap pangan bergizi tetap menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan. Mitigasi perubahan iklim difokuskan pada pengurangan emisi melalui praktik pertanian rendah emisi, pengelolaan limbah pertanian dan pangan, serta konservasi lahan dan hutan. Edukasi publik tentang konsumsi pangan ramah lingkungan juga perlu diperkuat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Beberapa kementerian dan lembaga telah menjalankan program terkait, seperti Pertanian Cerdas Iklim oleh Kementerian Pertanian, *FOLU Net Sink 2030* oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Pengembangan Pangan Akuatik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Penerapan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian PPN/Bappenas memastikan integrasi aksi iklim dalam Pembangunan Berketahanan Iklim melalui RPJMN, sedangkan Badan Pangan Nasional mendorong cadangan pangan komunitas dan diversifikasi dan penganekaragaman pangan lokal.

Untuk keberhasilan implementasi, diperlukan sinergi antar kementerian, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta dukungan regulasi dan insentif bagi pelaku usaha. Pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam RAN-PG menjadi kunci membangun sistem pangan nasional yang tangguh, inklusif, dan

berkelanjutan demi masa depan gizi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pendekatan Regionalisasi dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi berbasis karakteristik wilayah, guna memastikan efektivitas intervensi pangan dan gizi yang lebih tepat sasaran.

Mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya, maka pendekatan berbasis ekoregion dan ketahanan pangan spesifik wilayah menjadi krusial dalam penyusunan kebijakan pangan dan gizi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekoregion yang merupakan kombinasi antara ekoregion darat dan lautan menjadi dasar pengembangan pangan lokal yang mengintegrasikan keanekaragaman hayati baik di bentang darat maupun pangan akuatik. Artinya, intervensi dikembangkan dari potensi pangan lokal yang-mempertimbangkan ketersediaan serta keberlanjutan bahan pangan spesifik daerah tersebut.

Selain itu, tingkat kerentanan gizi dan ketahanan pangan juga menjadi faktor penentu, terutama bagi wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap *Stunting*, *wasting*, maupun kekurangan zat gizi mikro, yang memerlukan pendekatan lebih intensif.

Lebih jauh, dampak perubahan iklim turut berperan dalam menentukan strategi intervensi, khususnya di wilayah dengan risiko tinggi terhadap perubahan iklim yang membutuhkan aksi adaptasi dalam produksi dan distribusi pangan. Kapasitas infrastruktur dan aksesibilitas menjadi aspek krusial dalam pendekatan regionalisasi, karena konektivitas antar wilayah dalam distribusi pangan harus dipertimbangkan agar sistem pangan lebih efisien dan merata, sehingga setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pangan yang bergizi dan berkualitas.

E. Metodologi Penentuan Tujuan Strategis, Strategi, dan Aksi

Perumusan tujuan strategis, strategi, dan aksi dalam RAN-PG Tahun 2026-2029 dilakukan melalui pendekatan berbasis regulasi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah RPJPN dan RPJMN, kebijakan nasional lintas sektor, serta analisis terhadap isu, tantangan, dan kesenjangan (*gap*) dalam pembangunan pangan dan gizi.

RAN-PG Tahun 2026-2029 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta konsumsi pangan dan gizi.

Selanjutnya, kerangka tersebut dijabarkan secara lebih operasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). Dalam KSPG ditegaskan bahwa kebijakan strategis pangan dan gizi mencakup 5 (lima) pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam merumuskan kerangka 4 (empat) tujuan strategis RAN-PG, yang mencerminkan pendekatan sistem pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Dalam kerangka 5 (lima) pilar tersebut, masing-masing pilar disederhanakan kembali menjadi 4 (empat) pilar utama dalam kerangka ketahanan pangan dan gizi dan dijabarkan lebih lanjut secara operasional sebagai dasar perumusan strategi RAN-PG. Penjabaran ini mencakup:

1. Upaya peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan, dan penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal;
2. Upaya peningkatan keterjangkauan pangan melalui efisiensi sistem pemasaran, penguatan sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan lainnya, pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan; penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan dan gizi serta penyediaan bantuan pangan bagi kelompok rentan;
3. Upaya pemanfaatan pangan dan perbaikan gizi melalui pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; peningkatan pengawasan keamanan pangan, pengembangan jejaring dan informasi gizi, perbaikan pola konsumsi pangan dan pengayaan gizi pangan tertentu, perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja dan kelompok rawan gizi lainnya, serta penguatan program gizi lintas sektor; serta
4. Upaya penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional dan daerah melalui penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten, pengembangan kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan.

Perumusan strategi tidak hanya mengacu pada kebijakan nasional di atas, tetapi juga didukung oleh analisis terhadap isu dan tantangan terkini, sehingga strategi yang dirumuskan mampu menutup dan melengkapi kesenjangan (*gap*) dalam perencanaan pembangunan pangan dan gizi. Analisis tersebut dilakukan melalui pemetaan keterkaitan antara isu strategis yang dihadapi saat ini, kesenjangan yang masih terjadi, hingga dapat merumuskan strategi dalam RAN-PG Tahun 2026-2029.

Berdasarkan analisis tersebut disusun 4 (empat) tujuan strategis dengan strateginya sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim
 - a. Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.
 - b. Pengayaan nilai gizi mikro sumber pangan biofortifikasi.
 - c. Penyediaan pangan yang aman dan bermutu.
 - d. Penurunan kehilangan hasil panen (*food loss*/susut pangan).
 - e. Pengelolaan CPP pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal.
2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim
 - a. Meningkatkan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana.
 - b. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan.
 - c. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.
 - d. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - e. Penguatan sistem informasi pasar dan harga pangan.
 - f. Penguatan distribusi dan sistem logistik pangan.
 - g. Penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim
 - a. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi.
 - b. Penguatan pemanfaatan akses air minum dan sanitasi aman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Ketahanan Gizi yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim.
 - c. Penyediaan air minum yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi.
 - d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan.
 - e. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.
 - f. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi di semua tingkat pelayanan kesehatan.
 - g. Pemberian ASI eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal.
 - h. Edukasi dan promosi pola konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim.
 - i. Peningkatan konsumsi protein (hewani dan nabati), vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan.
 - j. Pengendalian produk pangan tinggi gula, garam, lemak.
4. Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi Berbasis potensi sumber daya lokal yang Berketahanan Iklim
 - a. Penguatan Data Sistem Pangan dan Gizi.
 - b. Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah.
 - c. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah.
 - d. Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi.
 - e. Penguatan kebijakan dan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi yang berketahanan iklim.
 - f. Pengembangan platform penelitian di bidang pangan dan gizi yang berketahanan iklim.

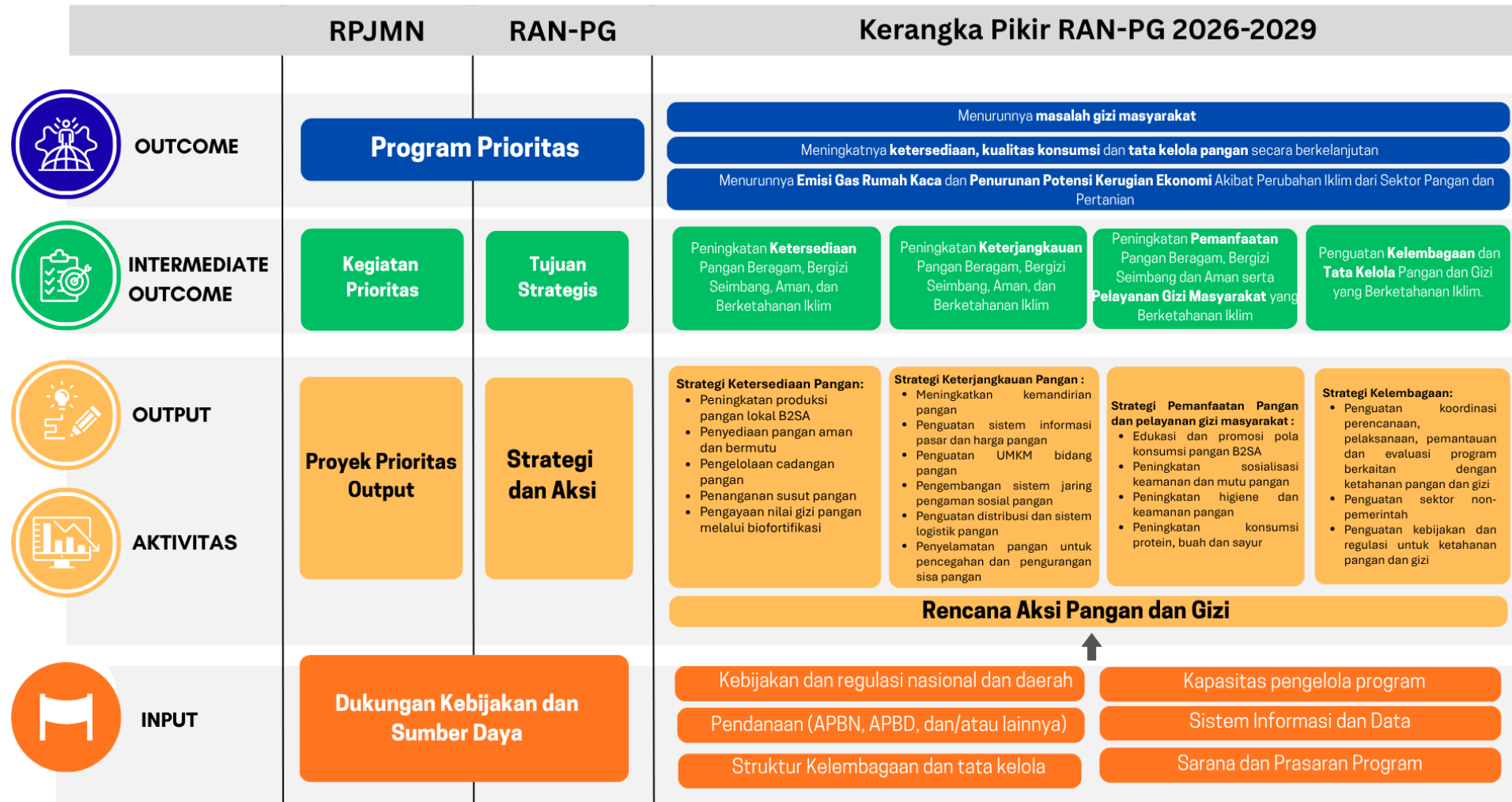
Setelah proses perumusan strategi, langkah selanjutnya adalah penjabaran strategi tersebut ke dalam aksi-aksi yang bersifat operasional dan implementatif. Perumusan aksi dilakukan dengan mengacu pada proyek prioritas serta kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP. Lebih lanjut, strategi dan aksi dalam RAN-PG tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan utama ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga menghasilkan manfaat ganda (*co-benefit*) yang signifikan, baik terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun terhadap perbaikan status gizi masyarakat seperti yang juga tercantum pada Lampiran III.

Proses perumusan aksi diperkuat melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan sinkronisasi

dengan Renstra masing-masing K/L, serta dilengkapi dengan masukan dari pakar dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, dirumuskan indikator kinerja dan indikator *output* yang relevan dan terukur, yang diampu oleh masing-masing K/L sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kerangka Pikir RAN-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana tersaji pada Gambar 26 menggambarkan keterkaitan antara RPJMN, RAN-PG, dan komponen logis dari input hingga *outcome* yang mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi berketahanan iklim. Pada tingkat *outcome*, RAN-PG Tahun 2026-2029 bertujuan untuk menurunkan masalah gizi masyarakat, meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan tata kelola pangan secara berkelanjutan, serta menurunkan emisi gas rumah kaca dan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dari sektor pangan dan pertanian. Capaian tersebut didukung oleh tujuan strategis (*intermediate outcome*) yang mencakup peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman (B2SA), dan berketahanan iklim, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.

Gambar 29. Kerangka Pikir RAN-PG Tahun 2026-2029



- F. Penentuan Strategi dan Aksi yang Responsif Terhadap Perubahan Iklim RAN-PG Tahun 2026-2029 disusun dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi terhadap perubahan iklim dan mengurangi risiko perubahan iklim, sehingga pemetaan sekaligus kategorisasi aksi turut didasarkan pada analisis dampak perubahan iklim terhadap kelima Sistem Utama. Aksi-aksi ini juga dikategorikan menjadi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang memiliki definisi operasional sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 5. Kategori jenis aksi adaptasi dan mitigasi dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran.

Tabel 5. Definisi Operasional Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Jenis Aksi	Penjabaran	Sumber
Adaptasi	Adaptasi merupakan proses penyesuaian pada sistem sosial, ekonomi, dan ekologi untuk meminimalkan dampak kerugian sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan iklim. Dalam pengembangannya, terdapat Pembangunan Berketahanan Iklim yang berarti kemampuan sistem perencanaan pembangunan nasional untuk bertahan, pulih, serta beradaptasi terhadap kondisi yang berubah dari dampak dan risiko perubahan iklim. Lebih lanjut, aksi Pembangunan Berketahanan Iklim adalah pengelolaan dampak dan risiko iklim yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekologi, serta mengurangi potensi kerugian ekonomi di lokasi prioritas terdampak perubahan iklim. Oleh karena itu, aksi adaptasi merupakan salah satu komponen yang mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim.	<i>Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2.0 (2025-2045)</i> (Bappenas, 2025)
Mitigasi	Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi. Dalam pengembangannya, terdapat Pembangunan Rendah Karbon yakni pembangunan yang memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor prioritas, sehingga dapat mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca menuju target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Oleh karena itu, aksi mitigasi turut mendukung Pembangunan Rendah Karbon.	Perpres No. 110/2025 dan <i>Naskah Kebijakan Strategi dan Penahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJPN 2025–2045: Upaya Mencapai Net Zero Emissions</i> (Bappenas, 2025)

1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sistem Utama Antara Perubahan Iklim dan Gizi

Pada Gambar 2 dalam Bab 1 yang mengilustrasikan keterkaitan pangan, gizi, dan iklim, dijelaskan bahwa sistem pangan dan gizi beririsan dengan sistem lingkungan, sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem air. Irisan antar-sistem ini menunjukkan bahwa sistem-sistem yang ada saling mendukung operasionalisasi satu sama lain demi tercapainya ketahanan pangan dan gizi. Misalnya, untuk mengoptimalkan ketersediaan pangan, diperlukan ekosistem air dan irigasi yang berfungsi baik (sistem air) serta tanah yang subur dan tidak tercemar (sistem lingkungan) guna mendukung kegiatan pertanian sebagai bagian dari produksi pangan (sistem pangan dan gizi).

Oleh karena itu, untuk memastikan terlaksananya Sistem Utama yang berketahanan iklim dan terlaksananya ketahanan pangan dan gizi, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Dalam RAN-PG Tahun 2026-2029, untuk melengkapi metodologi yang telah dijabarkan, strategi dan aksi dirumuskan berdasarkan irisan antara sistem pangan dan gizi dengan Sistem Utama lainnya.

Masing-masing Sistem Utama memiliki aspek-aspek kunci dan definisi operasional yang penting diketahui untuk memahami landasan pemetaan dan kategorisasi aksi. Selain mengacu pada KSPG, aspek-aspek ini mengadopsi kerangka pikir FAO-ICAN dalam dokumen *Climate Action and Nutrition: Pathways to Impact* dan FAO dalam *The State of Food Security and Nutrition in the World (2021)*. Aspek kunci dan definisi operasional dijabarkan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Definisi Operasional Sistem Utama Antara Perubahan Iklim dan Gizi

Sistem pangan dan gizi	Produksi	Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
	Distribusi	Kegiatan penyaluran pangan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Indonesia agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
	Konsumsi	Pola dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan, termasuk untuk memenuhi kecukupan gizi, keberagaman pangan, dan keamanan pangan.
	Susut dan Sisa Pangan	Susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah, serta pangan tidak layak yang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.
Sistem Lingkungan Hidup	Udara	Merujuk pada udara ambien yang merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
	Laut	Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
	Air	Air dalam hal ini merujuk pada Air Permukaan, yakni air yang terdapat pada permukaan tanah seperti sungai, danau, waduk, dan Air Tanah, yakni air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

	Tanah	Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, atau permukaan bumi yang terbatas yang ditempati oleh manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
	Daratan	Daratan yang dimaksud mencakup hutan dan lahan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
Sistem Kesehatan	Layanan primer	Program layanan kesehatan yang diberikan di tingkat pertama (primer), mencakup upaya promotif dan preventif yang terintegrasi dalam siklus hidup, dengan fokus pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar yang dekat dengan masyarakat.
	Layanan sekunder	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan melalui pembangunan rumah sakit berkualitas, penguatan sistem rujukan berbasis kompetensi, dan penyediaan pelayanan penyakit prioritas yang terintegrasi.
	Ketahanan Sistem Kesehatan	Upaya untuk memperkuat kemampuan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, termasuk kemandirian peralatan dan obat-obatan, pengawasan makanan, dan respons kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk karena perubahan iklim.
	Pembiayaan dan Tata Kelola Kesehatan	Peningkatan efektivitas tata kelola dan mekanisme pembiayaan kesehatan melalui transparansi, akuntabilitas, kemitraan global-domestik, serta penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan kesehatan universal.
	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengelolaan SDM kesehatan secara terencana dan merata, mencakup perencanaan, pelatihan, distribusi, dan retensi tenaga kesehatan agar sesuai kebutuhan layanan di berbagai tingkatan.
	Teknologi Kesehatan	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan serta sistem data digital untuk mendukung efisiensi,

		inovasi, dan ketepatan pelayanan kesehatan, termasuk riset dan inovasi berbasis teknologi mutakhir.
Sistem Perlindungan Sosial	Penyaluran dan Pelaksanaan Program	Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program telah diarahkan secara tepat guna untuk kelompok populasi yang berbeda, dengan kerentanan dan penghidupan yang berbeda.
	Pengaturan Kelembagaan dan Tata Kelola	Koordinasi antar sektor dan tersedianya institusi, peraturan, dan strategi perlindungan sosial yang utamanya mencakup kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
	Informasi dan Data	Ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi dan data untuk mendukung perlindungan sosial yang adaptif.
	Penganggaran	Kegiatan untuk mengalokasikan anggaran dan distribusi sumber daya untuk program perlindungan sosial.
Sistem Air	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
	Air untuk Keperluan <i>Higiene</i> dan Sanitasi	Air yang digunakan untuk keperluan <i>higiene</i> perorangan dan/atau rumah tangga.
	Air untuk Irigasi	Volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Aspek-aspek ini membantu untuk melihat dampak perubahan iklim terhadap keberlangsungan suatu kegiatan secara spesifik dalam sebuah sistem. Dampak dari perubahan iklim ini dapat dilihat pertama-tama dari parameter-parameter seperti peningkatan suhu di laut, pengasaman air laut, dan gelombang tinggi, yang memengaruhi penghidupan di lautan atau pesisir; peningkatan suhu udara dan kejadian cuaca ekstrem, yang terjadi di atmosfer, dan; kekeringan dan banjir yang berpengaruh pada aktivitas di daratan.

Pada Diagram Dampak Perubahan Iklim terhadap Pilar Ketahanan Pangan (Gambar 3) digambarkan dampak perubahan iklim terhadap kelima Sistem Utama yang memastikan ketahanan pangan dan gizi. Dampak ini saling terkait; keterkaitannya ditunjukkan oleh anak panah yang menghubungkan bukan hanya aspek dalam satu sistem, tetapi juga satu sistem dengan sistem lainnya. Panah hitam menunjukkan hubungan antar sistem, sementara panah biru mengilustrasikan hubungan antar aspek di dalam sistem yang sama.

Diagram ini dikategorisasi berdasarkan 3 (tiga) Pilar Ketahanan Pangan. Diagram ini memberikan gambaran dan acuan dalam pemilihan strategi dan aksi dari adaptasi ketahanan pangan dan gizi terhadap perubahan iklim.

a. Pilar 1: Ketersediaan Pangan

Perubahan iklim yang semakin ekstrem menimbulkan tantangan besar bagi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pangan. Dari sisi kuantitas, peningkatan suhu udara dapat menurunkan hasil produksi tanaman pangan. Dampak ini semakin diperparah oleh gangguan pada sistem air, di mana kekeringan dan perubahan pola curah hujan menyebabkan aliran irigasi terganggu — debit air menurun atau berlebih — yang dapat menyebabkan produktivitas pertanian. Kondisi serupa juga terjadi pada subsektor peternakan, di mana suhu tinggi memengaruhi pertumbuhan unggas, menurunkan produksi telur, serta memengaruhi kualitas daging. Pada sektor pangan akuatik (*blue food*), pengasaman dan kenaikan suhu air laut turut menurunkan ketersediaan ikan dan komoditas perikanan lainnya.

Selain kuantitas, perubahan iklim juga memengaruhi kualitas pangan. Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer terbukti menurunkan kandungan protein dan zat gizi mikro pada tanaman pangan pokok seperti beras, gandum, dan kentang. Kandungan zat besi (Fe) dan zink (Zn) turut berkurang akibat adanya peningkatan CO₂ di atmosfer, demikian pula asam lemak omega-3 dan omega-6 pada beberapa jenis kacang-kacangan. Padahal, zat gizi ini penting untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penyimpanan dan pengolahan. Suhu yang meningkat, curah hujan ekstrem, serta tingginya kelembaban mengubah pola perkembangan patogen seperti virus dan bakteri sehingga mempercepat pembusukan. Risiko berkembangnya organisme penghasil toksin pun meningkat, sehingga mutu dan keamanan pangan menurun. Kondisi ini juga berkontribusi pada susut pangan (*food loss*), yang dipicu oleh degradasi produk pangan akibat suhu tinggi, kelembaban ekstrem, dan cuaca tidak menentu. Meskipun penyebab timbulnya *food loss* bersifat teknis, perubahan iklim memperburuk risiko tersebut, sehingga semakin menimbulkan gangguan pada kuantitas dan keamanan pangan.

Akhirnya, penurunan produksi yang bersumber dari perubahan iklim juga berdampak pada harga pangan. Kemudian, ketika ketersediaan menurun, biaya pangan meningkat, daya beli masyarakat melemah, konsumsi kalori berpotensi menurun. Kondisi ini tidak hanya menurunkan asupan energi, tetapi juga memperburuk kualitas pola makan karena berkurangnya akses terhadap sumber-sumber zat gizi mikro yang penting.

b. Pilar 2: Keterjangkauan dan Akses terhadap Pangan

Dampak perubahan iklim pada produksi pangan kemudian berlanjut ke pilar keterjangkauan dan akses. Penurunan hasil panen, gangguan pada penghidupan petani, dan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk membeli pangan mempersempit akses terhadap pangan, terutama bagi

kelompok miskin. Rumah tangga berpendapatan rendah lebih rentan terhadap guncangan iklim karena pendapatan yang terbatas, aset yang minim, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Risiko iklim bahkan diproyeksikan mendorong hingga 100 (seratus) juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2016-2030, sehingga menambah beban sistem perlindungan sosial yang perlu semakin adaptif terhadap iklim untuk memperluas cakupan dan jangkauan.

Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan gangguan distribusi pangan, baik dengan adanya cuaca ekstrem maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Ketika infrastruktur transportasi terganggu, rantai pasok tidak berfungsi optimal. Gangguan ini, bersamaan dengan turunnya produksi pada pilar ketersediaan, menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Hambatan logistik meningkatkan biaya distribusi, sehingga harga pangan semakin tidak terjangkau bagi kelompok rentan.

Ketidakstabilan harga ini diperburuk oleh meningkatnya biaya kebutuhan lain akibat perubahan iklim, seperti air bersih, energi, dan layanan kesehatan. Dengan pengeluaran yang semakin besar, daya beli masyarakat melemah, dan akses terhadap pangan bergizi dapat bertambah sulit.

Dampak perubahan iklim juga disebabkan oleh tingginya timbunan sisa pangan yang terbuang. Sisa pangan yang berpotensi terbuang, khususnya pangan yang layak dan aman masih dapat diselamatkan untuk disalurkan kepada masyarakat rentan rawan pangan. Upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan perlu menjadi salah satu kegiatan prioritas.

c. Pilar 3: Pemanfaatan Pangan

Pilar pemanfaatan pangan berhubungan erat dengan dua pilar sebelumnya karena pola konsumsi dan status gizi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan serta akses pangan. Penurunan kuantitas dan kualitas pangan pada pilar ketersediaan berdampak langsung pada kecukupan asupan gizi yang diterima tubuh, sementara penurunan kualitas nutrisi dalam buah-buahan atau sayur-sayuran membuat makanan tidak lagi menyediakan gizi sesuai kebutuhan tubuh.

Gangguan pada akses dan keterjangkauan pangan memperburuk hal tersebut. Harga pangan yang meningkat dan terganggunya distribusi mendorong rumah tangga, terutama yang miskin, beralih ke opsi makanan murah yang tinggi gula, garam, dan lemak atau tinggi kalori tetapi rendah zat gizi. Pola konsumsi ini meningkatkan risiko obesitas serta Penyakit Tidak Menular (PTM) di seluruh siklus hidup, yang pada gilirannya dapat memperburuk malnutrisi akibat inflamasi, penurunan nafsu makan, dan meningkatnya kebutuhan gizi selama sakit.

Dalam konteks pemanfaatan pangan, perubahan iklim juga memengaruhi akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kekeringan mengurangi ketersediaan air bersih, sementara banjir meningkatkan pencemaran sumber air. Kondisi ini menghambat akses masyarakat terhadap air minum aman serta praktik sanitasi dan higiene yang layak. Kerusakan infrastruktur sanitasi memperburuk penyebaran penyakit,

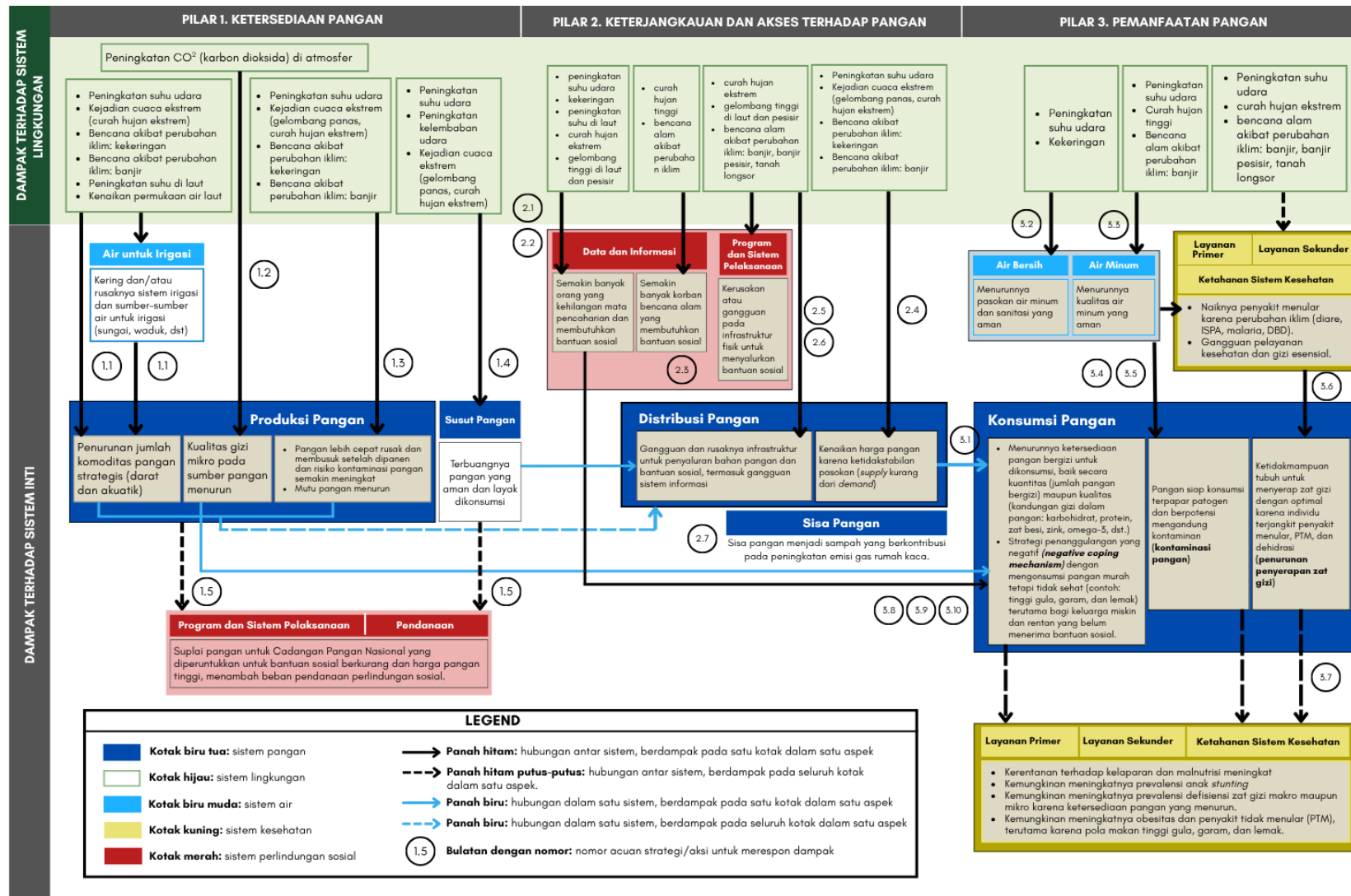
terutama pada anak balita, sehingga meningkatkan risiko *Stunting* dan defisiensi mikronutrien.

Perubahan iklim juga meningkatkan risiko kontaminasi pangan, terutama pada makanan olahan atau siap saji, karena beberapa patogen berkembang lebih cepat pada suhu yang lebih hangat dan curah hujan ekstrem.

Pada saat yang sama, perubahan iklim juga meningkatkan beban penyakit melalui penyebaran penyakit vektor (seperti malaria dan DBD), penyakit yang ditularkan lewat air dan makanan (seperti diare), penyakit zoonosis, hingga gangguan kesehatan mental. Individu yang mengidap penyakit akan meningkat kebutuhan energi dan zat gizi untuk penyembuhan dan pemulihan, namun secara bersamaan mengurangi nafsu makan dan menyulitkan penyerapan gizi.

Tidak hanya itu, perubahan iklim juga berdampak pada pelayanan kesehatan. Bencana alam dan cuaca ekstrem dapat secara langsung mengganggu operasional fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan preventif dan kuratif terkait gizi terganggu. Pemantauan gizi pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita pun menjadi tidak optimal.

Terakhir, Susut dan Sisa Pangan (SSP) turut berpengaruh pada pemanfaatan. Meskipun sisa pangan di tingkat konsumsi tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan iklim, makanan yang terbuang sebagai limbah pangan menghasilkan emisi metana yang dapat memperparah krisis iklim. Selain itu, terbuangnya pangan bergizi seperti buah dan sayuran berarti hilangnya peluang masyarakat memperoleh asupan vitamin, mineral, dan protein yang esensial.



Gambar 30. Diagram Dampak Perubahan Iklim terhadap Pilar Ketahanan Pangan

2. Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Mengurangi Risiko Perubahan Iklim

Telah dijelaskan bahwa sistem pangan dan gizi dan 4 (empat) sistem utama lainnya juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, sistem pangan dan gizi tidak hanya menjadi sektor yang terdampak, tetapi juga memiliki peran strategis untuk mengurangi risiko perubahan iklim melalui aksi-aksi mitigasi. RAN-PG Tahun 2026-2029 mengintegrasikan aksi-aksi yang berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan dan gizi sekaligus mengurangi risiko perubahan iklim. Pendekatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama ketahanan pangan dan gizi, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

G. Pengorganisasian

1. Pemerintah Pusat

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi sebagaimana dilaksanakan oleh K/L terkait dan dikoordinasikan serta ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dengan mempertimbangkan isu pangan dan gizi yang bersifat multisektoral. Pada periode RAN-PG Tahun 2026-2029 akan melibatkan lintas K/L dalam pelaksanaannya.

Strategi pengorganisasian K/L antar sektor dalam penyelenggaraan RAN-PG yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa strategi kunci:

- a. Setiap K/L memiliki peran spesifik dalam mendukung RAN-PG, hal ini tercantum dalam matriks penajaman aksi RAN-PG dalam Lampiran I yang mengidentifikasikan setiap aksi dan indikator memiliki K/L penanggung jawabnya masing-masing.
- b. Untuk mendukung implementasi yang lebih efektif, aksi dan indikator dalam RAN-PG perlu diintegrasikan dalam perencanaan strategis K/L. Pengalokasian anggaran juga perlu diselaraskan melalui mekanisme pendanaan bersama atau skema pendanaan berbasis kinerja.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk forum koordinasi lintas sektor untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Forum ini dapat memanfaatkan mekanisme koordinasi yang telah ada, seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, atau dapat membentuk forum baru yang lebih fokus dan berdaya guna. Forum ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan daerah, dengan keanggotaan dari seluruh perangkat daerah terkait serta perwakilan sektor non-pemerintah.

Dalam implementasinya, forum ini perlu diperkuat dengan sistem koordinasi yang lebih adaptif dan berbasis data untuk memastikan efektivitas program. Keterlibatan sektor non-pemerintah, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media, dan masyarakat sipil, menjadi krusial dalam mendukung inovasi dan mobilisasi sumber daya. Selain itu, diperlukan mekanisme integrasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan

RKPD) serta skema pendanaan yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja. Pedoman teknis mengenai pengorganisasian forum koordinasi ini, termasuk mekanisme operasionalisasi, akuntabilitas, serta integrasi strategi ketahanan pangan dengan upaya penanggulangan perubahan iklim, akan diatur dalam Pedoman Penyusunan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

H. Peran Sektor Non-Pemerintah

Sektor non-pemerintah, termasuk dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa, serta kelompok masyarakat madani lainnya, memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bentuk keterlibatan sektor non-pemerintah dapat diwujudkan melalui berbagai kolaborasi dan inisiatif berikut:

1. Sektor nonpemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan masukan berbasis data dan pengalaman lapangan untuk penyusunan dokumen RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di tingkat provinsi maupun pendampingan penyusunan di kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan riset, analisis kebijakan, serta dokumentasi praktik baik yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan pangan dan gizi yang lebih efektif dan berbasis bukti.
3. Advokasi kebijakan, kampanye publik, sosialisasi, serta komunikasi interpersonal dengan memperhatikan kearifan lokal dan konteks sosial masyarakat guna meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku terkait pangan dan gizi.
4. Sektor non-pemerintah dapat mendukung pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program, serta memberikan asistensi teknis dalam penyusunan dan implementasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Masyarakat sipil dan kelompok pemangku kepentingan lainnya dapat berperan dalam melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal secara independen sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta menyebarluaskan hasil evaluasi kepada publik dan pemangku kebijakan.
6. Sektor nonpemerintah dapat mendorong inovasi, uji coba (*piloting*), serta penerapan praktik baik berbasis kearifan lokal guna memperkuat implementasi RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan di lapangan.

I. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aksi penajaman dalam RAN-PG serta RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dilakukan oleh pemerintah pusat melalui berbagai mekanisme, seperti pelaporan, pertemuan rutin, supervisi lapangan, serta pemanfaatan data dari survei dan riset nasional. Ruang lingkup dari kegiatan pemantauan tahunan adalah capaian indikator aksi, kendala, rencana tindak lanjut dan rekomendasi, sedangkan ruang lingkup dari kegiatan evaluasi pada akhir periode RAN-PG Tahun 2026-2029 adalah capaian indikator *intermediate*

outcome, kendala, rencana tindak lanjut dan rekomendasi. Adapun ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Setiap K/L teknis bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi aksi dalam RAN-PG secara mandiri, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam mengkoordinasikan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh K/L teknis, termasuk mengadakan pertemuan rutin untuk meninjau kemajuan pelaksanaan RAN-PG.
3. Rincian teknis mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi RAN-PG yang dilakukan di tingkat kementerian/lembaga (waktu pelaksanaan, mekanisme umpan balik dan tindak lanjut, dan lain-lain) dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk teknis terkait perencanaan, pemantauan dan evaluasi
4. Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal melalui pertemuan regional berkala. Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau capaian implementasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan diadakan minimal 1 (satu) kali pada akhir tahun. Pertemuan ini dapat melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan K/L teknis terkait.
5. Rincian teknis mengenai pemantauan dan evaluasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang dilakukan di tingkat daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Penyusunan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

J. Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Pelaksanaan RAN-PG Tahun 2026-2029 memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat dan terkoordinasi. Meskipun RAN-PG tidak memiliki alokasi anggaran khusus di dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, pendanaan tetap menjadi aspek fundamental untuk menjamin kelangsungan dan efektivitas pelaksanaan program pangan dan gizi lintas sektor. Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan RAN-PG dan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dapat bersumber dari:

1. Pendanaan dari APBN dan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui:

- a. Program dan kegiatan di berbagai K/L yang terkait langsung dengan isu pangan dan gizi, baik dalam bentuk belanja rutin maupun belanja program prioritas.
- b. Dana transfer ke daerah dan dana desa, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan terkait pangan dan gizi di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui: perencanaan dan penganggaran yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD, termasuk penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

2. Pendanaan Non-APBN dan Non-APBD

Pendanaan pelaksanaan RAN-PG juga dapat diperkuat melalui sumber-sumber pendanaan alternatif, antara lain:

- a. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- b. *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. Dana hibah dari donor dan mitra pembangunan internasional.

- d. Partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, baik dalam bentuk kontribusi langsung, program kemitraan, maupun inisiatif lokal berbasis komunitas.
3. Pendanaan inovatif lainnya.
Sebagai upaya meningkatkan efektivitas implementasi, Kementerian PPN/Bappenas akan berperan dalam mengkoordinasikan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi aksi penajaman yang dilakukan oleh K/L teknis dan pemerintah daerah. Mobilisasi sumber daya akan difokuskan pada instansi yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan aksi, dengan keterlibatan sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan dalam mendukung pembiayaan dan implementasi program.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan memastikan bahwa kebijakan dan regulasi terkait RAN-PG dapat diadopsi dalam kebijakan daerah melalui penyusunan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Dalam proses ini, mekanisme pembinaan dan pengawasan akan ditingkatkan guna memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, sehingga implementasi RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional di sektor pangan dan gizi.

BAB IV PENUTUP

- a. RAN-PG Tahun 2026-2029 disusun secara bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Dokumen ini merupakan operasionalisasi arah kebijakan ketahanan pangan dan gizi yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, dengan mengintegrasikan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, transformasi sistem pangan dan percepatan penganekaragaman pangan lokal serta kebijakan pangan dan gizi lainnya baik di pusat maupun daerah.
- c. RAN-PG menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, termasuk dalam percepatan konvergensi penurunan *Stunting*.
- d. RAN-PG Tahun 2026-2029 menetapkan 4 (empat) tujuan strategis, yaitu:
 - 1) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, bergizi seimbang, aman, dan berketahanan iklim;
 - 2) Peningkatan keterjangkauan pangan beragam, bergizi seimbang, aman, dan berketahanan iklim;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman serta pelayanan gizi masyarakat yang berketahanan iklim; dan
 - 4) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi yang berketahanan iklim.
- e. Pemantauan dilakukan 1 (satu kali) setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan evaluasi RAN-PG dilakukan terhadap *intermediate outcome* dan *outcome* pada akhir periode RAN-PG Tahun 2026-2029.
- f. Pemanfaatan RAN-PG diharapkan tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mitra non-pemerintah dan lintas sektor, serta menjadi acuan dalam penyusunan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal oleh pemerintah daerah.

Lampiran I Matriks Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2026-2029

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
1.1	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	1.1.1 Meningkatkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk mendukung swasembada pangan dengan tata kelola dan bentang berkelanjutan	Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	Ton	567,178	2,369,701	• Indeks Ketahanan Pangan (2029): 82 • Produksi padi (2029): 56,05 juta ton • Produksi jagung (2029): 25,89 juta ton • Produksi buah dan sayur (2029) : 35,47 juta ton	Kementan	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, KLH, KemenPU
			Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	Ton	2,082,836	3,240,081	• Produksi sorghum (2029): 18,95 ribu ton	Kementan	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, KLH, KemenPU
			Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton	198,061	238,020	• Produksi ubi jalar (2029): 1,707,902 ton • Produksi sagu (2029): 478,451 ton	Kementan	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, KLH, KemenPU

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
			Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton	413,033	181,038	• Produksi ubi kayu (2029): 18,330,731 ton • Produksi ubi kayu (2029) : 18,330,731 Ton • Produksi kedelai (2029): 416,842 ton	Kementan	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, KLH, KemenPU
			Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	Ton	3,266	12,393		Kementan	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, KLH, KemenPU
			Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	Ton	N/A	3,719,000		Kementan	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, KLH, KemenPU
			Jumlah unit tambak budidaya ikan air payau yang direvitalisasi	Unit	N/A	4	• Volume produksi ikan budidaya (2029): 8.52 juta ton • Volume produksi perikanan tangkap (2029): 7.50 juta ton	KKP	Kemenko Pangan, Bapanas, Kemendagri, Kemendesa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		1.1.2 Mengoptimalkan sistem pangan lokal dengan upaya pemanfaatan lahan pekarangan	Jumlah pekarangan hortikultura	Kelompok Masyarakat	13.917	20.000	Skor Pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan: 98	Kementan	Bapanas, Kemendagri, KLH, Kemendesa
		1.1.3 Meningkatkan produksi pangan lokal yang berketahanan iklim dan berbasis ekoregion.	Produksi Padi	Juta Ton	60,21	56,05	• Produksi sorghum (2029): 18,95 ribu ton • Produksi ubi jalar (2029): 1.707,902 ton • Produksi sagu (2029): 478,451 ton • Produksi ubi kayu (2029): 18.330,731 ribu ton • Produksi kedelai (2029): 416,842 ton • Produksi padi (2029): 56,05 juta ton	Kementan	Bapanas, KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Produksi Jagung	Juta Ton	21,86	25,89		Kementan	Bapanas, KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Produksi Sorghum	Ribu Ton	3,43	18,95		Kementan	Bapanas, KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Produksi Ubi jalar	Ton	1.271,815	1.707,902		Kementan	Bapanas, KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Produksi Kedelai	Ton	78,69	416,842		Kementan	Bapanas,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
							Produksi jagung (2029): 25,89 juta ton		KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Produksi Ubi Kayu	Ribu Ton	14.647,72	18.330,73		Kementan	Bapanas, KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Produksi Sagu	Ton	402,887	478,45		Kementan	Bapanas, KLH, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
		1.1.4 Mengembangkan kampung perikanan budidaya secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi	Jumlah kampung budidaya payau	unit air	Unit	N/A	- Volume produksi ikan budidaya (2029): 8,52 juta ton - Volume produksi perikanan tangkap (2029): 7,50 juta ton	KKP	Bapanas, Kemendesa, Kemendagri
			Jumlah kampung budidaya tawar	unit air	Unit	N/A		KKP	Bapanas, Kemendesa, Kemendagri
			Jumlah kampung budidaya air laut	unit	Unit	N/A		KKP	Bapanas, Kemendesa, Kemendagri
			Jumlah kampung	unit	Unit	N/A		KKP	Bapanas, Kemendesa, Kemendagri

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
			budidaya rumput laut						
			Jumlah Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun	Unit	N/A	4		KKP	Bapanas, Kemendesa, Kemendagri
		1.1.5 Meningkatkan produksi pangan akuatik budidaya sesuai dengan karakteristik ekoregion.	Jumlah produksi budidaya perairan terbuka (<i>water-based aquaculture</i>) di wilayah yang memiliki badan air laut (teluk, selat, perairan karang) serta badan air darat (danau, waduk, situ).	Ton	Bandeng: 948.784	Bandeng: 1.154.000		KKP	Bapanas, Kemendagri, Kemendesa
					Rumput Laut: 11.654.296	Rumput Laut: 14.140.000			
					Kerapu: 16.062	Kerapu: 24.000			
					Udang: 320.415	Udang: 1.689.000			
			Jumlah produksi pangan akuatik dari budidaya perairan darat (<i>land-based aquaculture</i>) di seluruh wilayah daratan Indonesia.	Ton	Gurame: 200.470	(2029): Gurame: 261.000		KKP	Bapanas, Kemendagri, Kemendesa
					Patin: 456.311	Patin: 387.000			
					Lele: 1.212.627	Lele: 1.640.000			
					Nila: 1.679.393	Nila: 2.019.000			

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		1.1.6 Meningkatkan produksi pangan hewani, pangan lokal dan nabati termasuk pangan yang terabaikan dan kurang dimanfaatkan.			Ikan Mas: 580.919	Ikan Mas: 769.000			
					Kakap: 8.768	Kakap: 16.000			
			Produksi Daging (Sapi dan kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik)	Juta ton	5,04	5,60	• Produksi daging (Sapi dan kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik) (2029): 5,60 juta ton • Produksi telur (2029): 8,79 juta ton • Produksi susu (2029): 943,64 ribu ton	Kementan	Bapanas, Kemendagri, Kemendesa
			Produksi Telur	Juta ton	6,90	8,79			
			Produksi Susu	Ribu ton	820,87	943,64			
			Produksi Buah dan Sayur	Juta Ton	31,19	35,47	Produksi buah dan sayur (2029): 35.47 juta ton	Kementan	Bapanas, Kemendagri, Kemendesa
			Produksi Tanaman Obat	Ribu Ton	452,41	540,193			
			Jumlah purwarupa dari penelitian terkait pangan nabati yang terabaikan dan kurang dimanfaatkan	Purwarupa	3	10	Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati (2029): 180 inovasi	BRIN	Bapanas, Kementan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
			Jumlah kekayaan intelektual dari penelitian terkait pangan nabati yang terabaikan dan kurang dimanfaatkan	Kekayaan Intelektual	1	16		BRIN	Bapanas, Kementan
			Jumlah purwarupa dari hasil riset terkait tanaman eksotis dan spesies hewan yang dapat dikonsumsi	Purwarupa	3	Tanaman Holtikultura : 2		BRIN	Bapanas, Kementan
						Ikan : 2		BRIN	Bapanas, Kementan
			Jumlah kekayaan intelektual dari hasil riset terkait tanaman eksotis dan spesies hewan yang dapat dikonsumsi	Kekayaan Intelektual	3	Tanaman Holtikultura : 2		BRIN	Bapanas, Kementan
						Ikan : 2		BRIN	Bapanas, Kementan
			Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari	Ton	N/A	40.000	Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan,	Kemenhut	Bapanas, Kemenko Pangan, KLH

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
			Kelompok Tani Hutan				umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong) (2029) : 650.000 ton		
			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang menghasilkan produk hasil hutan melalui pola agroforestri dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	Kelompok Masyarakat	820	7.936		Kemenhut	Bapanas, Kemenko Pangan, KLH
		1.1.7 Meningkatkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK	Hektar	80.000	450.000	Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong) (2029) : 650.000 ton	Kemenhut	Kemenko Pangan
			Luas pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara optimal areal perhutanan sosial	Hektar	139.107,02	1.100.000		Kemenhut	Kemenko Pangan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		1.1.8 Mengoptimalkan peran perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan lokal dan gizi keluarga.	1) Pekarangan Ubi Jalar	Kelompok Masyarakat	1.500	1,736	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (2029) : 96	Kementan	KemenPPPA, Bapanas
			2) Pekarangan Hortikultura	Kelompok Masyarakat	13.9 17	20. 000		Kementan	KemenPPPA, Bapanas
		1.1.9 Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan irigasi	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	Persen	61,69	62.37	Indeks Ketahanan Pangan (2029): 82	KemenPU	Kementan
			Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Persen	15,62	16.57		KemenPU	Kementan
		1.1.10 Meningkatkan pengembangan bibit dan benih pangan lokal padat gizi yang rendah emisi dan	Jumlah purwarupa yang dihasilkan dari penelitian untuk mengembangkan bibit dan benih	Purwarupa	7	Tanaman Pangan: 23	• Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2029):	BRIN	Kementan, Bapanas
						Ternak: 12			
						Ikan: 7			

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		tahan terhadap perubahan iklim.	pangan lokal padat gizi yang rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim				30 varietas/galur • Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2029): 4.800 akses		
			Jumlah kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian untuk mengembangkan bibit dan benih pangan lokal padat gizi yang rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim	Kekayaan Intelektual	2	Tanaman Pangan: 44 Ternak: 12 Ikan: 14		BRIN	Kementan, Bapanas
		1.1.11 Meningkatkan pengembangan dan implementasi sistem pertanian ramah iklim termasuk <i>smart farming</i> .	Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modem dalam penyiapan PSP, budidaya. pasca panen, pengolahan, dan	Persen	42,26	30	Reduksi emisi GRK sektor pertanian (2029): 8.94 juta ton CO ₂ -Eq	Kementan	KLH, Bapanas, BMKG

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
			pemasaran hasil pertanian						
			Kapasitas penyimpanan air di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara efisien untuk pertanian, air bersih dan air minum	m ³ /kapita	59,59	63.54	Kapasitas tampungan air (2029): 63.54 m ³ /kapita	Kemen PU	Kementan, KLH, BMKG, Kemenhut
1.2	Pengayaan nilai gizi mikro sumber pangan biofortifikasi	1.2.1 Mengembangkan budidaya padi biofortifikasi dengan berbagai zat gizi mikro	Kawasan padi biofortifikasi	Hektar	64.450	100.000	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan (2029): 100%	Kementan	Bapanas, Bulog, Kemensos
		1.2.2 Mengembangkan biofortifikasi berbagai zat gizi mikro pada komoditas pangan strategis untuk meningkatkan nilai gizi dan	Jumlah purwarupa hasil riset komoditas biofortifikasi (jagung, ubi jalar, gandum, sorghum, kacang-kacangan)	Purwarupa	2	15		BRIN	Kementan, Bapanas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		ketahanan pangan.	Jumlah kekayaan intelektual hasil riset komoditas biofortifikasi (jagung, ubi jalar, gandum, sorghum, kacang-kacangan)	Kekayaan Intelektual	N/A	30		BRIN	Kementan, Bapanas
1.3	Penyediaan pangan yang aman dan bermutu	1.3.1 Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar <i>pre dan post market</i> .	Presentasi produk pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen	N/A	92	Indeks keamanan pangan segar (2029): 65	Bapanas	Kementan, BPOM, Kemendag, Kemenko PMK
			Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	Persen	N/A	3,0		Bapanas	Kementan, BPOM, Kemendag, Kemenko PMK
		1.3.2 Meningkatkan kelembagaan keamanan dan mutu pangan	Jumlah provinsi yang memiliki lembaga keamanan dan mutu pangan	Provinsi	N/A	34		Bapanas	BPOM, Kemendagri

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		yang terstandarisasi	provinsi yang terstandarisasi						
		1.3.3 Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka pangan hewani	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	Persen	N/A	100	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (2029): 100%	Kementan	BPOM
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i> /susut pangan)	1.4.1 Meningkatkan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan dan penerapan <i>Good Handling Practice</i> (GHP) untuk meminimalkan kehilangan hasil panen.	Kelompok Tani Terlatih GHP	Kelompok Masyarakat	N/A	100	- Persentase penurunan susut pangan (2029): 3-5% - Reduksi emisi GRK sektor pertanian (2029): 8.94 juta ton CO₂-Eq	Kementan	KLH, Kemendag
		1.4.2 Meningkatkan penyediaan teknologi di sektor pertanian/peternakan/perik	Persentase penurunan susut pangan	Persen	0,46	3		Kementan	Bapanas, BRIN

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		anan untuk menekan <i>food loss</i> pada proses produksi hingga distribusi							
1.5	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal	1.5.1 Memastikan pengelolaan (pengadaan, pemeliharaan, monitoring) Cadangan Pangan Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota cukup tersedia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga sepanjang tahun dalam menghadapi risiko krisis dampak bencana dan perubahan iklim.	Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah	Juta Ton	N/A	3-3.5	- Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras (2029): 3-3.5 juta ton - Inflasi harga bergejolak (2029): 3-5%	Bapanas	BULOG, Kementan, Kemendagri, Bappenas
		1.5.2 Memperkuat kelembagaan distribusi dan cadangan pangan masyarakat	Jumlah provinsi yang memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Provinsi	N/A	38		Bapanas	Kementan, KKP, Kemendag

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L Terkait
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim									
		berbasis sumber daya dan kearifan lokal							

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
2.1	Meningkatkan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana	2.1.1 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengolahan dan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk adaptasi terhadap perubahan iklim serta mitigasi risiko gagal panen akibat bencana.	Jumlah desa yang ditingkatkan kapasitasnya untuk penguatan ketahanan pangan dan gizi yang adaptif terhadap perubahan iklim	Desa	100	10	- Presentase daerah rentan rawan pangan (2029): 9.5% - Persentase daerah yang memiliki Tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang (2029): 90%	Kementerian Desa PDT	Kemenkeu, BNPB, Bapanas
			Jumlah desa yang ditingkatkan kapasitasnya untuk penguatan ketahanan pangan dan gizi yang adaptif terhadap perubahan iklim	Desa	100	10		Kementerian Desa PDT	Bapanas, Kementan, KKP, KLH
		2.1.2 Mengembangkan skema perlindungan bagi petani, peternak dan nelayan melalui layanan campuran,	Persentase lahan usaha pertanian yang terlindungi Asuransi	Persen	0,38	7,33		Kementerian Pertanian	Kemenkeu
			Persentase usaha tani yang mendapatkan	Persen	6,54	6,79		Kementerian Pertanian	Kemenkeu

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
		seperti konsultasi teknis, skema pinjaman, dan asuransi pertanian, peternakan dan perikanan.	akses pembiayaan						
2.2	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	2.2.1 Pengembangan pelaku usaha pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pelaku usaha pangan berbasis sumber daya lokal yang terfasilitasi penganekaragam an pangan	Lokasi	2	38	Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (2029): 10-15 %	Bapanas	Kemenko Pangan, Kementerian UMKM, Kemenperin, Kemendag
		2.2.2 Fasilitasi dan pendampingan bagi pengusaha UMKM di bidang pangan dalam pemenuhan legalitas usaha dan sertifikasi produk (NIB dan sertifikasi halal)	Persentase UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persen	26,01	24,00	Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (2029): 10-15 %	Kementerian UMKM	Kemenko Pangan, BKPM
			Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi halal	Persen	5,90	12		Kementerian UMKM	Kemenko Pangan, BPJPH
		2.2.3 Memperkuat peran BUMDes dalam	Jumlah BUMDes yang menjadi pemasok pangan	Badan Usaha	N/A	25	• Inflasi harga bergejolak (2029):	Kementerian Desa PDT	Kemenko Pangan,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
		kemitraan dengan petani untuk memasok pangan lokal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis.	lokal pada SPPG program MBG				3-5% • Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (2029): 10-19 %		BGN, Bapanas, Kementan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM
2.3	Pengembangan sistem jaringan pengaman sosial pangan berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.	2.3.1 Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi pada wilayah rentan rawan pangan.	Presentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	Persen	N/A	100	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan (2029): 100%	Bapanas	Kementan, BULOG
		2.3.2 Memperkuat integrasi pelayanan gizi masyarakat dalam program bantuan sosial dengan pendekatan berbasis kebutuhan	Persentase keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang mengakses layanan gizi masyarakat	Persen	7.457.744 KPM	10.000.000 KPM	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai (2029): 80	Kemensos	Kemendesa, Kemendagri, Bapanas, Kemenkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
		spesifik kepada kelompok rentan.	dalam program bantuan sosial						
2.4	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	2.4.1 Memperluas cakupan gerakan pangan murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat.	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan gerakan pangan murah	Lokasi	N/A	552 (38 provinsi dan 514 kab/kota)	• Inflasi harga bergejolak (2029): 3-5% • Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (2029): 10-15 %	Bapanas	Kemendagri, Kementan, KKP, BULOG, BUMN Bidang Pangan
2.5	Penguatan sistem informasi pasar dan harga pangan	2.5.1 Menyediakan data panel tentang harga komoditas pangan strategis	Jumlah provinsi yang menyediakan data panel harga komoditas pangan strategis	Provinsi	N/A	38	Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (2029): 10-15 %	Bapanas	Kementan, BPS, Kemendag, KKP
		2.5.2 Memperkuat proyeksi ketersediaan dan kebutuhan	Jumlah provinsi yang menyusun proyeksi ketersediaan dan kebutuhan	Provinsi	35	38		Bapanas	Kemenko Pangan, Kementan, KKP,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
		pangan melalui neraca pangan	pangan melalui neraca pangan						Kemendag, BPS, BULOG
2.6	Meningkatkan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	2.6.1 Menyediakan sarana prasarana mendukung distribusi dan logistik pangan serta stabilitas harga pangan	Jumlah sarana distribusi dan logistik pangan	Unit	N/A	21 (12 sarana logistik dan 9 sarana stabilisasi harga)	Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (2029): 10-15 %	Bapanas	BGN, Kementan, Kemendesa, KLH
2.7	Penyelamatan Pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan	2.7.1 Melaksanakan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan	Jumlah provinsi yang melaksanakan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan	Provinsi	17 Provinsi	26 Provinsi	Persentase pangan yang terselamatkan: 3-5%	Bapanas	KLH, BGN, Kemendagri
		2.7.2 Menyediakan data dan informasi penyelamatan pangan	Tersedianya data dan informasi penyelamatan pangan	Data	1 Data	1 Data		Bapanas	KLH, BGN, Kemendagri
		2.7.3 Memfasilitasi sarana dan prasarana	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana	Paket/unit	5 Paket/unit	3 Paket/unit		Bapanas	KLH, BGN, Kemendagri

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
		mendukung penyelamatan pangan	mendukung penyelamatan pangan						
		2.7.4 Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sisa makanan.	Tersedianya materi mengenai pentingnya pengurangan sisa pangan ke dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini, tingkat dasar hingga perguruan tinggi.	Dokumen	4 Dokumen Perencanaan Pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah	3 Dokumen Perencanaan Pembelajaran yang terintegrasi dengan materi terkait pangan dan gizi 3 (Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA)	Persentase pangan yang terselamatkan (2029): 3-5%	Kemen Dikdasmen	Bapanas, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemenag
		2.7.5 Membuat rekomendasi kebijakan dan petunjuk teknis terkait pengendalian <i>food waste</i> dalam program	Tersedianya rekomendasi kebijakan dan petunjuk teknis terkait pengendalian <i>food waste</i> dalam	Dokumen	N/A	1	Persentase pangan yang terselamatkan (2029): 3-5%	BGN	KLH, Kementan, Bapanas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
		makan bergizi gratis	program makan bergizi gratis						

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
3.1	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	3.1.1 Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan fortifikasi pangan 2025-2045.	Tersedianya peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia periode 2025-2045	Dokumen	N/A	1	- Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % - Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5% - Prevalensi remaja putri anemia	Bappenas	Kementan, Kemenperin, BPOM, Kemenkes, Industri Pangan, Mitra Pembangunan, NGO
		3.1.2 Memperkuat koordinasi sektor publik dan swasta melalui forum koordinasi fortifikasi pangan nasional dalam pengawasan dan pembinaan program	Terselenggaranya forum koordinasi fortifikasi pangan nasional	Pertemuan	N/A	Minimal 1 tahun sekali		Bappenas	Kemenko Pangan, Kementan, Bappenas, Kemenperin, BPOM, Kemenkes, Organisasi Masyarakat, Mitra Pembangunan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		fortifikasi pangan.					(2029): 15%		
		3.1.3 Melaksanakan pengawasan implementasi regulasi pangan terfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku.	Jumlah produsen minyak goreng sawit yang dibina dalam rangka mengimplementasikan produksi minyak goreng sawit sesuai SNI yang berlaku	Perusahaan (akumulasi)	N/A	40	• Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%	Kemenperin	BPOM, Kemendag, BSN, Kemenkes, Kementan, Bappenas, SUN Network
			Jumlah produsen tepung terigu yang dibina dalam rangka pengimplementasian produksi tepung terigu sebagai bahan makanan terfortifikasi sesuai SNI yang berlaku	Perusahaan (akumulasi)	N/A	20		Kemenperin	BPOM, Kemendag, BSN, Kemenkes, Kementan, Bappenas, SUN Network
			Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	Persen	11	76	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	BPOM	Kemenkes, Kemendagri, BSN, Kemenperin, Kemendag, KKP, Kementan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan (UPT)	Persen	61,47	77	(2029): 85%	BPOM	Kementan, Kemenperin, Kemenkes, Industri Pangan, Mitra Pembangunan, NGO, KKP, Kementan
3.2	Penguatan pemanfaatan akses air minum dan sanitasi aman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Ketahanan Gizi yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim	3.2.1 Meningkatkan pemanfaatan akses air minum dan sanitasi aman di permukiman dan PHBS di tempat fasilitas umum (fasyankes, sekolah, pasar, dll) yang rentan terhadap perubahan iklim	Persentase rumah tangga dengan sanitasi aman	Persen	10,3	30	- Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % - Kab/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat: 200 Kab/Kota (2029)	Kemen PU	Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa, Kemendukbangsa
			Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	Kab/kota	100	300		Kemenkes	Kemendesa, Kemendagri
			Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kab/Kota	30	200		Kemenkes	Kemendesa PDT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PU,
			Kabupaten/kota sehat	Kab/kota	195	330		Kemenkes	Kemendagri, BMKG, Kemen LH, Kemendikdasmen

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
							Kab/kot a sehat: 330 Kab/Kot a (2029)		
3.3	Penyediaan air minum yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi	3.3.1 Penguatan kapasitas kualitas air minum aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	30,45	43,00	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 %	Kemen PU	Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa, Kemendukbangga
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi keamanan pangan dan mutu pangan	3.4.1 Meningkatkan sosialisasi keamanan pangan dan gizi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pangan olahan	Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	Kab/kota	50	360	Kabupat en/kota dengan pengelol aan pangan siap saji memenuhi syarat: 360	Kemenkes	BPOM, Bapanas, Kemenperin, Kemenko PMK
			Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	Kab/kota	50	360		Kemenkes	BPOM, Bapanas, Kemenperin, Kemenko PMK
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi keamanan	Kab/kota	412	514		BPOM	Kemenkes, Bapanas, Kementan, KKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			pangan dan gizi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pangan olahan.				Kab/kota (2029) - Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS): 360 - Kab/Kota (2029) - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman (2029): 78%		

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		3.4.2 Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum mengonsumsi pangan olahan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi mengenai Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa)	Kab/kota	112	361	Persentase Kabupaten/ Kota Pangan Aman (2029): 78%	BPOM	Kemenkes, Bapanas, Kemenperin
		3.4.3 Meningkatkan sosialisasi tentang program pembudayaan keamanan pangan di sekolah	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi tentang program pembudayaan keamanan pangan di sekolah	Kab/kota	412	514	Persentase Kabupaten/ Kota Pangan Aman (2029): 78%	BPOM	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenag, BGN
3.5	Peningkatan jaminan	3.5.1 Melakukan pendampingan	Persentase UMKM yang didampingi dan	Persen	15,62	96,49	Persentase Pangan	BPOM	Kemenkes, BSN, Kemendag, BP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
	keamanan dan mutu pangan	terhadap UMKM Pangan Olahan dalam rangka penerapan standar dan mutu, produksi pangan olahan	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan (UPT)				Olahan yang Aman dan Bermutu (2029): 85%		BUMN, Kementan, Kemenperin, KKP
		3.5.2 Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu <i>pre</i> dan <i>post market</i> pangan olahan	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (UPT)	Persen	96,09	90,28	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu (2029): 85%	BPOM	Bapanas, Kementan, KKP
			Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Persen	89,5	94	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu (2029): 85%	BPOM	Kemenperin, Kementan, KKP, Bapanas, BPJPH, KemenUMKM, Kemendag
			Persentase keputusan hasil pengawasan	Persen	99,94	100	Persentase Pangan	BPOM	Komdigi, Kemenekraf, KPI,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan				Olahan yang Aman dan Bermutu (2029): 85%		KKP, Kemendag, BGN, Kementan, BKI
		3.5.3 Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu PIRT	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan PIRT	Laporan	2	2	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang Aman dan Bermutu, (2029): 79%	BPOM	Kemendagri
			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (UPT)	Persen	94,64	93,54	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang Aman dan Bermutu, (2029): 79%	BPOM	Kemendagri
3.6	Meningkatkan pelayanan	3.6.1 Memastikan akses	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	Persen	78,21	90	• Prevalensi	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendukbangga,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
	kesehatan dan gizi di semua tingkat pelayanan kesehatan	pelayanan gizi bagi kelompok rentan (ibu hamil, balita, lansia, dan masyarakat di daerah rawan pangan).					<i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % ● Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5%		Kemendagri, Kemendesa, KemenkoPM
			Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	Persen	48,57	70		Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendukbangga, Kemendagri, Kemendesa
			Persentase balita gizi buruk mendapat tata laksana	Persen	82,6	95		Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa, Kemendukbangga
		3.6.2 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terkait perubahan iklim.	Persentase penurunan kejadian penyakit sensitif iklim	Persen	8,07	14% dari estimasi kasus tahun 2029 (4.637.328)	Persentase penurunan kejadian penyakit sensitif iklim (2029): 14%	Kemenkes	KLH, Kementan, BNPB

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		3.6.3 Meningkatkan pelayanan serta edukasi gizi, dan reproduksi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah	Persen	82,94	80	Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15%	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendukbangga, Setwapres, Bappenas, KemenkoPMK, Kemendagri
			Persentase remaja putri diskriminasi anemia	Persen	3,75	85	Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15%	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendes, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemendukbangga
			Persentase Ibu hamil mengonsumsi Suplementasi Gizi	Persen	8,62	80	Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendes, Kemendukbangga, KemenkoPMK, KemenPPPA

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Kelompok masyarakat	35,000	34.289	Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15%	Kemenduk bangsa	KemenPPPA, Kemendagri
		3.6.4 Mendorong penyediaan makan bergizi gratis di sekolah, madrasah, dan pesantren dengan bahan pangan lokal dan tidak menggunakan makanan ultra proses.	Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	Persen	75.28	75,59	• Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4% • Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15% • Prevalensi Ketidacukupan Konsum	BGN	Kemenkes, Kemenag, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
							si Pangan: 4.41		
			Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/ sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persen	N/A	95	Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U (2029): 75.67%	BGN	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
			Persentase siswa SD/MI/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persen	24	100		BGN	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
			Persentase siswa SMP/MTs/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persen	24	100		BGN	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
			Persentase siswa SMA/MA/SMK/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persen	24	100		BGN	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persen	24	100		BGN	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
			Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	Persen	24	100		BGN	Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenag, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
		3.6.5 Mendorong penyediaan makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan bahan pangan lokal dan tidak menggunakan	Persentase anak balita yang mendapatkan makan bergizi gratis	Persen	11	100	- Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4% - Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan	BGN	Kementan, Kemenkes, Kemenag, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan makan bergizi gratis	Persen	11	100		BGN	Kementan, Kemenkes, Kemenag, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		makanan ultra proses.	Persentase Ibu menyusui yang mendapatkan makan bergizi gratis	Persen	10	100	sangat pendek): 14.2 % • Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5%	BGN	Kementan, Kemenkes, Kemenag, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
			Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	Persen	87.99	90.1		BGN	Kementan, Kemenkes, Kemenag, Kementan, Bapanas, KemenkoPMK
		3.6.6 Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas	Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya secara aktif mengelola faktor risiko obesitas	Persen	91	100	Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4%	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendagri
			Persentase skrining obesitas pada populasi target	Persen	32.2	60		Kemenkes	Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		3.6.7 Penerapan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender, termasuk penanganan <i>Stunting</i> , kesehatan reproduksi, dan adaptasi perubahan iklim.	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan	Persen	45,13	100	Kab/kota sehat (2029): 330	Kemenkes	KLH, Bappenas, Kemendagri
			Desa/kelurahan sehat iklim	Desa/Kel	541	5140		Kemenkes	KLH, Kemendesa PDT, Bappenas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			Jumlah daerah yang dibina terkait kebijakan PUG dan perubahan iklim di sektor pangan dan gizi	Provinsi	0	21	• Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % • Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5% • Kab/kota sehat (2029): 330	KemenPPPA	Kemenkes, Kementan, Kemendagri, Kemendesa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
3.7	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI) berbasis pangan lokal	3.7.1 Meningkatkan edukasi dan pemberian ASI Eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	87,61	85	• Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % • Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5% • Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa, Kemendukbangga, KemenkoPMK, KemenPPPA
		3.7.2 Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan pendamping ASI (MP-ASI) berbahan dasar pangan lokal	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	Persen	90,08	85		Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendesa, Bapanas, Kementan, SUN Network
			Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Persen	70,29	90		Kemenkes	Kemendagri, Kemendesa, Kemendukbangga, Kemenko PMK, KemenPPPA, BGN
			Persentase balita gizi bermasalah mendapat makanan tambahan	Persen	44,26	85		Kemenkes	Kemendagri, Kemendesa, Kemendukbangga, KemenkoPMK, BGN

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
3.8	Edukasi dan promosi pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim	3.8.1 Meningkatkan kampanye pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) kepada masyarakat, termasuk anak-anak sejak usia dini	Jumlah daerah yang melaksanakan promosi penganekaragaman pangan bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Daerah	38	38	• Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (2029): 96 • Konsumsi ikan masyarakat 28,63 kg/kapita/tahun. • Konsumsi buah dan sayur (2029): 255,29 gram/kapita/hari • Konsumsi pangan hewani	Bapanas	Kementan, Kemenkes, Komdigi
			Jumlah Rumah Pangan B2SA	Lokasi	47	2320		Bapanas	Kementan, Kemenkes, Kemendukbangsa, Kemendagri
			Jumlah orang yang terpapar menonton podcast dengan tema terkait aktivitas fisik, konsumsi buah sayur serta pembatasan gula	Orang	N/A	514		KemenPPP A	Kemenkes, Kemendikdasmen, Komdigi
			Jumlah layanan penyebaran informasi pemenuhan hak anak atas gizi khususnya terkait pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Layanan	2	1		KemenPPP A	Kemenkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
							(2029): 139, 76 gram/ka pita/hari		
		3.8.2 Meningkatkan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Persen	52,53	80	Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4%	Kemenkes	Kementan, Bapanas, Kemendagri, Komdigi
		3.8.3 Meningkatkan aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi rentan bencana dan perubahan iklim	Jumlah komunitas untuk iklim yang menurun tingkat kerentanannya terhadap risiko wilayah	Kelompok masyarakat	288	222	222 kelompok masyarakat	KLH/BPLH	Bappenas, Kemendagri, Kemendesa, Kementan, KKP, BNPB
		3.8.4 Melibatkan <i>influencer</i> , tokoh	Jumlah jangkauan kampanye publik, termasuk kampanye digital, untuk	Orang Terpapar Informasi	N/A	14.818.750	• Skor Pola Pangan	Komdigi	Kemenkes, Kementan, Bapanas,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		masyarakat/agrama/politik/selebgram lokal dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi pangan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim	perubahan perilaku konsumsi pangan lokal padat gizi yang adaptif terhadap perubahan iklim. Jumlah lokasi kampanye publik, termasuk kampanye digital, yang melibatkan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan/atau selebgram lokal untuk perubahan perilaku konsumsi pangan lokal padat gizi yang adaptif terhadap perubahan iklim.	Provinsi	N/A	5	Harapan (PPH) Konsumsi (2029): 96 • Konsumsi buah dan sayur (2029): 255.29 gram/ka/pita/hari • Konsumsi pangan hewani (2029):	Komdigi	Setwapres, Kemendagri, Bappenas, Kemendukbangga

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
			Jumlah lokasi kampanye publik melalui media penyiaran, media tatap muka, media luar ruang, sms blast, dan media komunikasi lainnya untuk perubahan perilaku konsumsi pangan lokal padat gizi yang adaptif terhadap perubahan iklim	Kab/kota	N/A	10	139.76 gram/ka pita/hari	Komdigi	
		3.8.5 Meningkatkan komitmen pimpinan kementerian dan kepala daerah untuk mengintegrasikan pesan kunci gizi seimbang berbasis pangan lokal	Tersedianya dokumen kurikulum yang mengadopsi pesan kunci PGS-PL untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Dokumen	N/A	3 dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan yang terintegrasi dengan materi terkait pangan dan gizi	• Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15% • Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4%	Kemen Dikdasmen	Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenag

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
		(PGS-PL) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas				3 (Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA)			
		3.8.6 Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah KIE yang mendukung peningkatan kapasitas gizi anak	Orang	N/A	1	• Konsumsi ikan masyarakat at 28.63 kg/kapita /tahun • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (2029): 96 • Konsumsi buah dan sayur (2029): 255.29	KemenPPPA	Kemenkes, Kementan, Kemendagri, Kemendesa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
							gram/kapita/hari Konsumsi pangan hewani (2029): 139.76 gram/kapita/hari		
3.9	Peningkatan konsumsi protein (hewani dan nabati), vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup,	3.9.1 Meningkatkan konsumsi pangan hewani	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	Persen	N/A	2	- Konsumsi ikan masyarakat (2029): 28.63 kg/kapita/tahun - Volume produksi olahan perikanan (2029): 4.37 juta ton	Bapanas	Kemenko PMK, Kementan, Kemendagri, Kemendesa, Kemenkes
		3.9.2 Meningkatkan konsumsi vitamin dan mineral bersumber dari sayur dan buah	Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah	Persen	N/A	1		Bapanas	Kemenko PMK, Kementan, Kemendagri, Kemendesa, Kemenkes
		3.9.3 Meningkatkan konsumsi protein hewani khususnya	Kontribusi protein ikan terhadap sumber protein hewani	Persen	53	53.6		KKP	Kementan, Bapanas, Kemendesa, Kemenkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
	terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	berasal dari pangan akuatik dan hasil olahannya.	Volume produksi olahan perikanan	Juta Ton	3,71	4,37	• Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan: 4.41 • Konsumsi buah dan sayur (2029): 255.29 gram/ka pita/hari • Konsumsi pangan hewani (2029): 139.76 gram/ka pita/hari	KKP	Kementan, Bapanas, Kemendesa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
3.10	Pengendalian produk pangan tinggi gula, garam, dan lemak	3.10.1 Mendorong ditetapkan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru	Tersedianya regulasi mengenai penetapan barang kena cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan	Dokumen	1. Penetapan Penyusunan RPP tentang Barang Kena Cukai MBDK masuk dalam Program Penyusunan RPP Tahun 2025 sebagai mana ditetapkan dalam	Penyusunan dan Penetapan RPMK Tarif Cukai MBDK	Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4%	Kemenkeu	Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenperin, BPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
					Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.				
					2. Target penerimaan cukai				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
					MBDK telah dicantumkan dalam APBN 2026 sebesar Rp. 7,6 Triliun. 3. Pemerintah telah menyampaikan usulan kebijakan cukai MBDK kepada Komisi				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
					XI DPR RI pada bulan Desem ber 2025. Kebijak an Cukai MBDK belum dapat diimple mentas ikan di tahun 2025 dengan pertim bangan kondisi pereko nomian serta				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
					daya beli masyar akat.				
		3.10.2Meningkatkan penguatan regulasi untuk pengendalian konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL)	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pengendalian konsumsi gula garam lemak	Persen	N/A	48	Prevalensi obesitas >18 tahun (2029): 23,4%	Kemenkes	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag
			Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	NSPK	1	1	- Persenta se Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu , (2029): 85% - Persenta se pangan industri rumah	BPOM	Kemenko PMK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim									
							tangga yang aman dan bermutu (2029): 79% • Persentase Kab/Kota Pangan Aman (2029): 78%		

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
4.1	Penguatan Data Sistem Pangan dan Gizi	4.1.1 Menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan dan mendorong pemanfaatannya hingga tingkat kabupaten	Jumlah wilayah yang menyusun dan memanfaatkan peta ketahanan dan kerentanan pangan/ FSVA setiap tahun dan mendorong pemanfaatannya	Wilayah	38	39	• Persentase daerah rentan rawan pangan (2029): 12,6% • Skor PPH Konsumsi: 96 • Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity Experience Scale/ FIES</i>) (2029): 3.36%	Bapanas	Kemendagri, BPS
		4.1.2 Menyusun peta situasi kewaspadaan pangan dan mendorong pemanfaatannya hingga tingkat kabupaten	Jumlah wilayah yang menyusun peta situasi kewaspadaan pangan	Wilayah	34	38		Bapanas	Kemendagri, BPS

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
		4.1.3 Menyusun data situasi konsumsi pangan dan mendorong pemanfaatan ya hingga tingkat kabupaten	Jumlah provinsi yang menyusun data situasi konsumsi pangan	Provinsi	38	38		Bapanas	Kemendagri, BPS, KemenPPPA
4.2	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	4.2.1 Menguatkan forum koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang terintegrasi dengan upaya percepatan penurunan <i>Stunting</i> serta memasukkan aksi iklim sebagai	Jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terkait pangan dan gizi yang dilakukan	Kegiatan/pertemuan/rapat	N/A	1	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (2029): 96 - Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % - Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5%	Kemenko PMK	Bappenas
			Jumlah daerah yang menerapkan konvergensi dan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di daerah	Provinsi/Kabupaten/Kota	54	38 dan 514		Kemendagri	Kemendagri dan Bappenas
			Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAN-PG 2025-2029	Kegiatan	N/A	Minimal 1 tahun sekali		Bappenas	K/L yang terlibat dalam koordinasi RAN-PG

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
		komponen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev aksi ketahanan pangan dan gizi					• Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15% • Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%		
		4.2.2 Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan program ketahanan	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan Pembangunan Berketahanan Iklim dan/atau Pembangunan Rendah Karbon dalam perencanaan daerah	Provinsi	N/A	38	• Persentase penurunan emisi GRK (kumulatif) (2029): 21.12 • Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas	Bappenas	Kemendagri, KLH, Kemenkes
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan urusan pangan dan pertanian	Provinsi	38	38		Kemendagri	Bappenas, KLH, Bapanas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
		pangan di daerah					(kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) (2029): 0.646%		
		4.2.3 Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan ketahanan pangan daerah	Provinsi	38	38	• Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (2029): 96 • Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % • Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan	Kemendagri	Bapanas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
4.3	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	4.3.1 Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam program pangan dan gizi	Jumlah koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non pemerintah)	Kegiatan	N/A	1	gizi buruk) pada balita: 5% • Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15% • Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%	Bappenas	Mitra pembangunan
		4.3.2 Melibatkan sektor non pemerintah untuk peningkatan kapasitas terkait ketahanan pangan	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan dalam Sekolah Lapang Iklim	Orang	N/A (2024)	50	• Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada sektor pertanian (2029): 0.439%	BMKG	Kementan
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas Forum Anak terkait ketahanan pangan dan gizi	Daerah	N/A	8		KemenPPPA	BMKG, Kementan
			Jumlah daerah yang diberikan pembinaan tentang implementasi Ruang Bersama Indonesia	Daerah	N/A	18		KemenPPPA	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
4.4	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	4.4.1 Melakukan peningkatan kapasitas dan PURG dan Pengarusutan Hak Anak (PUHA) di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah K/L yang diberikan bimtek dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender/ <i>Stunting</i> /AKI/peubahan iklim/kespro serta berbasis hak anak	K/L	0	12	• Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % • Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15% • Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%	KemenPPPA	Bappenas
			Jumlah daerah yang diberikan bimtek dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender/ <i>Stunting</i> /AKI/peubahan iklim/kespro serta berbasis hak anak	Kab/kota	N/A	24		KemenPPPA	Kemendagri
4.5	Penguatan kebijakan dan regulasi untuk ketahanan	4.5.1 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pelaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan pendekatan <i>one health</i>	Kegiatan/ Pertemuan/ Rapat	N/A	2	• Persentase penduduk yang menerapkan perilaku	Kemenko PMK	Mitra Pembangunan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
	pangan dan gizi yang berketahanan iklim	pendekatan <i>one health</i>	khususnya pembudayaan hidup sehat				hidup sehat (2029): 25% • Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (2029): 80% • Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR (2029): 514 • Persentase penduduk dengan literasi kesehatan (2029): 46,3%		
		4.5.2 Memperkuat monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis	Terbitnya dokumen monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis setiap tahun	Dokumen	N/A	1	• Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan	BGN	Bappenas Bapanas, Kemenkes, Kemendikdasmen, KemenPPPA

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
			Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	Persen	96,81	100	IMT/U (2029): 75.67 % • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (2029): 96 • Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan: 4.41	BGN	Bapanas, Kemenkes, Kemendikdasmen, KemenPPPA
4.6	Pengembangan platform penelitian di bidang pangan dan gizi yang berketahanan iklim	4.6.1 Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian cerdas iklim, <i>smart farming</i> dan <i>food sharing apps</i>	Jumlah purwarupa dari hasil riset mengenai inovasi pertanian cerdas iklim, <i>smart farming</i> dan <i>food sharing apps</i> untuk mencegah <i>food loss</i> yang diadopsi menjadi program pemerintah	Purwarupa	5	7 Kumulatif: 23	• Persentase penurunan susut pangan (2029): 3-5% • Persentase pangan yang terselamatkan (2029): 3-5%	BRIN	Kementan, Bapanas
			Jumlah kekayaan intelektual dari hasil riset mengenai inovasi pertanian cerdas iklim, <i>smart farming</i> dan <i>food sharing apps</i> untuk	Kekayaan Intelektual	4	7 Kumulatif: 23		BRIN	Kementan, Bapanas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
			mencegah <i>food loss</i> yang diadopsi menjadi program pemerintah						
		4.6.2 Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah purwarupa dari riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Purwarupa	1	1 Kumulatif: 4	• Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek): 14.2 % • Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita: 5%	BRIN	Kementan, Bapanas, Kemenkes
			Jumlah kekayaan intelektual dari riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Kekayaan Intelektual	1	2 Kumulatif: 5	• Prevalensi remaja putri anemia (2029): 15% • Prevalensi anemia pada ibu hamil (2029): 20%	BRIN	Kementan, Bapanas, Kemenkes
		4.6.3 Melakukan kajian mendalam	Tersedianya kajian analisis pangan lokal di Indonesia yang	Dokumen	N/A	1	• Persentase penurunan emisi GRK	Bappenas	BRIN,

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
		tentang pangan lokal Indonesia yang tahan iklim, ramah lingkungan, serta potensinya dalam mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan melalui pendekatan <i>diet modelling</i> .	padat gizi, tahan terhadap iklim dan ramah lingkungan				(kumulatif) (2029): 21.12		Bapanas, Kemendiktisaintek, Mitra Pembangunan
			Mengembangkan diet modeling berbasis <i>Food-Based Dietary Guidelines</i> (FBDG) untuk mengoptimalkan konsumsi pangan lokal sesuai preferensi dan budaya masyarakat serta meminimalkan dampak lingkungan.	Dokumen	1. 2 dokum en: Hasil Kajian dan Paket Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Panduan Gizi Seimbang Berbasis	6 Dokume n Panduan , Juknis, Laporan Kajian, Paket Media KIE Panduan Gizi Seimbang berbasis Pangan Lokal (PGS-PL)		Kemendikdasmen	Bappenas, Bapanas, Mitra Pembangunan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
					Pangan Lokal (PGS-PL) bagi Anak Usia Dini di Indonesia 2. 2 dokum en: Hasil Kajian dan Paket Media KIE Pandua n Gizi Seimba ng Berbasi s Pangan Lokal				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
					(PGS-PL) dan Menu Padat Gizi bagi Anak Usia Sekolah di Indonesia 3. 1 dokum en: Hasil Kajian Pandua n Gizi Seimba ng Berbasi s Pangan Lokal (PGS-PL)				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
					untuk Anak Usia Dini di Setting Tempat Penitip an Anak (TPA / Daycar e) 4. 1 dokum en: Hasil Kajian Pandua n Gizi Seimba ng Berbasi s Pangan Lokal (PGS- PL)				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2029)	Target Bidang Pangan, Gizi, Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 yang Didukung	K/L Penanggung Jawab	K/L Pemangku Kepentingan Terkait
Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									
					untuk Anak dengan Gang- guan Spektr- um Autism e (GSA)				

Lampiran II Program dan Kegiatan Bidang Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim dalam Matriks Pembangunan
RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
Kegiatan Bidang Pangan					
PN: Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air	Indeks Ketahanan Pangan		82	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
PP: Swasembada Pangan	Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		96	Badan Pangan Nasional
		Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan	Persen	4.41	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		98.30	Badan Pangan Nasional
KP: Penguatan Cadangan Pangan	Terjaganya cadangan pangan nasional	Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	Juta ton	3-3.5	Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
KP: Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	Meningkatnya penyediaan ikan konsumsi masyarakat	Volume produksi ikan budidaya	Juta ton	8.52	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Volume produksi perikanan tangkap	Juta ton	7.50	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP: Pengembangan Pangan Hewani	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	Produksi daging	Juta ton	5.56	Kementerian Pertanian
		Produksi telur	Juta ton	8.79	Kementerian Pertanian
		Produksi susu	ribu ton	900.4	Kementerian Pertanian
KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	Produksi padi	Juta ton	56.05	Kementerian Pertanian
		Produksi jagung	Juta ton	25.89	Kementerian Pertanian
		Produksi aneka kacang	Ribu ton	592.32	Kementerian Pertanian
		Produksi buah dan sayur	Juta ton	35.47	Kementerian Pertanian
		Produksi shorgum	Ribu ton	18.95	Kementerian Pertanian
		Produksi ubi jalar	Ton	1.707.902	Kementerian Pertanian
		Produksi kedelai	Ton	416.842	Kementerian Pertanian
		Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	Ton	650.000	Kementerian Kehutanan
KP: Penganekaragaman konsumsi pangan	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia	Konsumsi buah dan sayur	Gram/kapita/hari	255.29	Badan Pangan Nasional
		Konsumsi pangan hewani	Gram/kapita/hari	139.76	Badan Pangan Nasional
		Konsumsi umbi-umbian	Gram/kapita/hari	64/91	Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
		Konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita/tahun	28.63	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP: Pengendalian penyakit Asal Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Meningkatnya kualitas keamanan pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar		65	Badan Pangan Nasional
		Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi <i>standard</i> mutu dan keamanan pangan	Persen	80	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	Persen	100	Kementerian Pertanian
KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatkan konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	Jumlah komoditas wajib terfortifikasi	Komoditas	4	Kementerian Pertanian
		Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	Persen	100	Badan Pangan Nasional
KP: Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	12,6	Badan Pangan Nasional
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity</i>)	Persen	3.36	Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
		<i>Experience Scale/FIES</i> (%)			
KP: Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Meningkatnya implementasi praktik budi daya pertanian berkelanjutan	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Persen	87	Kementerian Pertanian
	Terjaganya sumber daya genetic komoditas produksi pertanian	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Varietas dan/galur	30	Kementerian Pertanian
		Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	Aksesi	4.800	Kementerian Pertanian
KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan	Persentase penurunan susut pangan	Persen	3-5	Kementerian Pertanian
	Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	Persentase pangan yang terselamatkan	Persen	3-5	Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Obat	Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	Kab/kota	360	Kementerian Kesehatan
		Persentase kab/kota Pangan Aman	Persen	78	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	Persen	85	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen	79	Badan Pengawas Obat dan Makanan
KP: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domesti Antardaerah, dan dengan Global	Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah	Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	Persen	10-15	Badan Pangan Nasional
Kegiatan Bidang Gizi					
PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup melalui edukasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	Persen	14.2	Kementerian Kesehatan
		Prevalensi remaja putri anemia	Persen	15	Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
	mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat				
KP: Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	Pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> melalui pendekatan spesifik dan sensitif	Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persen	5	Kementerian Kesehatan
		Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	Persen	10	Kementerian Kesehatan
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen	85	Kementerian Kesehatan
		Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	73	Kementerian Kesehatan
		Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	Persen	85	Kementerian Kesehatan
		Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	Persen	70	Kementerian Kesehatan
		Persentase keluarga yang mendapatkan pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	Persen	95	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
PP: Penyakit Pengendalian dan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam	Persentase obesitas >18 tahun	Persen	24,4	Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
Pembudayaan Hidup Sehat	menerapkan budaya hidup sehat, serta pembangunan berwawasan kesehatan				
KP: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah, Usia produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah	Persentase remaja putri mengonsumsi TTD	Persen	80	Kementerian Kesehatan
PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Terlaksananya pemberian makan bergizi gratis bagi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah untuk mencapai pemenuhan gizi	Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	Persen	90.1	Badan Gizi Nasional
		Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	Persen	75.67	Badan Gizi Nasional
KP: Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita	Terlaksananya pemberian makan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makan bergizi	Persen	100	Badan Gizi Nasional
		Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makan bergizi gratis	Persen	100	Badan Gizi Nasional
		Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makan bergizi gratis	Persen	100	Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
		Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/Sederajat) yang mendapatkan bantuan makan bergizi gartis	Persen	100	Badan Gizi Nasional
		Persentase siswa (SMP/MTs/Sederajat) yang mendapatkan bantuan makan bergizi gartis	Persen	100	Badan Gizi Nasional
		Persentase siswa (SMA/MA/SMK /Sederajat) yang mendapatkan bantuan makan bergizi gartis	Persen	100	Badan Gizi Nasional
		Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makan bergizi gartis	Persen	100	Badan Gizi Nasional
		Persentase siswa santri yang mendapatkan bantuan makan bergizi gartis	Persen	100	Badan Gizi Nasional
KP: Penguatan Ekosistem Pemberian Makanan Bergizi	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi gratis	Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	Sistem	1	Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
	untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	Unit	26.508	Badan Gizi Nasional
		Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	Badan Gizi Nasional
Kegiatan Bidang Lingkungan/ Aksi Perubahan Iklim					
KP: Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan	Kab/Kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	Kab/kota	300	Kementerian Kesehatan
		Kab/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kab/kota	200	Kementerian Kesehatan
PP: Swasembada Air	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	Rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	43	Kementerian Pekerjaan Umum
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	30	Kementerian Pekerjaan Umum
KP: Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah	Menurunnya emisi GRK sektor pengelolaan limbah	Reduksi emisi GRK sektor limbah	Juta ton CO ₂ -Eq	31.90	Kementerian Lingkungan Hidup
PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi bencana sosial serta dampak perubahan iklim	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Persen	85	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2029	Koordinator/Pengampu
KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	Persen	25	Kementerian Sosial
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	Persen	80	Kementerian Sosial
KP: Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Deas	Meningkatnya ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa	Persentase desa berketahanan iklim	Persen	38.73	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
PP: Pembangunan berketahanan iklim	Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor prioritas	Persen	0.646	Kementerian Lingkungan Hidup

Lampiran III Penajaman Strategi dan Aksi RAN-PG berdasarkan Dampak Perubahan Iklim

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim						
1.1	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi	1.1.3. Meningkatkan produksi pangan lokal yang berketahanan iklim dan berbasis ekoregion	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Peningkatan keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak lingkungan yang merugikan akibat intensifikasi pertanian monokultur 2. Peningkatan ketahanan pangan terhadap perubahan suhu dan curah hujan, cuaca ekstrem, hama, dan penyakit Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan akses terhadap keberagaman pangan bergizi di tingkat lokal 2. Diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan asupan zat gizi makro dan mikro
	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim sektor Kelautan dan Pesisir)	Sistem Pangan dan Gizi	1.1.5. Meningkatkan produksi pangan akuatik budidaya sesuai dengan karakteristik ekoregion	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Peningkatan keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak lingkungan yang merugikan melalui budidaya yang lebih berkelanjutan dan diversifikasi pangan lokal. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan akses terhadap keberagaman pangan bergizi di tingkat lokal yang diharapkan lebih tahan iklim. 2. Diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, terutama di sektor perikanan dan kelautan,

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
						sehingga dapat meningkatkan asupan zat gizi makro dan mikro.
	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	Adaptasi dan Mitigasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Air dan Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Air	1.1.6. Meningkatkan produksi pangan hewani, pangan lokal dan nabati termasuk pangan yang terabaikan dan kurang dimanfaatkan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Produksi dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan yang dihasilkan melalui pola agroforestri berpotensi untuk menjaga keberlanjutan hutan dan Daerah Aliran Sungai dengan tetap mendukung ketahanan pangan. Terkait DAS, tutupan vegetasi yang ada dapat memperbaiki infiltrasi air, mengurangi aliran permukaan, dan menekan laju erosi menuju sungai. 2. Agroforestri turut mendukung penyerapan karbon dengan mempertahankan tutupan hutan. 3. Penanaman tanaman perkebunan seperti tanaman buah terutama pada lahan kritis merupakan bagian dari upaya peningkatan penyerapan karbon. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan akses terhadap keberagaman pangan bergizi di tingkat lokal 2. Diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan asupan zat gizi makro dan mikro 3. Strategi penguatan ekonomi dengan mempertahankan dan menciptakan penghidupan untuk masyarakat lokal yang memanfaatkan hasil hutan.
	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan,	Peningkatan produksi pangan lokal yang	Adaptasi dan Mitigasi	Sistem Pangan dan Gizi	1.1.7. Meningkatkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan	Manfaat terhadap aksi perubahan iklim: 1. Agroforestri (perhutanan sosial) berpotensi untuk menjaga keberlanjutan hutan dan Daerah Aliran

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	dan banjir dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis	beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	(mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Air dan Pembangunan Rendah Karbon Sektor FOLU)			Sungai. Terkait DAS, tutupan vegetasi yang ada dapat memperbaiki infiltrasi air, mengurangi aliran permukaan, dan menekan laju erosi menuju sungai. 2. Agroforestri mendukung penyerapan karbon dengan mempertahankan tutupan hutan. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan akses terhadap keberagaman pangan bergizi di tingkat lokal 2. Diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan asupan zat gizi makro dan mikro 3. Mempertahankan dan menciptakan penghidupan untuk masyarakat lokal yang memanfaatkan hasil hutan.
	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Air dan Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Air	1.1.9 Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan irigasi	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Irigasi berkelanjutan dapat mengaliri air dari waduk atau sumber air lainnya yang menjamin ketersediaan air ketika musim kemarau atau terjadi kekeringan. 2. Dapat mengendalikan limpasan yang memicu banjir di area pertanian. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Irigasi berperan penting dalam menyalurkan air ke sawah atau lahan produksi lainnya untuk menjamin keberlangsungan produksi pangan masyarakat.

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
1.1	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir juga dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis dengan mongering atau yang belum dikelola secara berkelanjutan terganggunya jaringan irigasi, Peningkatan karbon dioksida (CO ₂) sebagai salah satu gas rumah kaca dapat menyebabkan kualitas gizi mikro (kalsium, zat besi, zinc, protein) pada sumber pangan menurun	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	Adaptasi dan Mitigasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Sektor Pertanian dan Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi	1.1.10. Meningkatkan pengembangan bibit dan benih pangan lokal padat gizi yang rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Peningkatan keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak lingkungan yang merugikan, khususnya emisi metana dari budidaya padi sawah 2. Peningkatan ketahanan pangan terhadap perubahan suhu dan curah hujan, cuaca ekstrem, hama, dan penyakit Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Bibit dan benih pangan lokal yang tahan terhadap perubahan iklim artinya toleran terhadap kekeringan, genangan, atau dampak perubahan iklim lainnya yang mengganggu produktivitas, sehingga tanaman lebih tahan terhadap stress iklim dan biologis dan terjaga produktivitasnya.
	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir juga dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis dengan mongering atau yang belum dikelola secara	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, aman dan berketahanan iklim.	Adaptasi dan Mitigasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Sektor Pertanian dan Mitigasi Iklim	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Air	1.1.11. Meningkatkan pengembangan dan implementasi sistem pertanian ramah iklim termasuk <i>smart farming</i>	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Smart farming turut berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan dampak lingkungan yang merugikan dengan teknologi yang dapat mendorong efisiensi sumber daya (pupuk, air, dan bahan bakar) 2. Terbangunnya bendungan sebagai penampung air dapat meningkatkan cadangan air permukaan untuk menjamin ketersediaan air ketika musim kemarau atau terjadi kekeringan

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	berkelanjutan terganggunya jaringan irigasi, Peningkatan karbon dioksida (CO ²) sebagai salah satu gas rumah kaca dapat menyebabkan kualitas gizi mikro (kalsium, zat besi, zinc, protein) pada sumber pangan menurun		Sektor Air dan Sektor Pertanian dan Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian)			3. Bendungan juga dapat mengendalikan limpasan yang memicu banjir di areal pertanian. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi 4. <i>Smart farming</i> dengan teknologi, baik dalam bentuk alat, mesin, ataupun aplikasi, dapat meningkatkan efisiensi proses dari produksi hingga pemasaran. 5. Terbangunnya bendungan artinya ketersediaan air untuk mengalir irigasi dan sawah sepanjang musim tanam yang penting dalam produksi pangan masyarakat. 6. Peningkatan ketahanan pangan terhadap perubahan suhu dan curah hujan, cuaca ekstrem, hama, dan penyakit
1.2	Meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, kekeringan, dan banjir juga dapat menyebabkan penurunan jumlah komoditas pangan strategis dengan mongering atau yang belum dikelola secara berkelanjutan terganggunya jaringan irigasi, Peningkatan karbon dioksida (CO ²) sebagai salah satu gas rumah kaca dapat menyebabkan	Pengayaan nilai gizi mikro sumber pangan biofortifikasi	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi	1.2.1 Mengembangkan budidaya padi biofortifikasi dengan berbagai zat gizi mikro	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan kandungan nutrisi dalam tanaman alih-alih memperluas lahan pertanian baru yang dapat memberikan dampak lingkungan atau melepas emisi GRK. 2. Mengatasi permasalahan menurunnya kandungan nutrisi dalam tanaman yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Mendukung upaya mengurangi defisiensi zat gizi mikro (<i>hidden hunger</i>) 2. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pangan pokok secara lebih efisien

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	kualitas gizi mikro (kalsium, zat besi, zinc, protein) pada sumber pangan menurun					
1.2	Peningkatan karbon dioksida (CO ²) sebagai salah satu gas rumah kaca dapat menyebabkan kualitas gizi mikro (kalsium, zat besi, zinc, protein) pada sumber pangan menurun	Pengayaan nilai gizi mikro sumber pangan biofortifikasi	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi	1.2.2 Mengembangkan biofortifikasi berbagai zat gizi mikro pada komoditas pangan strategis untuk meningkatkan nilai gizi dan ketahanan pangan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan kandungan nutrisi dalam tanaman alih-alih memperluas lahan pertanian baru yang dapat memberikan dampak lingkungan atau melepas emisi GRK. 2. Mengatasi permasalahan menurunnya kandungan nutrisi dalam tanaman yang turut disebabkan oleh perubahan iklim. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Mendukung upaya mengurangi defisiensi zat gizi mikro (<i>hidden hunger</i>) 2. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pangan pokok secara lebih efisien
1.4	Sebelum pangan didistribusikan, adanya peningkatan suhu dan kelembaban udara, kejadian cuaca ekstrem seperti gelombang panas dan curah hujan ekstrem dapat berkontribusi pada tumpahan dan degradasi selama penanganan, penyimpanan dan	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss/susut pangan</i>)	Adaptasi dan Mitigasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pertanian dan Pembang	Sistem Pangan dan Gizi	1.4.1 Meningkatkan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan dan penerapan <i>Good Handling Practice</i> (GHP) untuk meminimalkan kehilangan hasil panen	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) per unit berasal dari pangan, terutama dari susut pangan. 2. Pengurangan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya alam dan penurunan dampak lingkungan yang disebabkan oleh produksi, pengelolaan, transportasi, dan penyimpanan makanan yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut atau dikonsumsi 3. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi:

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	transportasi antara pertanian dan distribusi. Dalam proses pengemasan ataupun pemasaran sebelum distribusi, bahan pangan yang tidak memenuhi standar (pangan mengalami susut) atau tumpahan yang tidak disengaja dapat menyebabkan terbuangnya pangan.		unan Rendah Karbon Sektor Pertanian dan Sektor Limbah)			1. Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi nasional 2. Meningkatkan kemampuan menyediakan pangan layak konsumsi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan (rumah yatim piatu, panti asuhan) 3. Optimalisasi pemanfaatan hasil panen melalui sistem penanganan dan penyimpanan yang lebih baik
	Sebelum pangan didistribusikan, adanya peningkatan suhu dan kelembaban udara, kejadian cuaca ekstrem seperti gelombang panas dan curah hujan ekstrem dapat berkontribusi pada tumpahan dan degradasi selama penanganan, penyimpanan dan transportasi antara pertanian dan distribusi. Dalam proses pengemasan ataupun pemasaran	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss/susut</i> pangan)	Mitigasi (Pembang unan Rendah Karbon Sektor Pertanian dan Sektor Limbah)	Sistem Pangan dan Gizi	1.4.2. Meningkatkan penyediaan teknologi di sektor pertanian/ peternakan/perikanan untuk menekan <i>food loss</i> pada proses produksi hingga distribusi	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) per unit berasal dari pangan 2. Pengurangan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya alam dan penurunan dampak lingkungan yang disebabkan oleh produksi, pengelolaan, transportasi, dan penyimpanan makanan yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut atau dikonsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi nasional 2. Harga pangan yang lebih rendah dan peningkatan keterjangkauan, terutama bagi kelompok rentan 3. Meningkatkan kemampuan menyediakan pangan layak konsumsi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan (rumah yatim

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	sebelum distribusi, bahan pangan yang tidak memenuhi standar (pangan mengalami susut) atau tumpahan yang tidak disengaja dapat menyebabkan terbuangnya pangan.					piatu, panti asuhan) 4. Peningkatan akses terhadap pangan dan optimalisasi pemanfaatan hasil panen melalui sistem produksi, penanganan, dan penyimpanan yang lebih baik
1.5	Terbuangnya pangan berkontribusi pada berkurangnya cadangan pangan nasional untuk menyuplai bantuan pangan, menambah beban pendanaan perlindungan sosial	Pengelolaan CPP pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Perlindungan Sosial	1.5.1 Memastikan pengelolaan (pengadaan, pemeliharaan, monitoring) Cadangan Pangan Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota cukup tersedia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga sepanjang tahun dalam menghadapi risiko krisis dampak bencana dan perubahan iklim	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan ketersediaan pangan beragam saat menghadapi dampak bencana yang adaptif dan didasarkan pada potensi sumber daya dan kearifan lokal Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Menurunkan risiko kekurangan gizi dan permasalahan gizi lainnya akibat kelangkaan pangan. 2. Membangun kesiapsiagaan mengatasi kerentanan pangan dan gizi rumah tangga yang terdampak perubahan iklim, guncangan geopolitik, dan ekonomi global.
	Terbuangnya pangan berkontribusi pada berkurangnya cadangan pangan nasional untuk menyuplai bantuan pangan, menambah beban pendanaan perlindungan sosial	Pengelolaan CPP pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi	1.5.2 Memperkuat kelembagaan distribusi dan cadangan pangan masyarakat berbasis sumber daya dan kearifan lokal	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan ketersediaan pangan beragam saat menghadapi dampak bencana yang adaptif dan didasarkan pada potensi sumber daya dan kearifan lokal Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Menurunkan risiko kekurangan gizi akibat kelangkaan pangan.

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
						2. Membangun kesiapsiagaan mengatasi kerentanan pangan dan gizi rumah tangga yang terdampak perubahan iklim, guncangan geopolitik dan ekonomi global.
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim						
2.1	Peningkatan suhu udara, kekeringan, peningkatan suhu di laut, curah hujan ekstrem, gelombang tinggi di laut dan pesisir menyebabkan sekelompok masyarakat, terutama yang menggantungkan mata pencaharian dan sumber pangannya dari alam (petani, nelayan, masyarakat adat, dst) kehilangan penghidupannya dan harus disokong dengan bantuan sosial.	Meningkatkan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana (upaya preventif dan resiliensi)	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi	2.1.1 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengolahan dan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk adaptasi terhadap perubahan iklim serta mitigasi risiko gagal panen akibat bencana	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan ketahanan pangan pada komunitas lokal terhadap dampak perubahan iklim dan bencana Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan kebutuhan pangan bergizi yang sesuai kebutuhan spesifik pada kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia) 2. Mendorong produksi pangan sesuai budaya dan kebiasaan makan lokal
	Peningkatan suhu udara, kekeringan, peningkatan suhu di laut, curah hujan ekstrem, gelombang tinggi di laut dan pesisir menyebabkan	Meningkatkan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Perlindungan Sosial	2.1.2 Mengembangkan skema perlindungan bagi petani, peternak dan nelayan melalui layanan campuran, seperti konsultasi teknis, skema pinjaman, dan asuransi	Manfaat terhadap Ketahanan iklim: Pencegahan dan penanggulangan kerentanan yang disebabkan perubahan iklim dan bencana Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Meningkatkan ketahanan pada komunitas lokal terhadap dampak perubahan iklim dan bencana, baik

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	sekelompok masyarakat, terutama yang menggantungkan mata pencaharian dan sumber pangannya dari alam (petani, nelayan, masyarakat adat, dst) kehilangan penghidupannya dan harus disokong dengan bantuan sosial.	bencana (upaya preventif dan resiliensi)	Iklim Sektor Pertanian)		pertanian, peternakan dan perikanan.	melalui ketahanan pangan maupun keberlangsungan pendapatan.
2.2	Peningkatan suhu udara, kekeringan, peningkatan suhu di laut, curah hujan ekstrem, gelombang tinggi di laut dan pesisir menyebabkan sekelompok masyarakat, terutama yang menggantungkan mata pencaharian dan sumber pangannya dari alam (petani, nelayan, masyarakat adat, dst) kehilangan penghidupannya dan harus disokong	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Perlindungan Sosial	2.2.1 Pengembangan pelaku usaha pangan berbasis sumber daya lokal	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan ketahanan pangan pada komunitas lokal terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. 2. Mengurangi emisi dari rantai distribusi yang tidak efisien dengan menggunakan pangan lokal. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Menjamin ketersediaan pangan beragam, bergizi dan aman sepanjang waktu 2. Mendorong produksi pangan sesuai budaya dan kebiasaan makan lokal 3. Menjamin ketersediaan pangan segar dan bergizi secara merata, termasuk di daerah terpencil

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	dengan bantuan sosial.					
	Peningkatan suhu udara, kekeringan, peningkatan suhu di laut, curah hujan ekstrem, gelombang tinggi di laut dan pesisir menyebabkan sekelompok masyarakat, terutama yang menggantungkan mata pencaharian dan sumber pangannya dari alam (petani, nelayan, masyarakat adat, dst) kehilangan penghidupannya dan harus disokong dengan bantuan sosial.	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Perlindungan Sosial	2.2.3. Memperkuat peran BUMDes dalam kemitraan dengan petani untuk memasok pangan lokal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis.	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan ketahanan pangan pada komunitas lokal terhadap dampak perubahan iklim dan bencana 2. Mengurangi emisi dari rantai distribusi yang tidak efisien Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Menjamin ketersediaan pangan beragam, bergizi dan aman sepanjang waktu 2. Mendorong produksi pangan sesuai budaya dan kebiasaan makan lokal 3. Menjamin ketersediaan pangan segar dan bergizi secara merata, termasuk di daerah terpencil
2.3	Bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan menyebabkan semakin banyak korban bencana alam yang membutuhkan bantuan sosial.	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi, dan sesuai dengan	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Perlindungan Sosial	2.3.1 Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi pada wilayah rentan rawan pangan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Mengurangi kerentanan sistem pangan terhadap perubahan iklim dan bencana alam 2. Memungkinkan respons mitigasi dan adaptasi cepat terhadap pasokan pangan akibat perubahan iklim dan bencana alam Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Menjamin ketersediaan pangan bergizi sepanjang waktu pada kelompok rentan dan termajinalkan

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
		kebutuhan kelompok rentan.				2. Mengurangi ketergantungan pada strategi penanggulangan bencana yang negatif seperti mengonsumsi bantuan pangan yang lebih murah namun kurang bergizi 3. Mengurangi kelaparan dan masalah gizi pada kelompok rentan yang terdampak bencana alam dan perubahan iklim
	Bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan menyebabkan semakin banyak korban bencana alam yang membutuhkan bantuan sosial.	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Perlindungan Sosial	2.3.2 Memperkuat integrasi pelayanan gizi masyarakat dalam program bantuan sosial dengan pendekatan berbasis kebutuhan spesifik kepada kelompok rentan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan ketahanan pangan pada komunitas lokal terhadap dampak perubahan iklim dan bencana 2. Mengurangi emisi dari rantai distribusi yang tidak efisien Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Menjamin ketersediaan pangan beragam, bergizi dan aman sepanjang waktu 2. Mendorong produksi pangan sesuai budaya dan kebiasaan makan lokal 3. Menjamin ketersediaan pangan segar dan bergizi secara merata, termasuk di daerah terpencil
2.7	Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia berpotensi terbuang di tingkat distribusi dan konsumsi dan berkontribusi melepaskan GRK	Penyelamatan Pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan	Mitigasi (mendukung Pembangunan Rendah Karbon Sektor Limbah)	Sistem Pangan dan Gizi	2.7.1. Melaksanakan kebijakan dan aksi penyelamatan pangan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Pengurangan emisi GRK per unit makanan yang dikonsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Lebih banyak makanan dikonsumsi per dolar yang dibelanjakan karena pola konsumsi yang berkelanjutan, yang menghasilkan pengurangan limbah rumah tangga 2. Peningkatan akses terhadap pangan melalui peningkatan dan stabilitas pendapatan,

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
						misalnya melalui sistem penyimpanan yang lebih baik
	Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia berpotensi terbuang di tingkat distribusi dan konsumsi dan berkontribusi melepaskan GRK	Penyelamatan Pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan	Mitigasi (mendukung Pembangunan Rendah Karbon Sektor Limbah)	Sistem Pangan dan Gizi	2.7.2. Menyediakan data dan informasi penyelamatan pangan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Mengurangi emisi gas rumah kaca yang timbul dari pangan yang terbuang serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam (lahan, air, energi, dan input produksi) dalam sistem pangan Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi Mengurangi susut dan sisa pangan sehingga meningkatkan ketersediaan pangan, efisiensi pemanfaatan pangan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pangan yang masih layak konsumsi.
	Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia berpotensi terbuang di tingkat distribusi dan konsumsi dan berkontribusi melepaskan GRK	Penyelamatan Pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan	Mitigasi (mendukung Pembangunan Rendah Karbon Sektor Limbah)	Sistem Pangan dan Gizi	2.7.3. Memfasilitasi sarana dan prasarana mendukung penyelamatan pangan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Memetakan titik utama kontributor penghasil sisa pangan (<i>food waste</i>), sehingga dapat terpetakan strategi mitigasi yang tepat dalam mengurangi kontribusi GRK dari sisa pangan Manfaat terhadap pangan dan gizi: Memetakan titik utama kontributor penghasil sisa pangan (<i>food waste</i>), sehingga penyelamatan pangan dapat optimal dalam mendukung ketahanan pangan
	Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia berpotensi terbuang di tingkat distribusi dan konsumsi dan berkontribusi melepaskan GRK	Penyelamatan Pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan	Mitigasi (mendukung Pembangunan Rendah Karbon	Sistem Pangan dan Gizi	2.7.4. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sisa makanan.	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Mengoptimalkan penyelamatan pangan melalui sarana dan prasarana yang sesuai, sehingga mendukung Pembangunan yang rendah karbon Manfaat terhadap pangan dan gizi:

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
			Sektor Limbah)			Meningkatkan ketahanan pangan melalui pangan yang terselamatkan dan termanfaatkan melalui dukungan sarana dan prasarana yang sesuai
	Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia berpotensi terbuang di tingkat distribusi dan konsumsi dan berkontribusi melepaskan GRK	Penyelamatan Pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan	Mitigasi (mendukung Pembang unan Rendah Karbon Sektor Limbah)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Perlindungan Sosial	2.7.5. Membuat rekomendasi kebijakan dan petunjuk teknis terkait pengendalian <i>food waste</i> dalam program makan bergizi gratis	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Pengurangan emisi GRK per unit makanan yang dikonsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Lebih banyak makanan dikonsumsi per dolar yang dibelanjakan karena pola konsumsi yang berkelanjutan, yang menghasilkan pengurangan limbah rumah tangga 2. Peningkatan akses terhadap pangan melalui peningkatan dan stabilitas pendapatan, misalnya melalui sistem penyimpanan yang lebih baik
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi Masyarakat yang Berketahanan Iklim						
3.1	Permasalahan dalam aspek produksi dan distribusi pangan menyebabkan penurunan ketersediaan pangan bergizi untuk dikonsumsi, baik secara kuantitas (jumlah pangan bergizi) maupun kualitas (kandungan gizi dalam pangan: karbohidrat, protein,	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi	3.1.1 Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan fortifikasi pangan 2025-2045	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatkan efisiensi pertanian tanpa memperluas lahan pertanian baru 2. Meningkatkan produktivitas dengan dampak lingkungan minimal Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Mengurangi defisiensi zat gizi mikro (<i>hidden hunger</i>) 2. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pangan pokok secara lebih efisien

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	zat besi, zink, omega-3, dst.)					
	Permasalahan dalam aspek produksi dan distribusi pangan menyebabkan penurunan ketersediaan pangan bergizi untuk dikonsumsi, baik secara kuantitas (jumlah pangan bergizi) maupun kualitas (kandungan gizi dalam pangan: karbohidrat, protein, zat besi, zink, omega-3, dst.)	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi	3.1.2 Menguatkan koordinasi sektor publik dan swasta melalui forum koordinasi fortifikasi pangan nasional dalam pengawasan dan pembinaan program fortifikasi pangan	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatnya efisiensi pertanian tanpa memperluas lahan pertanian baru 2. Meningkatkan produktivitas dengan dampak lingkungan minimal Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Mengurangi defisiensi zat gizi mikro (<i>hidden hunger</i>) 2. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pangan pokok secara lebih efisien
	Permasalahan dalam aspek produksi dan distribusi pangan menyebabkan penurunan ketersediaan pangan bergizi untuk dikonsumsi, baik secara kuantitas (jumlah pangan bergizi) maupun kualitas (kandungan gizi dalam pangan: karbohidrat, protein,	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi	3.1.3 Melaksanakan pengawasan implementasi regulasi pangan terfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Meningkatnya efisiensi pertanian tanpa memperluas lahan pertanian baru 2. Meningkatkan produktivitas dengan dampak lingkungan minimal Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Mengurangi defisiensi zat gizi mikro (<i>hidden hunger</i>) 2. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pangan pokok secara lebih efisien

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	zat besi, zink, omega-3, dst.)					
3.2	Peningkatan suhu udara, curah hujan tinggi, serta bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan penurunan ketersediaan atau akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman	Penguatan pemanfaatan akses air minum dan sanitasi aman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Ketahanan Gizi yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Air	3.2.1 Meningkatkan pemanfaatan akses air minum dan sanitasi aman di permukiman dan PHBS di tempat fasilitas umum (fasyankes, sekolah, pasar, dll) yang rentan terhadap perubahan iklim	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Mencegah kontaminasi patogen ataupun agen lain yang menyebabkan penyakit diare, mengurangi genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk, serta menjaga kebersihan lingkungan agar lebih sehat dan aman dari penyakit sensitif iklim Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit akan mendukung penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.
3.3	Peningkatan suhu udara, curah hujan tinggi, serta bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan penurunan ketersediaan atau akses terhadap air minum yang aman	Penyediaan air minum yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi-	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Air	3.3.1 Penguatan kapasitas kualitas air minum aman	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Menurunnya risiko kejadian penyakit sensitif iklim, khususnya diare, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui akses berkelanjutan terhadap air minum aman dan sanitasi layak Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit akan mendukung penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.
3.6	Peningkatan suhu udara, curah hujan ekstrem, dan bencana	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan	Adaptasi (mendukung	Sistem Pangan dan	3.6.2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Mengantisipasi risiko penyakit menular yang dipicu perubahan iklim dan menyediakan layanan

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	alam akibat perubahan iklim seperti banjir, banjir pesisir, tanah longsor menyebabkan naiknya penyakit menular karena perubahan iklim seperti diare, ISPA, malaria, DBD yang dapat menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap zat gizi dengan optimal karena individu terjangkit penyakit menular	gizi di semua tingkat pelayanan kesehatan	Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan)	Gizi, Sistem Kesehatan	menular terkait perubahan iklim.	kesehatan yang adaptif saat terjadi krisis iklim untuk memberikan respon yang cepat dan akurat Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim dapat dikurangi melalui sistem kesehatan yang lebih tangguh. 2. Cakupan kesehatan semesta (<i>Universal Health Coverage</i>) dicapai sebagai tonggak penting untuk mewujudkan hak atas kesehatan. 3. Penanggulangan risiko kesehatan berdampak baik pada kesehatan masyarakat dan penyerapan gizi yang optimal dalam tubuh.
	Peningkatan suhu udara, curah hujan ekstrem, dan bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir, banjir pesisir, tanah longsor menyebabkan naiknya penyakit menular karena perubahan iklim seperti diare, ISPA, malaria, DBD yang dapat menyebabkan ketidakmampuan	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi di semua tingkat pelayanan kesehatan	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Kesehatan	3.6.5. Mendorong penyediaan makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan bahan pangan lokal dan tidak menggunakan makanan ultra proses.	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Menyediakan layanan kesehatan yang adaptif saat terjadi krisis iklim untuk memberikan respon yang cepat dan akurat Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan akses layanan pemulihan gizi khususnya bagi kelompok rentan dan kelompok termarjinalkan 2. Risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim dapat dikurangi melalui sistem kesehatan yang lebih Tangguh 3. Cakupan kesehatan semesta (<i>Universal Health Coverage</i>) dicapai sebagai tonggak penting untuk mewujudkan hak atas kesehatan

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	tubuh untuk menyerap zat gizi dengan optimal karena individu terjangkit penyakit menular					
	Peningkatan suhu udara, curah hujan ekstrem, dan bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir, banjir pesisir, tanah longsor menyebabkan gangguan pelayanan kesehatan dan gizi esensial karena rusaknya fasilitas kesehatan atau terhambatnya operasional kegiatan pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi di semua tingkat pelayanan kesehatan	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Kesehatan	3.6.7. Penerapan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender, termasuk penanganan stunting, kesehatan reproduksi, dan adaptasi perubahan iklim.	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Menyediakan layanan kesehatan yang adaptif saat terjadi krisis iklim untuk memberikan respon yang cepat dan akurat Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: 1. Meningkatkan akses layanan pemulihan gizi khususnya bagi kelompok rentan dan kelompok termarginalkan 2. Risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim dapat dikurangi melalui sistem kesehatan yang lebih Tangguh 3. Cakupan kesehatan semesta (<i>Universal Health Coverage</i>) dicapai sebagai tonggak penting untuk mewujudkan hak atas kesehatan
3.8	Permasalahan dalam ketersediaan dan akses (harga pangan tinggi) terhadap pangan membuat masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, beralih ke pangan dengan harga lebih murah yang	Edukasi dan promosi pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang responsif	Adaptasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Kesehatan	3.8.2. Meningkatkan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Mengurangi emisi dari rantai distribusi pangan yang panjang dan tidak efisien 2. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati dengan konsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Germas mendorong perilaku sehat terutama untuk mencegah penyakit menular, salah satunya adalah diare yang dapat dipicu oleh perubahan iklim. Risiko penyakit sensitif iklim dan tidak optimalnya

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	seringkali lebih tidak sehat atau bergizi	terhadap perubahan iklim				penyerapan zat gizi pada tubuh dapat ditekan melalui Germas.
	Permasalahan dalam ketersediaan dan akses (harga pangan tinggi) terhadap pangan membuat masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, beralih ke pangan dengan harga lebih murah yang seringkali lebih tidak sehat atau bergizi	Edukasi dan promosi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim	Adaptasi dan Mitigasi (mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim sektor Pesisir dan Pembangunan Rendah Karbon)	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Kesehatan	3.8.3. Meningkatkan aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi rentan bencana dan perubahan iklim	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Mengurangi emisi dari rantai distribusi pangan yang panjang dan tidak efisien 2. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati dengan konsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Mendorong perubahan perilaku konsumsi ke arah pola makan beragam bergizi seimbang dan aman yang ramah lingkungan
	Permasalahan dalam ketersediaan dan akses (harga pangan tinggi) terhadap pangan membuat masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, beralih ke pangan dengan harga lebih murah yang seringkali lebih tidak sehat atau bergizi	Edukasi dan promosi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Kesehatan	3.8.4. Melibatkan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi pangan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Mengurangi emisi dari rantai distribusi pangan yang panjang dan tidak efisien 2. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati dengan konsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Mendorong perubahan perilaku konsumsi ke arah pola makan beragam bergizi seimbang dan aman yang ramah lingkungan

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
	Permasalahan dalam ketersediaan dan akses (harga pangan tinggi) terhadap pangan membuat masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, beralih ke pangan dengan harga lebih murah yang seringkali lebih tidak sehat atau bergizi	Edukasi dan promosi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang responsif terhadap perubahan iklim	Penguatan sistem pangan dan gizi berketahanan iklim	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Kesehatan	3.8.5. Meningkatkan komitmen pimpinan kementerian dan kepala daerah untuk mengintegrasikan pesan kunci gizi seimbang berbasis pangan lokal (PGS-PL) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Manfaat terhadap ketahanan iklim: 1. Mengurangi emisi dari rantai distribusi pangan yang panjang dan tidak efisien 2. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati dengan konsumsi Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Mendorong perubahan perilaku konsumsi ke arah pola makan beragam bergizi seimbang dan aman yang ramah lingkungan
3.9	Permasalahan dalam ketersediaan dan akses (harga pangan tinggi) terhadap pangan membuat masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, beralih ke pangan dengan harga lebih murah yang seringkali lebih tidak sehat atau bergizi	Peningkatan konsumsi protein (hewani dan nabati), vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mitigasi (Mendukung Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian)	Sistem Pangan dan Gizi	3.9.2. Meningkatkan konsumsi vitamin dan mineral bersumber dari sayur dan buah	Manfaat terhadap aksi perubahan iklim Konsumsi sayur dan buah dapat menciptakan permintaan terhadap produk sayur dan buah, mendorong adanya produksi. Penanaman tanaman perkebunan seperti tanaman buah terutama pada lahan kritis merupakan bagian dari upaya peningkatan penyerapan karbon. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi Mendorong perubahan perilaku konsumsi ke arah pola makan beragam bergizi seimbang dan aman yang ramah lingkungan
			Adaptasi (mendukung Pembangunan	Sistem Pangan dan Gizi, Sistem Air	3.9.3. Meningkatkan konsumsi protein hewani khususnya berasal dari pangan akuatik dan hasil olahannya.	Manfaat terhadap ketahanan iklim: Pangan akuatik mencakup perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dengan adanya upaya peningkatan konsumsi, diharapkan produksi, pengelolaan, dan pengolahan ikan dapat turut

No	Dampak / Risiko	Strategi	Aksi			Manfaat terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi dan Ketahanan Iklim
			Jenis Aksi	Sistem Utama	Deskripsi Aksi RAN-PG	
			Berketahanan Iklim Sektor Kelautan dan Pesisir)			dikembangkan, mendukung pula adanya diversifikasi usaha nelayan. Diversifikasi usaha nelayan berpotensi menciptakan pendapatan tambahan / sampingan ketika terjadi cuaca ekstrem. Manfaat terhadap ketahanan pangan dan gizi: Pangan akuatik merupakan sumber protein berkualitas tinggi serta kaya akan mikronutrien penting, seperti zat besi, seng, iodium, vitamin D, dan asam lemak omega-3, yang berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemenuhan gizi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan akuatik juga mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang beragam, sehingga memperkuat penganekaragaman konsumsi pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY